

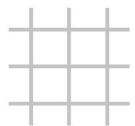


Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember

LKPJ

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI JEMBER

Tahun 2022





(LKPJ)

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

**KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember.

Penyusunan dan penyampaian LKPJ Tahun 2022 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 ini, merupakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati periode tahun 2021-2024 pada tahun kedua.

Gambaran kinerja tahunan ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan ketepatan perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh



Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh *stakeholders*. Penyampaian LKPJ Bupati Jember Tahun 2022 kepada DPRD, pada dasarnya menginformasikan gambaran kinerja perangkat daerah secara utuh sepanjang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD. Kolaborasi Bersama Pemerintahan Daerah baik dari DPRD dan Kepala Daerah bersama unsur pemerintahan dibawahnya agar tercapainya visi/misi maupun tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama DPRD, Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berperan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember selama Tahun Anggaran 2022 kami ucapkan terima kasih, dan semoga penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jember tahun berikutnya senantiasa mendapat kemudahan, perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridho Allah SWT.

Jember, Maret 2023

BUPATI JEMBER

Ir. H. HENDY S, ST , IPU



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Dasar Hukum	1-3
1.2 Visi dan Misi	1-4
1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	1-20
1.4 Program Pembangunan Daerah	1-29
1.5 Gambaran Umum Daerah	1-33
1.5.1 Kondisi Geografis.....	1-33
1.5.2 Gambaran Umum Demografis	1-56
1.5.3 Kondisi Ekonomi	1-59
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	2-1
2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	2-3
2.1.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	2-3
2.1.2 Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah.....	2-6
2.2 Pengelolaan Belanja Daerah	2-7
2.2.1 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	2-7
2.2.2 Perubahan Penjabaran Belanja Daerah	2-9
2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah	2-10



2.3.1 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.....	2-10
2.3.2 Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah	2-11

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3-1

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	3-3
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	3-402
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	3-434

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....

4-1

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan	4-2
4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya	4-4
4.1.1.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4-5
4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya	4-8
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian	4-8
4.2.1 Hambatan/Permasalahan tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.....	4-8
4.2.1.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4-9
4.3 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	4-9
4.3.1 Kerjasama Antar Daerah	4-11
4.3.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	4-14
4.3.3 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	4-18
4.3.4 Pembinaan Batas Wilayah.....	4-18



4.3.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	4-19
4.3.6 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	4-24
BAB V PENUTUP	5-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jember	1-21
Tabel 1.2	Pulau-pulau Kecil atau Kepulauan yang Memiliki Nama	1-33
Tabel 1.3	Luas Kecamatan Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Dusun/Lingkungan Kabupaten Jember.....	1-35
Tabel 1.4	Ketinggian Wilayah Kabupaten Jember.....	1-37
Tabel 1.5	Luas Wilayah (km ²) Kecamatan Menurut Ketinggian Tempat.....	1-37
Tabel 1.6	Kemiringan Lahan Kabupaten Jember	1-39
Tabel 1.7	Luas Wilayah (km ²) Kecamatan Menurut Klasifikasi Lereng.....	1-40
Tabel 1.8	Kawasan Budidaya Kabupaten Jember.....	1-42
Tabel 1.9	Kawasan Lindung Kabupaten Jember.....	1-50
Tabel 1.10	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kabupaten Jember	1-52
Tabel 1.11	Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jember	1-54
Tabel 1.12	Indikator kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2018 – 2022	1-56
Tabel 1.13	Jumlah Penduduk, Luas Wlayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2021.....	1-57
Tabel 1.14	Perkembangan Aparatur (PNS) berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 – 2022.....	1-58
Tabel 1.15	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)	1-62



Tabel 1.16	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)	1-63
Tabel 1.17	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar PDHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018 – 2022.....	1-65
Tabel 1.18	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2018 – 2022.....	1-66
Tabel 1.19	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022	1-68
Tabel 1.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022	1-69
Tabel 1.21	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022	1-70
Tabel 2.1	Perubahan Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan pada Tahun 2022.....	2-3
Tabel 2.2	Penjabaran Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022	2-7
Tabel 2.3	Penjabaran Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022	2-10
Tabel 2.4	Penjabaran Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022	2-11
Tabel 2.5	Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 – 2020	2-12
Tabel 2.6	Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021-2022	2-12
Tabel 4.1	Alokasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022 Kabupaten Jember	4-5
Tabel 4.2	Perkembangan Hasil Pencapaian Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2018 – 2022	4-21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2021-2026	1-8
Gambar 1.2	Peta Bisnis Sinergisitas Eksekutif dan Legislatif Pemerintahan Kabupaten Jember.....	1-12
Gambar 1.3	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Jember Menurut Kecamatan.....	1-36
Gambar 1.4	Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022.....	1-57
Gambar 1.5	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010.....	1-61
Gambar 1.6	PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah).....	1-64
Gambar 4.1	Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Jember Tahun 2015-2022.....	4-20

1

Pendahuluan

*M*engacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam pasal 71 ayat 2 diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah tahun anggaran berakhir. Pelaporan tersebut merupakan upaya pembentukan keseimbangan (*checks and balances*) antara dua fungsi penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu fungsi eksekutif (kepala daerah) dan fungsi legislatif (DPRD).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022, yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025. Dokumen tersebut memuat rencana pembangunan dalam satu tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Jember.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jember di tahun mendatang.



1.1 Dasar Hukum

Landasan hukum sebagai dasar pijakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022 ini mengacu dan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022.

1.2 Visi dan Misi

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah



kebijaksanaan pembangunan, dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan RPJM Nasional.

Visi adalah sebuah cita-cita luhur yang diharapkan sebagai arahan dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, visi diartikan sebagai cita-cita luhur yang menjadi arah dan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dibangun atas dasar kondisi, potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Kabupaten Jember yang akan dihadapi hingga tahun 2026.

Sinergis dengan hal tersebut di atas, Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember tahun 2005-2025 Tahap IV serta penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Perumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021-2026 ini di samping mengacu pada RPJPD Kabupaten Jember tahun 2005-2025 Tahap IV, juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Berdasarkan kondisi di atas, maka dirumuskan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah:

“WES WAYAHE MBENAHİ JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Penjabaran dari visi pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi Jember



Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/*stunting* yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, *wis wayahe!*

Kolaborasi

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan.

Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

Sinergi

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat



memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan pada semua bidang perlu dilakukan secara bersama-sama memadukan semua kekuatan atau energi artinya kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara parsial melainkan kegiatan harus dilaksanakan secara holistik dan fokus pada satu tujuan bersama. Semua unsur pembangunan daerah harus dilibatkan, secara sumber daya harus dikerahkan dan semua energi harus dikeluarkan, semua harus bergerak bersama dengan arah dan tujuan sama sehingga dengan kebersamaan tersebut akan menimbulkan margin (efektivitas dan efisiensi) dan dampak yang lebih besar.

Akselerasi

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah.

Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember

diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2021-2026



Berdasarkan visi pembangunan di atas, dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun ke depan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**



Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutanan, perikanan, Kategori industri pengolahan, serta Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Kegiatan pertanian *on-farm*, perikanan, dan kegiatan hulu lainnya harus diintegrasikan dengan kegiatan industri pengolahan produk dan prasarana pendukungnya, bahkan dengan pasar sasarnya. Integrasi kegiatan ekonomi hulu-hilir pada Kategori utama penyumbang PDRB diharapkan tidak hanya menjamin ketahanan pangan melalui produktifitas hasil pertanian dan perikanan yang tinggi, tetapi juga harus didorong agar dapat meningkatkan nilai tambah setiap produk yang dihasilkan melalui industri pengolahan dan perdagangan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pelaku usahanya.

Kelompok penduduk dengan jumlah populasi yang besar, seperti kelompok penduduk pelajar usia muda, termasuk yang di pesantren, adalah sasaran strategis yang dapat dilibatkan dalam mengembangkan sektor-sektor utama dan potensial penyumbang PDRB di atas. Kelompok yang berisi generasi *baby boomer* dan *millenial* tersebut dapat diberikan pelatihan yang lebih *technology-intensive* untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya dan usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi kelompok penduduk yang mendominasi struktur demografi tersebut harus didorong dan difasilitasi agar lebih banyak tercipta wirausaha-wirausaha muda baru, meskipun mulai dengan skala usaha mikro dan kecil. Selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas usahanya, mereka dapat dihimpun dan



dilembagakan dalam koperasi pemuda atau koperasi pondok pesantren yang terintegrasi dalam rantai koperasi primer, koperasi produksi, koperasi sekunder, koperasi pembiayaan, dan koperasi jenis lainnya sehingga memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengakses dan menjalin kerjasama usaha dengan industri *offtaker*.

Misi 1 secara keseluruhan telah memuat pilar pembangunan ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Pilar pembangunan ekonomi yang termuat dalam misi ini mencakup antara lain, (1) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (2) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (3) Berkurangnya Kesenjangan, dan (4) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (*good governance*). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (*civil society*) yang proaktif dan kolaboratif.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif untuk mencegah malpraktik dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu

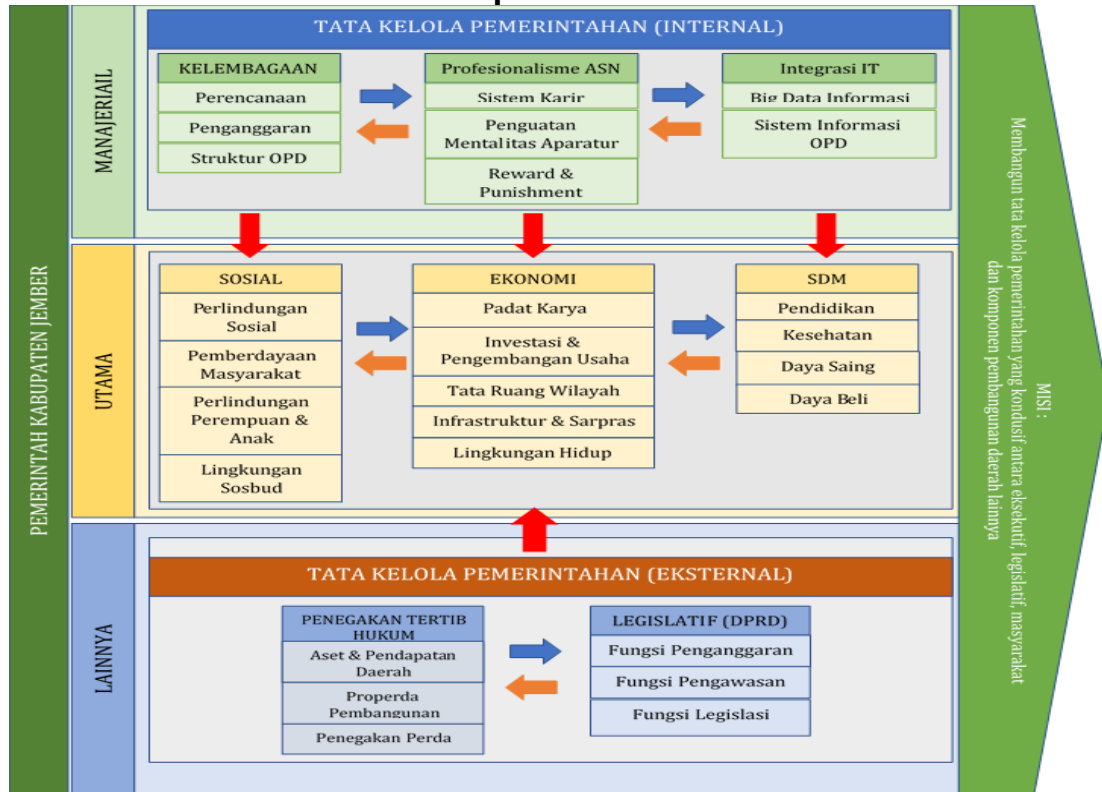


menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat; kualitas pelayanan publik yang handal, efektif, dan efisien; serta penerima manfaat pembangunan yang tepat sasaran.

Misi ini merupakan langkah untuk melaksanakan pemerintahan yang stabil tanpa konflik agar terwujud pelayanan publik yang responsif dan cepat. Komunikasi yang efektif dan efisien dibutuhkan agar program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah dapat dipadukan dengan partisipasi masyarakat luas melalui ormas maupun kelompok masyarakat sipil lainnya sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban umum. Upaya untuk memoderasi agama, menumbuhkan rasa kesatuan berbangsa, dan menghargai kemajemukan yang ada di masyarakat harus terus dilakukan dan disebarluaskan.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusif juga dicerminkan oleh hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif serta pemangku kepentingan lainnya. prinsip sinergi yang diusung dalam RPJMD ini mengharuskan terciptanya hubungan baik antara eksekutif dan legislatif mengacu pada kesesuaian persepsi, gagasan dan arah kebijakan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif melalui fungsi pengawasan nantinya dapat berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jember. Baik sinergi internal maupun eksternal harus didorong untuk arah tujuan dalam meningkatkan pelayanan publik yang partisipatoris, akuntabel, efektif dan efisien. Sinergitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember dapat digambarkan dalam peta bisnis Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai keberhasilan Misi 2 ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Bisnis Pemerintah Daerah, dapat digambarkan sinergitas pencapaian Misi 2 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Peta Bisnis Sinergisitas Eksekutif dan Legislatif Pemerintahan
Kabupaten Jember



Pada Gambar 1.2. di atas, dijelaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Peran legislatif dalam misi ini adalah dengan mengoptimalkan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi yang berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember kedepan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen penting untuk mereaktualisasikan perannya dalam memperkuat pembangunan daerah.

Kerja sama eksekutif dan legislatif sangat penting dilakukan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Kolaborasi ini dalam kaitannya dengan hubungan eksekutif dan legislatif pada ranah 3 fungsi legislatif yang memainkan perannya dalam peningkatan pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember.



Hubungan antara eksekutif dan legislatif secara realistis dapat dikembangkan dengan mengembangkan 3 (tiga) pola hubungan yang harus dilakukan. Ketiga hubungan itu adalah, *pertama*, bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi. *Kedua*, bentuk kerja sama atas beberapa subjek, program, masalah dan pengembangan regulasi. *Ketiga*, klarifikasi atas berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan. Harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam konteks tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah sedikit banyak ikut menentukan terciptanya situasi yang kondusif bagi keberhasilan program-program pembangunan daerah. Karena itu pola hubungan yang seimbang dan egaliter antara dua lembaga tersebut perlu terus menerus ditingkatkan sebagai upaya menjaga stabilitas politik di daerah. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (*no-one left behind*). Kemiskinan, baik oleh sebab struktural maupun sebab kultural, ditanggulangi melalui pendekatan berbasis keluarga atau rumah tangga. Kepala keluarga berpenghasilan rendah atau di bawah garis kemiskinan diberikan keterampilan kerja tambahan agar mampu mencari tambahan penghasilan di luar waktu kerjanya. Ibu rumah tangga dan perempuan kepala rumah tangga diberikan pelatihan kerja, akses permodalan dan pasar, serta pendampingan manajemen usaha agar mampu membantu atau menambah penghasilan keluarga.



Anak-anak yang telah berusia kerja tapi menganggur atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) diberikan pelatihan kerja melalui balai latihan kerja, disediakan informasi bursa kerja, dilibatkan dalam kegiatan padat karya, atau diberikan akses menjadi wirausaha. Anak-anak yang masih sekolah diberikan beasiswa siswa miskin.

Masyarakat yang secara kultural terpinggirkan dalam lapangan kerja, seperti perempuan dan masyarakat berkebutuhan khusus, harus diberikan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (*decent works*). Pelibatan kelompok utama dalam masyarakat, seperti pondok pesantren dan majelis taklim, dapat meningkatkan efektifitas upaya dan pelebagaan penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember menjadi salah satu fokus RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026. Agenda besar pemerintah daerah adalah mendorong pemerataan kesejahteraan di setiap wilayah sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu, proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan keluarahan, khususnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan, harus diintegrasikan dan diselaraskan dengan perencanaan di tingkat kabupaten. Data penduduk dan keluarga miskin harus dikumpulkan sampai tingkat administrasi wilayah paling rendah menurut nama dan alamat (*by name, by address*). Akses penduduk terhadap berbagai alternatif sumber pangan bergizi dan terjangkau selain beras harus ditingkatkan dan dikendalikan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Untuk itu, Misi 3 ini sejalan dengan pilar pembangunan sosial dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Di dalam pilar pembangunan sosial, kaitannya dengan Misi 3 ini adalah (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesenjangan Gender.



Tujuan akhir dari Misi ini adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Masuknya investasi diharapkan dapat memanfaatkan dan mengelola kekayaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember dan sekaligus dapat membuka lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja lokal, dan menurunkan angka pengangguran. Investasi juga diharapkan mampu mengungkit kapasitas ekonomi Kabupaten Jember untuk menambah alternatif sumber pendapatan asli daerah dan membuka akses pembiayaan di luar APBD bagi program-program unggulan.

Untuk menjamin keberlangsungan (*sustainability*) usaha dan kehidupan di sekitarnya, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Jember harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memberikan akses yang luas bagi pelaku usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat Jember.

Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum. Iklim kemudahan berusaha harus mampu mendorong tumbuh suburnya pendirian usaha mikro dan kecil dari masyarakat Jember yang selanjutnya dapat diorganisir dalam lembaga usaha koperasi. Pengorganisasian kelompok usaha harus



didorong sampai pada tingkat masyarakat akar rumput, termasuk di pesantren-pesantren.

5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember. Kualitas SDM, terutama pada jenjang penduduk usia 5-18 tahun, sangat penting di masa 7-20 tahun mendatang untuk menopang bonus demografi yang berkualitas dan mencapai surplus rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan ditujukan sebagai upaya meningkatkan akses penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini yang memadai dan menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun maupun pendidikan nonformal sehingga angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Tantangan proses belajar-mengajar secara daring (*online*) selama pandemi Covid 19 harus menjadi momentum untuk melakukan terobosan meningkatkan angka partisipasi sekolah yang belum optimal akibat keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana sekolah. Peningkatan pada pendidikan yang lebih berkualitas juga perlu memperhatikan dan melibatkan keberadaan pendidikan madrasah diniyah yang jumlahnya cukup besar di Kabupaten Jember sehingga cukup signifikan mempengaruhi capaian angka partisipasi sekolah.

Peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan secara umum ditujukan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) melalui penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan jumlah *stunting* pada anak, disamping kematian yang disebabkan oleh



penyakit. Kualitas kesehatan masyarakat secara umum harus terus ditingkatkan melalui pembinaan keluarga, terutama pada perempuan sejak saat penetapan usia perkawinan dengan mencegah perkawinan dini, pemeriksaan kesehatan selama masa kehamilan, penanganan kesehatan selama persalinan, dan pendampingan kesehatan anak saat balita.

Kesadaran pada pola hidup bersih dan sehat (PHBS) harus disosialisasikan secara berkelanjutan sampai tingkat komunitas terkecil dan keluarga, seperti kelompok dasa wisma, sekolah, pesantren, atau majelis taklim. Keberadaan fasilitas, layanan, dan tenaga kesehatan yang disediakan sampai tingkat desa, seperti posyandu dan bidan desa harus diperkuat untuk mendekatkan akses masyarakat pada layanan kesehatan yang berkualitas.

Tantangan pandemi Covid 19 yang masih terus menunjukkan kecenderungan naik pada jumlah penduduk yang terpapar harus terus dikendalikan dengan menjaga ketertiban umum melalui penerapan pembatasan sosial dan mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan. Upaya awal dengan melakukan vaksinasi masal harus segera dilaksanakan agar segera tercapai kekebalan komunitas (*herd immunity*). Kekebalan komunitas menjadi prasyarat utama agar program-program pembangunan yang lain yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara normal.

6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan



pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Konektivitas ekonomi yang merata melalui pembangunan dan penyelenggaraan jalan dapat membuka akses dan meningkatkan mobilitas antar desa dan wilayah yang ada di Kabupaten Jember sehingga dapat memacu kegiatan ekonomi masyarakat di dan antar wilayah, baik antar wilayah utara-selatan, perkotaan-perdesaan, maupun pesisir-pegunungan.

Pemerataan infrastruktur publik, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi, dapat digunakan sebagai upaya mitigasi bencana melalui penyediaan dan penetapan tempat penyelamatan (*safe haven*) saat kejadian bencana dan jalur-jalur evakuasi yang aman, jelas, dan mudah untuk digunakan sehingga kerugian material, korban jiwa, kerusakan sosial, dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau bahkan dihindari.

Penyediaan infrastruktur publik yang merata harus memperhatikan dan mencakup penyediaan akses yang lebih mudah pada ekosistem lingkungan sekitarnya seperti rumah layak huni, air bersih, sanitasi yang baik, pengelolaan persampahan yang efektif, dan perbaikan kualitas wilayah kumuh (*upgrading slum ares*), tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di wilayah perdesaan.

7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan



kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Pengembangan Kategori pariwisata memiliki peran yang strategis dalam membangkitkan potensi ekonomi sektor-sektor yang lain dan usaha kecil menengah (UKM), seperti jasa penginapan, kuliner khas daerah, souvenir khas daerah, *fashion*, transportasi, maupun jasa pemandu wisata (*tour guide*). Rantai nilai ekonomi Kategori pariwisata yang panjang diharapkan dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Jember, dan pada akhirnya meningkatkan kontribusi Kategori pariwisata pada pendapatan asli daerah dan PDRB.

Pengembangan pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal dan budaya daerah juga dapat memberikan penguatan pengetahuan pada masyarakat daerah, terutama generasi muda, tentang nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah yang unggul dan luhur di Kabupaten Jember. *Event* olahraga dapat diintegrasikan ke dalam wisata alam seperti lari maraton Jember 10K atau balap sepeda Tour de Jember.

Pengetahuan tentang berbagai nilai unggul dan luhur dari kearifan lokal yang diinternalisasi dengan baik dapat membangkitkan rasa bangga menjadi warga Jember yang selanjutnya dapat dikonversi menjadi energi dan modal sosial (*social capital*) dalam pembangunan daerah. Modal sosial ini akan menjadi energi positif bagi upaya membangun citra daerah (*city branding*) Kabupaten Jember. Masyarakat Jember yang bangga dengan kearifan lokal dan kondisi daerahnya akan menjadi pemasar aktif bagi industri pariwisata di daerah Jember melalui berbagai media sosial secara sukarela.

Disamping nilai-nilai luhur kearifan lokal, nilai-nilai keagamaan yang kuat dan moderat, khususnya Islam, dalam masyarakat Jember harus semakin dikembangkan untuk menjaga sikap toleransi, semangat kebangsaan, dan pemahaman Islam yang rahmatan lilalamin. Upaya



yang efektif dalam pencegahan paham radikalisme beragama dapat dilakukan dengan melibatkan madrasah diniyah di lingkungan pendidikan, majelis taklim di lingkungan masyarakat, dan pondok-pondok pesantren.

Pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki Jember menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Potensi pariwisata dapat dikembangkan melalui beberapa kebijakan yang akan mendongkrak Kategori pariwisata sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti pengembangan inovasi dan produk unggulan Kategori pariwisata, peningkatan infrastruktur pariwisata, penguatan kerjasama dengan pihak ketiga, promosi wisata melalui kebijakan *heritage tourism*. Potensi pariwisata yang dimiliki Jember mengedepankan aspek pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi daya tarik wisatawan.

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program- program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dalam konetks ini melingkupi perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian



visi dan misi pembangunan daerah dan perencanaan operasional berupa perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Adapun arah kebijakan merupakan acuan untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap periode waktunya. Penetapan arah kebijakan menjadi fokus yang sesuai dengan pengaturan pada level pelaksanaannya. Sesuai dengan agenda pembangunan tersebut, arah kebijakan dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi di setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Jember
2021-2026

Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.	
<i>Wis wayahe Jember Industrial Farming,</i> dengan: - Mengembangkan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan industri pengolahan; - Meningkatkan fasilitasi dan memberikan kemudahan perijinan pendirian industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan; - Memberikan fasilitasi dan kemudahan perijinan usaha perdagangan pada hasil	Mengintegrasikan kegiatan hulu (<i>on-farm</i>) dengan kegiatan hilir (<i>off-farm</i>) untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang lebih tinggi.



Strategi	Arah Kebijakan
olahan produk pertanian dan perikanan berbasis risiko; - Merevitalisasi fungsi gudang rabat untuk meningkatkan harga jual hasil pertanian dan perikanan; dan - Mengembangkan akses pasar pada hasil olahan produk pertanian dan perikanan, termasuk membuat nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>, MoU) dengan instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya dan perjanjian kerjasama (PKS). <i>Wis wayahe Jember Industrial Farming</i>, dengan: - Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pertanian; - Menjaga ketersediaan pupuk secara mandiri; - Meningkatkan produktifitas hasil pertanian; - Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana perikanan budidaya maupun tangkap, seperti pengadaan <i>coldstorage</i> atau pembangunan pabrik pengalengan ikan; - Meningkatkan produktifitas hasil perikanan, seperti melalui program 1 keluarga 1 kolam ikan.	
Misi 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
<i>Wis wayahe Pelayanan Jember Handal</i>, dengan: - Meningkatkan kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan; - Memberikan nomor identitas setiap penduduk melalui KTP NIK nasional; - Memberikan kartu keluarga pada setiap keluarga; - Memberikan akte pada setiap kelahiran dan pernikahan; - Memfasilitasi dan memantau penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran kepuasan masyarakat; - Melaksanakan penataan organisasi melalui penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, proses bisnis, dan SOP berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku, termasuk melakukan: • Penyederhanaan struktur organisasi seperti diatur dalam Peraturan Menteri	Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi dengan pada area: - Manajemen Perubahan; - Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Penataan dan Penguatan Organisasi; - Penataan Tata Laksana; - Penataan SDM Aparatur; - Penguatan Pengawasan Internal; - Penguatan Akuntabilitas Kinerja; - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.



Strategi	Arah Kebijakan
PANRB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; • Penataan organisasi dan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menurut Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan • Pembentukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; - Menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat; - Memfasilitasi penyusunan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah; - Meningkatkan kualitas ketepatan dan penyaluran hibah dan bantuan sosial bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan; - Meningkatkan kualitas komunikasi dan pelibatan DPRD dalam pengawasan, pembentukan dan penetapan peraturan daerah, maupun dalam menyusun dan menetapkan anggaran yang efektif dan efisien bagi pembangunan daerah; - Membina berbagai organisasi masyarakat untuk menguatkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat melalui pelibatan pesantren, sekolah diniyah, dan majelis taklim (<i>Wis wayahe Pesantren Berdaya</i>); - Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah dalam penerapan manajemen risiko pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk mencegah kesalahan dan/atau penyalahgunaan prosedur; - Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan; - Mengembangkan dokumen perencanaan yang berkualitas; - Mengembangkan dan menerapkan hasil litbang untuk inovasi proses penyelenggaraan pemerintahan; - Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang aman dan <i>proper</i>	



Strategi	Arah Kebijakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Memperbaiki pengelolaan seluruh aset atau barang milik daerah; - Mengembangkan ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak daerah;	
<i>Wis wayahe</i> Jember Satu Data, dengan: - Memfasilitasi terbentuknya basis data pembangunan yang akurat dan tidak tumpang tindih; - Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi pelayanan publik secara elektronik (<i>e-government</i>); - Membangun Jember <i>Media Centre</i>; - Membangun sistem penilaian kinerja perangkat daerah dan ASN Aparatur berbasis elektronik untuk mendukung pengembangan SDM berbasis kinerja (<i>merit system</i>); - Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi SDM Aparatur untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan.	Pemusatan data pembangunan dalam sistem basis data elektronik untuk menjamin keakuratan dan validitas data, dan pemanfaatannya bagi proses perencanaan dan pemantauan pencapaian pembangunan daerah.
Misi 3: Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.	
<i>Wis wayahe</i> Gerakan Desa Jember Berdaya (Gerda Jaya), dengan: - Melakukan pendataan keluarga, warga miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) <i>by name, by address</i> secara partisipatif dan transparan pada tingkat desa untuk mendukung data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); - Membangun pangkalan data kemiskinan dan program intervensinya; - Memberikan bantuan sosial pada PMKS dan warga miskin dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat maupun perguruan tinggi; - Meningkatkan fasilitasi penataan dan pembangunan desa melalui pengembangan BUMDes dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa secara elektronik (<i>smart villages</i>); - Memfasilitasi pemberdayaan desa untuk menjadi desa mandiri dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa. - Mengembangkan alternatif sumber pangan bergizi yang terjangkau bagi seluruh	Mengidentifikasi data penduduk dan keluarga miskin <i>by nama by address</i> sampai tingkat desa untuk menjamin keakuratan penerima bantuan, ketepatan intervensi program, dan jenis pelibatan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.



Strategi	Arah Kebijakan
masyarakat, terutama warga miskin, untuk meningkatkan skor pola pangan harapan.	
Misi 4: Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari	
<i>Wis wayahe</i> Jember Tumbuh, dengan: - Meningkatkan kualitas dan kemudahan perijinan berusaha (<i>ease-of-doing-business</i>) berbasis risiko bagi calon investor dalam negeri maupun luar negeri; - Mensertifikasi pasar-pasar daerah; - Merevitalisasi atau membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) baru; - Memfasilitasi lahirnya wirausaha baru dan bertumbuhkembangnya usaha mikro dan kecil berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, terutama di pesantren-pesantren melalui strategi <i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya; - Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya koperasi bagi pengembangan usaha kecil dan mikro, terutama di kelompok dominasi pesantren - Membina dan memberikan bimbingan teknis pada usaha kecil/mikro dan koperasi agar tumbuh sehat; - Memberikan latihan kerja pada pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi; - Membuka kerjasama penempatan kerja dengan usaha/industri melalui <i>job fair</i>; - Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas air; - Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas udara; - Optimalisasi penyediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perijinan berusaha berbasis risiko dengan tetap mengutamakan keterlibatan usaha kecil, mikro, dan koperasi; kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal; serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup.
Misi 5: Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi	
<i>Wis wayahe</i> SDM Jember Unggul, dengan: - Memperluas akses pendidikan melalui pembangunan prasarana ruang kelas baru atau unit sekolah baru untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, termasuk program kesetaraan dan sekolah inklusif; - Memperluas akses beasiswa bagi siswa sekolah menengah dan mahasiswa untuk meningkatkan harapan lama sekolah; - Meningkatkan kualitas sarana dan fasilitas sekolah; - Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk memperbaiki kesejahteraan GTT dan PTT serta pengadaan Guru Pendamping Khusus; dan	Mendorong dan menciptakan akses seluas-luasnya pada pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jember tanpa terkecuali, terutama perempuan, anak-anak, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.



Strategi	Arah Kebijakan
- Memperluas hibah dan bantuan sosial pendidikan ke pesantren atau sekolah diniyah (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya); - Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, termasuk merevitalisasi RSUD atau membangun Jember Healthy Centre; - Melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, terutama pesantren dan majelis taklim (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya); - Meningkatkan kesadaran pencegahan pernikahan dini; - Meningkatkan kesadaran pengaturan jarak kelahiran; - Meningkatkan kualitas dan sarana pelayanan pemeriksaan ibu hamil; - Meningkatkan kualitas layanan dan penanganan persalinan; - Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi balita (Gerakan Masyarakat Jember Peduli Ibu dan Balita atau Gemar Jelita); - Meningkatkan kualitas penanganan pencegahan penyakit menular dan tidak menular; - Meningkatkan kualitas penanganan orang dalam gangguan jiwa; - Meningkatkan implementasi kebijakan responsif gender; - Meningkatkan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak; dan - Mengendalikan laju angka pertumbuhan penduduk; - Meningkatkan kualitas perpustakaan daerah dan pengelolaannya; - Meningkatkan kompetensi tenaga pustakawan melalui diklat perpustakaan;	
Misi 6: Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember	
<i>Wis wayahe</i> Infrastruktur Jember Mantab, dengan: - Meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan jalan (dan jembatan) kabupaten untuk membangun konektivitas ekonomi antar wilayah, seperti pembangunan Jember Outer Ring Roads (JORR) dan pengembangan pemanfaatan Jember Sport Garden (JSG); - Meningkatkan kualitas dan ketersediaan drainase; - Memperluas ketersediaan fasilitas penerangan jalan umum; - Meningkatkan kualitas dan luas jaringan irigasi;	Menyelenggarakan pembangunan yang berkualitas, yang menyeimbangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan melalui pembangunan konektivitas ekonomi antar wilayah sehingga dapat mengeliminasi ketimpangan pembangunan.



Strategi	Arah Kebijakan
- Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang; - Meningkatkan akses masyarakat pada rumah layak huni; - <i>Upgrading</i> wilayah kumuh; - Optimalisasi pengelolaan air limbah; - Memperluas akses air bersih dan air layak minum bagi masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan; - Meningkatkan rasio elektrifikasi yang merata di seluruh desa. - Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, termasuk pembangunan dermaga dan peningkatan kelas bandara; - Optimalisasi sarana angkutan umum; - Penertiban lalu lintas melalui ketersediaan dokumen dan uji kir; - Menyediakan prasarana mitigasi bencana seperti jalur evakuasi dan lokasi penyelamatan (<i>safe heaven</i>); - Meningkatkan kesadaran kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana; - Meningkatkan kualitas SDM penanggulangan bencana;	
Misi 7: Pengembangan Potensi Pariwisata dengan Mengedepankan Kearifan Lokal dan Pelestarian Budaya	
<i>Wis wayahe</i> Jember Permata Jawa dengan: - Mengembangkan destinasi wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata religius; - Mengembangkan kompetensi SDM Pariwisata; - Membangun identitas Kabupaten Jember dengan mengembangkan <i>city branding</i>; - Meningkatkan promosi pariwisata; - Meningkatkan peran Dewan Kebudayaan Jember (DKJ) dalam pengembangan/pemberdayaan <i>heritage tourism</i>; - Merevitalisasi obyek cagar budaya dan kearifan budaya lokal; - Membina organisasi kepemudaan untuk aktif mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan teknologi melalui Jember Creative Centre; - Mengintegrasikan kegiatan kepemudaan dan olahraga untuk menunjang pariwisata, seperti Jember 10K, Tour de Jember, atau <i>sport event</i> yang memanfaatkan Jember Sport Garden (JSG).	Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang memiliki rantai ekonomi panjang, sehingga melibatkan lebih banyak masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan alam, budaya, sejarah, dan kearifan lokal lainnya.



PROGRAM UNGGULAN BUPATI & WAKIL BUPATI JEMBER





1.4 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Jember periode tahun 2021-2026. Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”, maka disusun 9 (sembilan) Strategi Unggulan yang merupakan komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2021-2026.

1. Wes Wayahe Jember Satu Data.
 - a. Jember satu Data
 - b. Digitalisasi pelayanan publik
 - c. Jember media center
2. Wes Wayahe SDM Jember Unggul
 - a. PENDIDIKAN
 - 1) Perbaikan kesejahteraan GTT dan PTT Beasiswa
 - 2) Sekolah inklusi
 - 3) Guru pendamping khusus
 - b. KESEHATAN
Gemar Jelita, Jember Bangga, Jember Safety Center, Revitalisas RSUD
 - c. KESEJAHTERAAN
Kemiskinan dan Pengangguran
3. Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantab
 - a. Jember Outer Ring Road (JORR)
 - b. Transportasi Interkonektivitas wilayah
 - c. Pembangunan Dermaga dan Peningkatan Kelas Bandara



- d. Optimalisasi JSG
- e. Lingkungan Hidup Lestari dan Pengelolaan Persampahan
- 4. Wes Wayahe Jember *Industrial Farming*
 - a. Satu Keluarga Satu Kolam (2SK)
 - b. Mandiri Pupuk
 - c. Coldstorage dan Pabrik Pengalengan Ikan
 - d. Modernisasi Alat Tangkap
 - e. Integrasi Produk Pertanian dan UMKM
- 5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
 - a. Wirausahawan Pesantren
 - b. Koperasi Pesantren
 - c. Festival Inovasi dan Kepeloporan Santri
- 6. Wes Wayahe Gerda Jaya
 - a. Aplikasi Informatika *Smart Village*
 - b. Sinergi Pemdes dengan arah kebijakan Pemkab
 - c. BUMDes untuk Desa Maju dan Mandiri
- 7. Wes Wayahe Jember Tumbuh
 - a. Revitalisasi Koperasi dan UMKM
 - b. Revitalisasi Perusahaan Daerah
 - c. Sertifikasi Pasar
- 8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
 - a. Jember Creative Center
 - b. Pembukaan dan Pengembangan Destinasi Wisata
 - c. Pembangunan Gedung Seni Budaya
 - d. Promosi dan Pemasaran Budaya, Seni dan Pariwisata
- 9. Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal
 - a. Penataan Birokrasi
 - b. Pengembangan Pusat Pemerintahan dan Perkantoran
 - c. Respon Cepat Pengaduan Pelayanan Publik
 - d. Pelayanan Investasi yang terintegrasi



Selanjutnya, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program, wajib menjamin keseimbangan anggaran berdasarkan 3 prioritas yakni:

1. Prioritas Pertama (P1) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas Kedua (P2) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
3. Prioritas Ketiga (P3) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berikutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Urgensi lain adalah karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji- janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program wajib menjamin keseimbangan empat perspektif



balanced scorecard. Keempat persepektif tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Perspektif masyarakat/layanan adalah perspektif yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Perspektif proses internal adalah perspektif bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Perspektif kelembagaan yaitu perspektif yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Perspektif keuangan yaitu perspektif yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.



1.5 Gambaran Umum Daerah

1.5.1 Kondisi Geografis

A. Letak dan kondisi Geografis

Kabupaten Jember secara geografis berada pada posisi 113°15'47" sampai 114°02'35" Bujur Timur dan 7°58'06" sampai 8°33'44" Lintang Selatan. Berdasarkan dokumen Kabupaten BPS Kab. Jember, Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Wilayah Kabupaten Jember terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah dengan rentang ketinggian berkisar antara 0-500 mdpl.

Kabupaten Jember secara administratif merupakan bagian timur dari Provinsi Jawa Timur dan terletak ±200 km dari arah timur Kota Surabaya. Secara administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu:

Batas Utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
 Batas Barat : Kabupaten Lumajang
 Batas Timur : Kabupaten Banyuwangi
 Batas Selatan : Samudera Indonesia

Tabel 1.2

Pulau-pulau Kecil atau Kepulauan yang Memiliki Nama

No	Nama Pulau	Perkiraan Luas (Ha)	Beberapa Penggunaan Tanah Utama	Fungsi Kawasan	Keberadaan Tempat Penting
1	Nusa Barong	7.482,00	Hutan	Suaka Alam	-
2	Gilen	6,25	Semak Belukar / Rumput	Suaka Alam	-
3	Leande/ Bt. Mandi	1,87	Semak Belukar / Rumput	Suaka Alam	-
4	Endokdokan	3,75	Semak Belukar / Rumput	-	-
5	Watuajir	0,89	Batu karang / Rumput	-	-
6	Matikan	7,50	Semak Belukar / Rumput	-	-



No	Nama Pulau	Perkiraan Luas (Ha)	Beberapa Penggunaan Tanah Utama	Fungsi Kawasan	Keberadaan Tempat Penting
7	Sraja	16,25	Semak Belukar / Rumput	-	-
8	Meran	6,78	Semak Belukar / Rumput	-	-
9	Moestaka	29,89	Semak Belukar / Rumput	-	-
10	Loe Toeng	42,26	Semak Belukar / Rumput	-	-
11	Karang Bolong	28,98	Semak Belukar / Rumput	-	-
12	Watoepager	1,25	Semak Belukar / Rumput	-	-
13	Pisang	3,91	Semak Belukar / Rumput	-	-
14	Bandealit	33,94	Semak Belukar / Rumput	-	-
15	Singa	11,24	Semak Belukar / Rumput	-	-
16	Merue	8,75	Semak Belukar / Rumput	-	-

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022)

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 Km², dengan panjang pantai lebih kurang 170 Km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kurang lebih 8.338,5 Km². Secara garis besar bagian timur Kabupaten Jember merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Bagian barat laut terdapat Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088m). Bagian selatan wilayah adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong, pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Terdapat sekitar 67 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama dan 51 pulau lainnya yang belum memiliki nama.

Wilayah administrasi Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan, 248 desa/kelurahan, dan 969 dusun. Kecamatan Kaliwates memiliki luas wilayah



terkecil yaitu 24,94 km² atau sebesar 0,77% sedangkan Kecamatan Tempurejo merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jember dengan luas wilayah sebesar 524,46 km² atau sebesar 16,24%. Jumlah desa/kelurahan terbanyak dalam satu kecamatan terdapat pada Kecamatan Puger, Kalisat, dan Sukowono, yaitu sebanyak 12 desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Kencong dan Sukorambi dengan jumlah masing-masing sebanyak 5 desa/kelurahan.

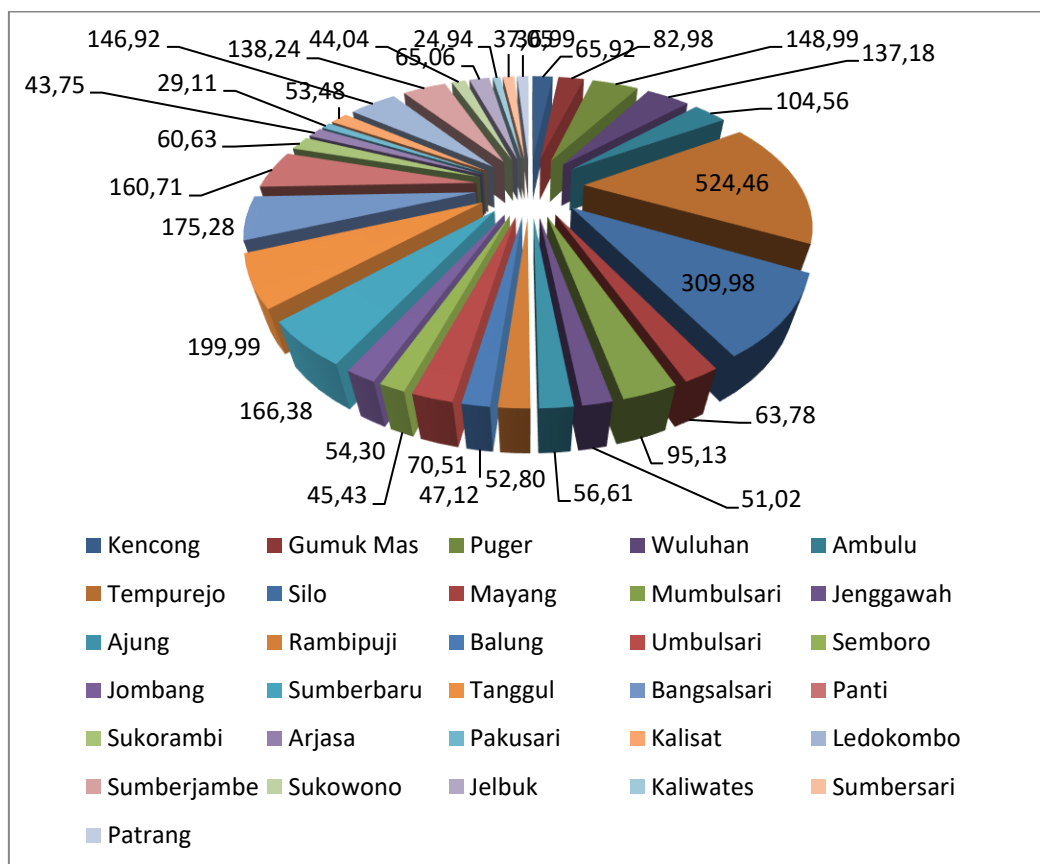
Tabel 1.3
Luas Kecamatan Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Dusun/Lingkungan
Kabupaten Jember

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kencong	5	24	43,15	65,92	1,85
2.	Gumukmas	8	24	35,34	82,98	2,82
3.	Puger	12	37	29,23	148,99	4,84
4.	Wuluhan	7	25	25,50	137,18	3,89
5.	Ambulu	7	27	22,17	104,56	3,53
6.	Tempurejo	8	29	24,35	524,46	16,24
7.	Silo	9	41	17,44	309,98	9,76
8.	Mayang	7	24	10,76	63,78	1,74
9.	Mumbulsari	7	26	10,83	95,13	2,6
10.	Jenggawah	8	36	12,37	51,02	1,7
11.	Ajung	7	35	9,11	56,61	1,82
12.	Rambipuji	8	42	11,21	52,80	1,65
13.	Balung	8	27	22,00	47,12	1,51
14.	Umbulsari	10	28	29,70	70,52	2,18
15.	Semboro	6	14	28,73	45,43	1,44
16.	Jombang	6	17	41,30	54,30	1,68
17.	Sumberbaru	10	36	34,77	166,37	4,78
18.	Tanggul	8	24	27,61	199,99	6,05
19.	Bangsalsari	11	41	18,58	175,28	4,82
20.	Panti	7	29	7,51	160,71	5,5
21.	Sukorambi	5	16	4,27	60,63	1,37
22.	Arjasa	6	26	7,20	43,75	1,06
23.	Pakusari	7	26	6,39	29,11	0,92
24.	Kalisat	12	48	12,72	53,48	1,59
25.	Ledokombo	10	39	24,05	146,92	3,99
26.	Sumberjambe	9	58	18,12	138,24	3,93
27.	Sukowono	12	27	19,25	44,04	1,52
28.	Jelbuk	6	40	14,00	65,06	2,2

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Luas (Km ²)	Persentase (%)
29.	Kaliwates	7	32	3,10	24,94	0,77
30.	Sumbersari	7	33	1,75	37,05	1,1
31.	Patrang	8	38	2,46	36,99	1,13
Jumlah		248	969		3.293,34	100

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023)

Gambar 1.3
Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Jember Menurut Kecamatan



Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023)

B. Topografi

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0 – 3.300 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian daerah perkotaan Jember lebih kurang 87 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian antara 101 hingga 500 meter di atas permukaan laut



(37,75%), selebihnya 17,95% pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 26 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian 501 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut, 6,85% pada ketinggian 1.001 m sampai dengan 2.500 m dan 0,95% pada ketinggian lebih dari 2.500 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0 – 25 meter dpl. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpl.

Tabel 1.4
Ketinggian Wilayah Kabupaten Jember

No.	Ketinggian	Luas	
		Km ²	%
1	0 – 25 meter	591,2	17,95
2	26 – 100 meter	681,68	20,70
3	101 – 500 meter	1243,08	37,75
4	501 – 1000 meter	520,43	15,80
5	1001 – 2500 meter	225,62	6,85
6	> 2.500 meter	31,33	0,95
	Jumlah	3293,34	100

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023 (data diolah))

Tabel 1.5
Luas Wilayah (km²) Kecamatan Menurut Ketinggian Tempat

No	Kecamatan	Ketinggian Tempat (mdpl)						Jumlah Luas Wilayah (km ²)
		0-25	25-100	100-500	500-1000	1000-2005	>2005	
1	Kencong	65,92	-	-	-	-	-	65,92
2	Gumuk Mas	81,47	1,16	0,34	0,01	-	-	82,98
3	Puger	81,8	45,7	21,49	-	-	-	148,99
4	Wuluhan	87,18	25	25	-	-	-	137,18
5	Ambulu	56,51	38,28	9,77	-	-	-	104,56
6	Tempurejo	17,97	178,12	240,48	85,94	1,95	-	524,46
7	Silo	-	0,39	167,79	137,87	3,93	-	309,98
8	Mayang	-	1,76	60,07	1,95	-	-	63,78
9	Mumbulsari	-	35,94	52,94	6,25	-	-	95,13
10	Jenggawah	-	50,7	0,3	0,02	-	-	51,02



No	Kecamatan	Ketinggian Tempat (mdpl)						Jumlah Luas Wilayah (km ²)
		0-25	25-100	100-500	500-1000	1000-2005	>2005	
11	Ajung	-	56,61	-	-	-	-	56,61
12	Rambipuji	-	52,8	-	-	-	-	52,8
13	Balung	25,84	17,97	3,31	-	-	-	47,12
14	Umbulsari	64,46	6,05	-	-	-	-	70,51
15	Semboro	17,93	19,6	7,9	-	-	-	45,43
16	Jombang	54,3	-	-	-	-	-	54,3
17	Sumberbaru	24,1	31,64	75,67	15,55	19,42	-	166,38
18	Tanggul	7,08	40,54	64,88	42,19	45,16	0,14	199,99
19	Bangsalsari	6,64	52,15	61,8	17,97	27,34	9,38	175,28
20	Panti	-	7,81	50,78	28,12	61,02	12,98	160,71
21	Sukorambi	-	11,72	24,17	19,27	5,47	-	60,63
22	Arjasa	-	-	33,53	9,67	0,55	-	43,75
23	Pakusari	-	-	29,11	-	-	-	29,11
24	Kalisat	-	-	53,48	-	-	-	53,48
25	Ledokombo	-	-	72,06	44,55	25	5,31	146,92
26	Sumberjambe	-	-	49,96	62,11	23,05	3,12	138,24
27	Sukowono	-	-	44,04	-	-	-	44,04
28	Jelbuk	-	-	32,64	19,29	12,73	0,4	65,06
29	Kaliwates	-	3,69	17,34	3,91	-	-	24,94
30	Sumbersari	-	0,36	11,72	24,97	-	-	37,05
31	Patrang	-	3,69	32,51	0,79	-	-	36,99
	Jumlah	591,20	681,68	1243,08	520,43	225,62	31,33	3293,34

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023)

Kabupaten Jember merupakan wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki bentang alam lengkap hal ini dikarenakan terdapat laut, pesisir, pegunungan, dan gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Kabupaten Jember memiliki 3 (tiga) jenis gumuk yang berbeda dari jenis batuan yang terkandung yaitu gumuk batu, gumuk batu piring dan gumuk pasir. Formasi gumuk ini memberikan beberapa manfaat bagi lingkungan sekitar mulai dari ekologi, iklim makro, pemecah angin hingga penyumbang oksigen bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan adanya gumuk, temperatur di sekitar gumuk menjadi relatif lebih dingin karena banyaknya jenis tanaman yang terdapat di gumuk sehingga menurunkan temperatur sekitar kawasan.

Jumlah gumuk di Kabupaten Jember sebanyak 1.670 buah yang sudah terinventarisir dan 285 buah belum terinventarisir. Keberadaan Gumuk tersebar di beberapa Kecamatan, antara lain: Kecamatan Arjasa, Summersari, Jelbuk, Sukowono, Kalisat, Pakusari, Ledokombo, Mayang dan Sumberjambe. Lima tahun terakhir jumlah gumuk mengalami penurunan dan kerusakan sampai 11%. Penurunan dan kerusakan gumuk terjadi karena peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan infrastruktur. Gumuk yang dieksploitasi terutama di wilayah Kecamatan Summersari. Eksploitasi tersebut bisa saja terus meningkat dan akan berdampak besar bagi kerusakan ekosistem makro di Kabupaten Jember.

Tabel 1.6
Kemiringan Lahan Kabupaten Jember

No.	Kelas Lereng	Luas	
		Km ²	%
1	Datar (0 – 2 ^o)	1205,47	36,60
2	Landai (2 – 15 ^o)	673,76	20,46
3	Agak curam (15 – 40 ^o)	384,04	11,66
4	Sangat Curam (> 40 ^o)	1030,07	31,28
	Jumlah	3293,34	100

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023 (data diolah))

Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0 – 2^o, sehingga daerah ini baik untuk kawasan kegiatan pertanian tanaman semusim. Untuk wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40^o menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihindarkan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 2 – 15^o menempati wilayah 20,46%, yang digunakan untuk usaha pertanian dengan memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15 – 40^o menempati



wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi, maka diperlukan usaha pengawetan tanah dan air.

Tabel 1.7
Luas Wilayah (km²) Kecamatan Menurut Klasifikasi Lereng

No	Kecamatan	Kemiringan				Jumlah Luas Wilayah (km ²)
		0-2°	2°-15°	15°- 40°	Di atas 40°	
1	Kencong	65,92	-	-	-	65,92
2	Gumuk Mas	81,56	-	0,75	0,67	82,98
3	Puger	68,6	0,94	24,12	55,34	149
4	Wuluhan	92,23	2,01	4,95	38	137,19
5	Ambulu	82,55	2,09	8,34	11,58	104,56
6	Tempurejo	84,63	33,22	41,13	365,48	524,46
7	Silo	-	89,06	76,81	144,12	309,99
8	Mayang	23,77	15,12	18,71	6,19	63,79
9	Mumbulsari	58,37	15,05	21,71	-	95,13
10	Jenggawah	48,55	2,01	-	0,46	51,02
11	Ajung	56,61	-	-	-	56,61
12	Rambipuji	51,58	1,22	-	-	52,8
13	Balung	47,12	-	-	-	47,12
14	Umbulsari	70,52	-	-	-	70,52
15	Semboro	43,71	1,72	-	-	45,43
16	Jombang	54,3	-	-	-	54,3
17	Sumberbaru	38,44	54,83	37,97	35,13	166,37
18	Tanggul	27,81	45,81	44,24	82,14	200
19	Bangsalsari	54,76	59,62	14,24	46,66	175,28
20	Panti	12,44	36,28	14,83	97,16	160,71
21	Sukorambi	12,94	24,29	2,97	20,43	60,63
22	Arjasa	5,63	13,03	6,98	18,11	43,75
23	Pakusari	26,84	2,27	-	-	29,11
24	Kalisat	8,31	45,03	0,15	-	53,49
25	Ledokombo	3,03	69,75	33,22	40,92	146,92
26	Sumberjambe	10,43	73,5	18,38	35,94	138,25
27	Sukowono	8,98	34,91	0,15	-	44,04
28	Jelbuk	1,02	24,61	9,32	30,11	65,06
29	Kaliwates	22,76	2,18	-	-	24,94
30	Sumbersari	37,05	-	-	-	37,05
31	Patrang	5,03	25,25	5,08	1,64	37
Jumlah		1.205,49	673,80	384,05	1.030,08	3.293,42

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023)

C. Geologi

Dataran wilayah Kota Jember banyak dibentuk oleh jenis tanah litosol dan regosol coklat kekuningan. Khusus untuk area gumuk jenis tanah



utamanya adalah regosol. Tekstur tanah di gumuk cenderung *sandy clay loam* yaitu tanah alluvial terdampak dari hasil pelapukan batuan vulkanik. Kondisi ini sangat menentukan tingkat kesuburan dan kedalaman efektif tanah, dimana tingkat kesuburan tersebut adalah berkisar di atas 90 cm.

D. Hidrologi

Kabupaten Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat. Kondisi hidrologi di Kota Jember sangat dipengaruhi oleh air permukaan tanah dangkal, sumber-sumber mata air dan aliran-aliran sungai yang melintasinya. Sungai yang melintasi Kota Jember adalah Sungai Bedadung.

E. Klimatologi

Karakteristik cuaca dan curah hujan di Kabupaten Jember menunjukkan pola musim penghujan dan musim kemarau tiap tahunnya. Musim kemarau terjadi di bulan April - September, sedangkan musim penghujan terjadi di bulan Januari - Maret dan Oktober - November. Sedangkan rata-rata curah hujan selama satu tahun di Kabupaten Jember yakni 153,47 mm Kelembapan rata-rata (*humidity average*) di Kabupaten Jember sebesar 80,02% dengan suhu rata-rata 27,06°C.

F. Penggunaan Lahan

Dominasi penggunaan lahan di wilayah Kota Jember adalah kegiatan pertanian yakni seluas 5.099,283 Ha atau 51,47% dari total luas wilayah kota. Kemudian berturut-turut adalah tanah tegalan seluas 1.477,9 Ha atau 14,92%, perumahan seluas 2.679,655 Ha atau 27,05%, kolam ikan seluas 1,0 Ha atau 0,01 % dan penggunaan tanah lain-lainnya seluas 416,415 Ha atau 4,20%.



G. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Tabel 1.8 menjelaskan secara detail distribusi luas lahan berdasarkan jenis kawasan budidaya.

Tabel 1.8
Kawasan Budidaya Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi		29.079	1) Kecamatan Puger; 2) Kecamatan Wuluhan; 3) Kecamatan Ambulu; 4) Kecamatan Silo; 5) Kecamatan Mayang; 6) Kecamatan Mumbulsari; 7) Kecamatan Rambipuji; 8) Kecamatan Sumberbaru; 9) Kecamatan Tanggul; 10) Kecamatan Bangsalsari; 11) Kecamatan Panti; 12) Kecamatan Arjasa; 13) Kecamatan Ledokombo; 14) Kecamatan Sumberjambe; 15) Kecamatan Jelbuk; dan 16) Kecamatan Tempurejo.
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat		91.108	Berada di seluruh kecamatan terdiri dari jenis tanaman Jati, Mahoni, Sonokeling, Sengon Laut, Gmelina, Mindi, Bayur, dan lain-lain
3	Kawasan Peruntukan Pertanian			
	Kawasan Pertanian Lahan Basah		86.598 Ha Sawah Beririgasi dan 81.081 Ha Lahan Pertanian Pangan	1) Sentra Padi tersebar di seluruh kecamatan. 2) Sentra Jagung tersebar di seluruh kecamatan; 3) Sentra Kedelai : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Balung; Kecamatan Jombang; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Puger; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Ajung; Kecamatan Kencong; Kecamatan Gumukmas; dan Kecamatan Tanggul. 4) Sentra Kacang Tanah : Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Tanggul; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Puger; Kecamatan Wuluhan 5) Sentra Ubi Jalar : Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sukowono 6) Sentra Ubi Kayu : Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Panti; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sukorambi
	Kawasan Pertanian Lahan Kering		33.037 Ha Lahan Kering dan 20.522 Ha lahan pertanian berkelanjutan	
	Kawasan Budidaya Holtikultura			1) Sentra Buah Salak : Kecamatan Gumukmas dan Kecamatan Semboro 2) Sentra Buah Manggis : Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Panti; kecamatan Sukorambi 3) Sentra Buah Durian : Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Jelbug; Kecamatan Pakusari; Kecamatan Panti; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Patrang; Kecamatan Mayang; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Sukorambi 4) Sentra buah Jeruk : Kecamatan Semboro; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Jombang; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Kencong 5) Sentra Buah Alpukat : Kecamatan Silo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Patrang 6) Sentra Buah Belimbing : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Ajung; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Semboro; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Kencong 7) Sentra Buah Duku/Langsar : Kecamatan Patrang; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; dan Kecamatan Panti.



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				8) Sentra Buah Rambutan tersebar di seluruh Kecamatan 9) Sentra buah Mangga : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Kencong; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Pakusari; dan Kecamatan Kalisat 10) Sentra Buah Nangka : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari 11) Sentra Buah Pisang : Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Kalisat; dan Kecamatan Patrang. 12) Sentra Cabe Rawit : Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Mayang; dan Kecamatan Pakusari. 13) Sentra Cabe Besar : Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Ajung; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Tempurejo 14) Sentra Kacang Panjang : Kecamatan AMbulu; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Ldeokombo 15) Sentra Tomat : Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Ajung; Kecamatan Panti; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Mayang 16) Sentra Semangka : Kecamatan Gumukmas dan Kecamatan Puger
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan		87.448,71	1) Sentra tembakau Kasturi: Kecamatan Kalisat; Kecamatan Pakusari; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumbersari; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Puger; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Balung; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Silo; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Kaliwates; dan Kecamatan Ajung.



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				2) Sentra tembakau Rajang: Kecamatan Arjasa; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Mumbulsari Kecamatan Puger; dan Kecamatan Sukowono. 3) Sentra tembakau White Burley: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Puger; Kecamatan Balung; Kecamatan Jenggawah; dan Kecamatan Mumbulsari. 4) Sentra tembakau na-oogst: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Balung; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Panti; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Puger; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sumbersari; Kecamatan Ajung; dan Kecamatan Mumbulsari. 5) Sentra tanaman kelapa berada di seluruh Kecamatan 6) Sentra tanaman kapuk berada di seluruh Kecamatan 7) Sentra tanaman lada: Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Silo; Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Jenggawah; dan Kecamatan Bangsalsari. 8) Sentra tanaman cengkeh: Kecamatan Silo; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Panti; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe, dan Kecamatan Sumberbaru. 9) Sentra tanaman karet: Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Silo; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; dan Kecamatan Sumberbaru. 10) Sentra tanaman kakao: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Panti; Kecamatan Silo; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Rambipuji; dan Kecamatan Mumbulsari. 11) Sentra tanaman kopi: Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Silo; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; Kecamatan



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Jelbuk; dan Kecamatan Sumberbaru. 12) Sentra tanaman teh berada Perkebunan Gunung Gambir Kecamatan Sumberbaru 13) Sentra tanaman tebu berada di seluruh Kecamatan
5	Kawasan Peruntukan Peternakan			1) Ternak sapi potong berada di seluruh kecamatan. 2) Ternak aspi perah: Kecamatan Arjasa; Kecamatan Silo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Puger; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Patrang; Kecamatan Kaliwates; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Sumberjambe; dan Kecamatan Balung 3) Ternak kuda: Kecamatan Kalisat; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Jombang; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Pakusari; dan Kecamatan Mayang. 4) Ternak kerbau: Kecamatan Jombang; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Puger; Kecamatan Semboro; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Ledokombo; dan Kecamatan Kencong.
6	Kawasan peruntukan perikanan			1) Kawasan budidaya kolam air tawar tersebar diseluruh kecamatan 2) Kawasan budidaya air payau meliputi: Kecamatan Puger; Kecamatan Ambulu; dan Kecamatan Gumukmas. 3) Kawasan minapadi meliputi: Kecamatan Silo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Sumberjambe; dan Kecamatan Ledokombo. 4) Pengembangan Pelabuhan perikanan pantai berada di Kecamatan Puger 5) Kawasan perikanan tangkap meliputi: Kecamatan Kencong; Kecamatan Puger; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Tempurejo; dan Kecamatan Gumukmas.
7	Kawasan peruntukan pariwisata			1) Daya Tarik Wisata Alam terdiri atas:



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				a) Pantai meliputi: 1. Pantai Watu Ulo, Pantai Seruni dan Pantai Payangan berada di Kecamatan Ambulu; 2. Pantai Papuma berada di Kecamatan Wuluhan; 3. Pantai Paseban berada di Kecamatan Kencong; 4. Pantai Pancer berada di Kecamatan Puger; 5. Pantai Bandelalit berada di Kecamatan Tempurejo; dan 6. Pantai Rowo Cangak berada di Kecamatan Tempurejo. b) Air terjun meliputi: 1. Air terjun Tancak berada di Kecamatan Panti; 2. Air terjun Manggis berada di Kecamatan Tanggul; dan 3. Air terjun lereng Raung berada di Kecamatan Sumberjambe. 2) Daya Tarik Wisata Budaya meliputi: a. Upacara Larung Saji berada di Kecamatan Puger, Kecamatan Kencong dan Kecamatan Ambulu; b. Tarian Lahbako berada di Kecamatan Patrang; c. Kuda Kencak berada di Kecamatan Tanggul; d. Egrang di Kecamatan Ledokombo; e. Can Macanan Kaduk, Ge jenggean (ta' butaan) dan Pencak Silat Seni di Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Jelbuk; f. Pegon, Reog dan Wayang di Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Wuluhan; g. Janger dan Jaranan di Kecamatan Mumbulsari; h. Makam Turba Condro berada di Kecamatan Kaliwates; i. Makam Habib Sholeh di Kecamatan Tanggul; j. Makam Kyai Umar di Kecamatan Sukowono; k. Petilasan Sembah Demang di Kecamatan Patrang; l. Tugu Mastrip I dan II berada di Kecamatan Jelbuk; m. Tugu Muhamad Sroedji di Kecamatan Mumbulsari; dan n. <i>Sarchopagus</i> berada di Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Arjasa. 3) Daya Tarik Wisata Buatan Manusia meliputi: a. Jember Fashion Carnaval di Kecamatan Sumbersari; b. Taman rekreasi Oleng Sibutong berada di Kecamatan Arjasa c. Pemandian Patemon berada di Kecamatan Tanggul; d. Pemandian Kebonagung berada di Kecamatan Kaliwates; e. Pemandian Niagara Waterpark dan Pontang Jaya berada di



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Kecamatan Ambulu; f. Pemandian Tiara Waterpark di kecamatan Sumbersari; g. Wisata Agro Glantangan di Kecamatan Tempurejo; h. Wisata Agro Puslit Kopi dan Kakao di Kecamatan Rambipuji; i. Wisata Agro Gunung Gunitir di Kecamatan Silo; j. Wisata Agro Mumbul Garden di Kecamatan Mumbulsari; k. Rest Area Jubung (di area Perhutani) di Kecamatan Sukorambi; l. Taman Botani Sukorambi di Kecamatan Sukorambi; m. Wisata Agro Kebun teh Gunung Gambir di Kecamatan Sumberbaru; n. Wisata Agro Gunung Pasang di Kecamatan Panti; o. Wisata Rembangan dan Perkebunan Rayap berada di Kecamatan Arjasa; p. Lapangan Golf Glantangan berada di Kecamatan Tempurejo. q. Agro wisata dan loko tour Garahan - silo berada di Kecamatan Silo; dan r. Jember Sport Garden berada di Kecamatan Ajung.
8	Kawasan Peruntukan Industri			1) Kawasan peruntukan industri berada di seluruh kecamatan 2) sentra industri meliputi: Kecamatan Sumbersari; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Balung; Kecamatan Puger; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Sumberbaru; dan Kecamatan Bangsalsari.
9	Kawasan peruntukan Permukiman		47,2	1) Kawasan permukiman perkotaan meliputi seluruh kawasan perkotaan 2) Kawasan permukiman perdesaan meliputi seluruh kawasan perdesaan
10	Kawasan Peruntukan Lainnya			1) Kawasan pertahanan dan keamanan; a. Area latihan militer meliputi: a) Gunung Mayang Komplek di Kecamatan Mayang; b) Kecamatan Ambulu; c) Kecamatan Wuluhan; dan d) Kecamatan Puger b. Perkantoran militer meliputi: a) Komando Distrik Militer (Kodim) 0824 berada di Kecamatan Patrang; b) Brigif 9 Kosttrad di Kecamatan Patrang; c) Batalyon Infanteri 515 Kostrad di Kecamatan Tanggul; d) Batalyon Infanteri 509 Kostrad di Kecamatan



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Sumbersari; e) Batalyon Arteleri Medan 8 Kostrad di Kecamatan Summersari dan Kecamatan Ambulu; f) Sub Denpom di Kecamatan Summersari; dan g) Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan. c. Perkantoran kepolisian meliputi: a) Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Kaliwates; dan b) Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan. d. Sekolah calon bintangara (Secaba) terdapat di Kecamatan Summersari 2) Kawasan perdagangan dan jasa meliputi a) Kawasan perkotaan PKW; b) Kawasan perkotaan PKLp; c) Kawasan perkotaan PPK. 3) Kawasan pemerintahan meliputi a) Pengembangan kawasan pemerintahan Kabupaten berada di wilayah Kabupaten Jember; b) Pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan berada di seluruh kecamatan; dan c) Pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan akan diatur dalam rencana detail tata ruang. 4) Kawasan sektor informal meliputi di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Jember

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035

H. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Perencanaan Kawasan lindung Kabupaten Jember tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Rencana Kawasan lindung meliputi:

a) Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung terdapat seluas 45.139 hektar yang meliputi wilayah: Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Tanggul, Kecamatan



Bangsasari, Kecamatan Panti, Kecamatan Jelbug, Kecamatan Sumberjambe, Kecamatan Silo, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Wuluhan, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Mayang, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan Ledokombo dan Kecamatan Puger.

b) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya adalah Kawasan resapan air yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. Arahkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya meliputi rehabilitasi lingkungan dan penanaman pohon lindung dalam kawasan resapan air.

c) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar waduk, Kawasan ruang terbuka hijau Kawasan perkotaan, Kawasan sempadan pantai dan Kawasan sekitar mata air.

Tabel 1.9
Kawasan Lindung Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Letak
1	Kawasan sempadan sungai	1) DAS Jember berada di Desa Andongrejo 2) DAS Curah Sari berada di Desa Andongrejo 3) DAS Sumbing berada di Desa Andongrejo 4) DAS Kumbu berada di Desa Andongrejo 5) DAS Klabang berada di Desa Andongrejo 6) DAS Curah Grembyak berada di Desa Andongrejo 7) DAS Kebonpantai berada di Desa Andongrejo 8) DAS Curah Sumbi berada di Desa Andongrejo 9) DAS Curah Jati berada di Desa Andongrejo 10) DAS Curah Kekeh berada di Desa Andongrejo 11) DAS Curah Nongko Hilir berada di Desa Andongrejo 12) DAS Curah Nongko Hulu berada di Desa Curah Nongko 13) DAS Rowocangak berada di Desa Curah Nongko–Desa Andongrejo 14) DAS Mayang berada di Desa Mayang – Desa Sabrang 15) DAS Gemunting berada di Desa Sumber Rejo 16) DAS Sumber rejo berada di Desa Sumber Rejo 17) DAS Sumber Badeng berada di Kecamatan Wuluhan 18) DAS Curah Lo berada di Kecamatan Wuluhan 19) DAS Lodong berada di Kecamatan Wuluhan 20) DAS Curah Badeng berada di Kecamatan Wuluhan 21) DAS Badeng Loje Hulu berada di Kecamatan Wuluhan 22) DAS Curah Loje berada di Kecamatan Wuluhan 23) DAS Kuning berada di Kecamatan Wuluhan



No.	Jenis Kawasan	Letak
		24) DAS Sogol berada di Kecamatan Wuluhan 25) DAS Lojejer Hilir berada di Kecamatan Wuluhan 26) DAS Lojejer Tengah berada di Kecamatan Wuluhan 27) DAS Lojejer berada di Kecamatan Wuluhan 28) DAS Banteng Jejer berada di Kecamatan Wuluhan 29) DAS Bedadung berada di Desa Rowosari – Desa Puger Kulon 30) DAS Jatiroto berada di Desa Darungan – Desa Puger Kulon 31) DAS Besini berada di Desa Karang Duren – Desa Mojosari 32) DAS Tanggul berada di Desa Tanggul Kulon – Desa Kepanjen 33) DAS Nusa Barong berada di Desa Puger Kulon
2	Kawasan sekitar waduk	Kawasan sekitar Waduk Antrokan berada di Kecamatan Tanggul; Kawasan sekitar Dam meliputi: 1) Dam Talang, di Kecamatan Jenggawah; 2) Dam Bedadung, di Kecamatan Rambipuji; dan 3) Dam Pondok Waluh, di Kecamatan Kencong;
3	Kawasan RTH Taman dan Hutan Kota	1) Taman Mastrip; 2) Taman depan DPRD; 3) Taman Sukorejo; 4) Taman Tugu Koperasi; 5) Taman Loka Dharma; 6) Taman <i>Double Way</i> GOR; 7) Taman Semanggi; 8) Taman Alun-alun; 9) Taman Batas kota Jubung; 10) GOR PKPSO; 11) Stadion Notohadinegoro; 12) Lapangan Sukorejo Kecamatan Sumbersari; 13) Lapangan Talangsari Kecamatan Kaliwates; 14) Lapangan Mangli Kecamatan Kaliwates; 15) Jember <i>Sport Garden</i> (JSG) di Kecamatan Ajung; 16) RTH Perkotaan Kecamatan Tanggul; 17) RTH Perkotaan Kecamatan Kencong; 18) RTH Perkotaan Kecamatan Balung; 19) RTH Perkotaan Kecamatan Kalisat; 20) RTH Perkotaan Kecamatan Rambipuji; 21) RTH Perkotaan Kecamatan Arjasa; 22) RTH Perkotaan Ambulu; dan 23) RTH Perkotaan Kecamatan Mayang. 24) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Jelbuk; 25) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Silo; 26) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Jombang; 27) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Sumberbaru; 28) Hutan Kota di Kecamatan Ajung; 29) Hutan Kota di Kecamatan Patrang; 30) Hutan Kota di Kecamatan Kaliwates; dan 31) Hutan Kota di Kecamatan Sumbersari.
4	RTH Jalur Hijau	1) Taman Baratan; 2) Taman Pagah; 3) Taman <i>Double Way</i> ; dan 4) Jalur dalam kota.



No.	Jenis Kawasan	Letak
5	RTH Fungsi Tertentu	1) Taman Makam Pahlawan Kecamatan Patrang; 2) Makam Cukil; 3) Makam Wetan Kantor; 4) Makam Kebonsari; 5) Makam Sukorejo; 6) Makam Kreongan; 7) Makam Non Muslim Kaliwates; dan 8) Makam Gebang.
6	Kawasan Sempadan Pantai	Memanjang dari perbatasan Kabupaten Lumajang sampai ke batas Kabupaten Banyuwangi yang berada di Kecamatan Kencong – Gumukmas - Wuluhan – Puger -Ambulu – Tempurejo

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035

d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember meliputi : 1) Suaka Margasatwa; 2) Cagar Alam; 3) Taman Nasional; 4) Taman Wisata Alam; dan 5) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

Tabel 1.10
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
1	Kawasan Suaka Margasatwa	4.375,00	1) Kecamatan Panti 2) Kecamatan Bangsalsari
2	Kawasan Cagar Alam	7.654,70	1) Suaka Margasatwa Nusa Barong seluas kurang lebih 7.635,9 hektar di Kecamatan Puger; 2) Cagar Alam Watangan Puger seluas ± 2 Ha di Kecamatan Wuluhan; dan 3) Cagar Alam Curah Manis Sempolan I – VIII seluas kurang lebih 16,8 Ha 4) di Kecamatan Silo.
3	Kawasan Taman Nasional	37.585,00	Taman Nasional Meru Betiri
4	Kawasan Wisata Alam	174,90	Pantai meliputi : 1) Pantai Watu Ulo berada di Kecamatan Ambulu; 2) Pantai Papuma berada di Kecamatan Wuluhan; 3) Pantai Paseban berada di Kecamatan Kencong; 4) Pantai Puger berada di Kecamatan Puger; 5) Pantai Bandalit berada di Kecamatan Tempurejo; dan



No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
			6) Pantai Canga'an berada di Kecamatan Tempurejo. Air terjun meliputi : 1) Air terjun Tancak berada di Kecamatan Panti; 2) Air terjun Manggis berada di kecamatan Tanggul; 3) Air terjun Lereng Raung berada di Kecamatan Sumberjambe; 4) Air terjun Pasaran berada di Kecamatan Sumberjambe; 5) Air terjun Antrokan berada di Kecamatan Ledokombo; dan 2) Air terjun Slateng berada di Kecamatan Ledokombo.
5	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan berupa Situs Purbakala		1) Koleksi cagar budaya bergerak Kabupaten Jember; 2) Koleksi Situs Kamal di Arjasa yang terdiri dari Situs Kendal, Klanceng, dan Duplang; 3) Situs Dolmen Sukosari Sukowono terdiri dari Situs Mojo dan Situs Srino; 4) Situs Seputih Mayang terdiri dari Situs sarchopagus dan Situs Batu Kangkang; 5) Situs Sucopangepok terdiri dari Situs Pakel dan Lengkong; 6) Situs Sukoember terdiri dari Situs Suko; 7) Situs Prasasti Batu Gong di Kecamatan Rambipuji; 8) Situs Prasasti Congapan di Karangbayat Kecamatan Sumberbaru; 9) Situs Candi Deres di Kecamatan Gumukmas; dan 10) Sarchopagus berada di Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Arjasa.
6	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu pengetahuan berupa Bangunan Cagar Budaya		1) Rumah Dokter Naryo (sebelah Kantor Puslit Kakao); 2) Eks. Kantor PT. Tjipta Niaga; 3) Eks Kantor Pemkab Jember; 4) Gedung GNI Jember; 5) SDK Maria Fatima; 6) Eks Kantor BRI; 7) SMP 1 Jember; 8) Kantor PTPN XII; 9) Hangar Tembakau PTPN XII; 10) Universitas Tawang Alun; 11) Hotel dan Pemandian Rembangan; 12) Eks. Pabrik Beras Redjoagung Mangli; 13) Masjid Raya Jember; 14) Konter Telisa jalan PB. Sudirman; 15) Toko Nanyang jalan Sultan Agung; 16) Kodim 0824 Jember; 17) Kantor Camat Wuluhan; 18) Water Tourent pasar Tanjung; 19) Pos Militer jalan PB. Sudirman; 20) Stasiun Jember; 21) Perumahan dan Kantor PG. Semboro di Kencong; 22) Sekolah Mulo (SMK belakang Pemkab Jember) jalan Kartini; 23) Sekolah Jepang (Yon Armed 8 Jember);



No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
			24) Sekolah Teknik (SMP 10 Jember); 25) Goa Jepang; 26) Lembaga Kemasyarakatan Jember; 27) Rumah Pecinan di jalan Imam Syafii

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035, kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana. Adapun kawasan rawan bencana di Kabupaten Jember secara detail disajikan pada berikut

Tabel 1.11
Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Letak
1	Kawasan rawan tanah longsor	a. Kecamatan Arjasa; b. Kecamatan Jelbuk; c. Kecamatan Sukorambi; d. Kecamatan Bangsalsari; e. Kecamatan Tanggul; f. Kecamatan Sukowono; g. Kecamatan Sumberjambe; h. Kecamatan Silo; i. Kecamatan Tempurejo; j. Kecamatan Sumberbaru; k. Kecamatan Panti; l. Kecamatan Rambipuji; m. Kecamatan Mumbulsari. n. Kecamatan Ledokombo; o. Kecamatan Patrang; dan p. Kecamatan Mayang.
2	Kawasan rawan letusan gunung api	a. Kecamatan Sukowono; b. Kecamatan Ledokombo; c. Kecamatan Sumberjambe; d. Kecamatan Silo; e. Kecamatan Kalisat; f. Kecamatan Mayang; g. Kecamatan Jelbuk; h. Kecamatan Arjasa; i. Kecamatan Patrang; j. Kecamatan Sukorambi; k. Kecamatan Tanggul; dan l. Kecamatan Sumberbaru.



No.	Jenis Kawasan	Letak
	Kawasan rawan angin kencang dan puting beliung	meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
	Kawasan rawan tsunami	a. Kecamatan Kencong; b. Kecamatan Gumukmas; c. Kecamatan Puger; d. Kecamatan Wuluhan; e. Kecamatan Ambulu; dan f. Kecamatan Tempurejo
	Kawasan rawan banjir	a. Kecamatan Panti; b. Kecamatan Tempurejo; c. Kecamatan Kencong; d. Kecamatan Rambipuji; e. Kecamatan Jengawah; dan f. Kecamatan Silo.
	Kawasan rawan gempa bumi	Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
	Kawasan rawan bencana kekeringan	a. Kecamatan Patrang; b. Kecamatan Jelbuk; c. Kecamatan Arjasa; d. Kecamatan Bangsalsari; e. Kecamatan Tanggul; f. Kecamatan Sumberbaru; g. Kecamatan Panti; h. Kecamatan Sumbersari; i. Kecamatan Tempurejo; j. Kecamatan Pakusari; k. Kecamatan Silo; dan l. Kecamatan lainnya sesuai dengan hasil identifikasi

.Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan salah satunya adalah dengan menghitung Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di Kabupaten Jember sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 disebutkan bahwa parameter yang digunakan dalam penyusunan IRB diantaranya yaitu:

1. Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupadata frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempabumi, tsunami, dan lain-lain;
2. Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

1.5.2 Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data “Kabupaten Jember Dalam Angka 2023” yang dirilis BPS Kab. Jember, proyeksi penduduk Kabupaten Jember pada Tahun 2022 mencapai 2.584.233 jiwa yang terdiri atas 1.290.488 jiwa penduduk laki-laki dan 1.293.488 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jember pada Tahun 2022 mencapai 784,68 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kaliwates dengan kepadatan sebesar 5.008,30 jiwa/km² dan terendah berada di Kecamatan Tempurejo sebesar 154,50 jiwa/Km².

Pada Tahun 2022 Penduduk Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan sebesar 0,11% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,13% dan penduduk perempuan sebesar 0,06%. Sedangkan angka rasio jenis kelamin Tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,75.

Tabel 1.12

Indikator kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.440.714	2.450,668	2.536.729	2.581.486	2.584.233
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,43	0,41	3,51	1,76	0,11
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	741,11	744.13	770,26	783,85	784,68
Sex Ratio (L/P) (%)	96,69	96,68	99,46	99,69	99,75
% Penduduk Menurut Kelompok Umur					
0 – 14 tahun (%)	23,06	22,78	20,86	20,39	20,23

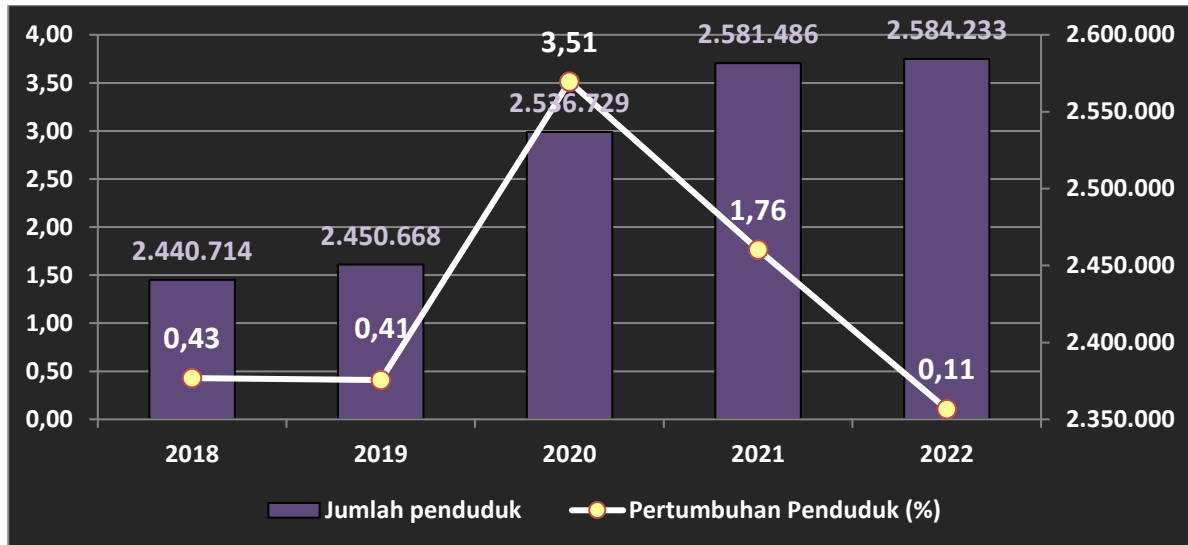


Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
15 – 64 tahun (%)	68,76	68,48	70,35	72,13	70,75
> 65 tahun (%)	8,17	8,74	8,79	9,24	9,02

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023)

Gambar 1.4

Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023)

Tabel 1.13

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Total	Luas	Kepadatan Penduduk
1	Kencong	72.055	2,79	65,92	1.093,07
2	GumukMas	89.354	3,46	82,98	1.076,81
3	Puger	125.331	4,85	148,99	841,20
4	Wuluhan	127.111	4,92	137,18	926,60
5	Ambulu	118.949	4,61	104,56	1.137,61
6	Tempurejo	81.027	3,14	524,46	154,50
7	Silo	111.202	4,31	309,98	358,74
8	Mayang	52.105	2,02	63,78	816,95
9	Mumbulsari	69.367	2,69	95,13	729,18
10	Jenggawah	90.279	3,50	51,02	1.769,48
11	Ajung	84.474	3,27	56,61	1.492,21
12	Rambipuji	88.216	3,42	52,8	1.670,76



No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Total	Luas	Kepadatan Penduduk
13	Balung	83.569	3,24	47,12	1.773,54
14	Umbulsari	80.057	3,10	70,51	1.135,40
15	Semboro	50.014	1,94	45,43	1.100,90
16	Jombang	56.473	2,19	54,3	1.040,02
17	Sumberbaru	116.750	4,52	166,38	701,71
18	Tanggul	94.087	3,64	199,99	470,46
19	Bangsalsari	126.502	4,90	175,28	721,71
20	Panti	66.618	2,58	160,71	414,52
21	Sukorambi	41.929	1,62	60,63	691,56
22	Arjasa	42.279	1,64	43,75	966,38
23	Pakusari	46.215	1,79	29,11	1.587,60
24	Kalisat	80.259	3,11	53,48	1.500,73
25	Ledokombo	70.139	2,72	146,92	477,40
26	Sumberjambe	64.277	2,49	138,24	464,97
27	Sukowono	61.744	2,39	44,04	1.402,00
28	Jelbuk	33.283	1,29	65,06	511,57
29	Kaliwates	124.907	4,84	24,94	5.008,30
30	Sumpersari	133.724	5,18	37,05	3.609,28
31	Patrang	101.937	3,95	36,99	2.755,80
Jumlah/Total		2.584.233	100	3.293,34	784,68

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023 (data diolah))

Tabel 1.14

Perkembangan Aparatur (PNS) berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Laki-laki	6.902	6.638	5.782	5.252	4.829
2.	Perempuan	6.289	6.473	6.001	5.591	5.473
	Jumlah	13.191	13.111	11.783	10.843	10.302

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Jember

Data di atas menjelaskan perkembangan PNS dari tahun 2018-2022 berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui terdapat penurunan PNS dari tahun 2018-2022. Dari tahun ke tahun, kebutuhan aparatur pemerintah terus meningkat, seiring dengan meningkatnya tugas pelayanan kepada masyarakat, di samping tentunya



untuk mengisi kekosongan pegawai karena memasuki masa purna tugas (pensiun) atau karena proses mutasi, terutama pegawai yang meninggalkan wilayah Kabupaten Jember dan memilih tempat tugas di daerah lain namun tidak sebanding dengan jumlah formasi pengangkatan PNS baru.

1.5.3 Kondisi Ekonomi

Sebagai wilayah agraris, Kabupaten Jember memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial bagi pengembangan perekonomian wilayah. Sesuai dengan potensi wilayah yang ada, perekonomian Kabupaten Jember masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor basis sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai : penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku industri, bahan ekspor, pendapatan daerah dan masyarakat, menyerap tenaga kerja maupun katub pengamanan bagi masalah-masalah sosial yang timbul.

a. Potensi Unggulan Daerah

Berbagai potensi sumberdaya ekonomi banyak terdapat di Kabupaten Jember, namun tidak semua potensi yang ada merupakan potensi unggulan yang prospektif, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan prioritas penanganannya. Beberapa potensi unggulan yang ada di Kabupaten Jember, diantaranya adalah :

1. Bidang Pertanian

- Sub Bidang Pertanian : padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kol, kacang panjang, durian, alpukat, buah naga, jeruk, mangga, rambutan.
- Sub Bidang Peternakan : unggas (ayam dan itik), sapi kereman, sapi perah dan domba.
- Sub Bidang Perikanan : budidaya ikan (lele, nila, gurami) dan perikanan tangkap (cakalang, tuna).
- Sub Bidang Perkebunan : tembakau, kopi, tebu dan kelapa.



2. Bidang Pariwisata : Hotel dan Pemandian Rembangan, Hotel dan Pemandian Kebon Agung, Pantai Watu Ulo, Tanjung Papuma, Pantai Bandalit, Pantai Puger, Pantai Payangan, Pantai Paseban, Air Terjun Tancak
3. Bidang Pertambangan : Batu gamping, mangan dan pasir
4. Bidang Industri : Berbagai produk industri kecil kerajinan (batik, manik-manik, sangkar burung) dan industri pengolahan

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember mulai tahun 2014 sudah menggunakan tahun dasar baru, yaitu tahun 2010. Berdasarkan rekomendasi PBB dan menggunakan System National Account tahun 2008. Oleh karenanya penghitungan PDRB tahun 2010 – 2014, dihitung mundur menggunakan tahun dasar 2010.

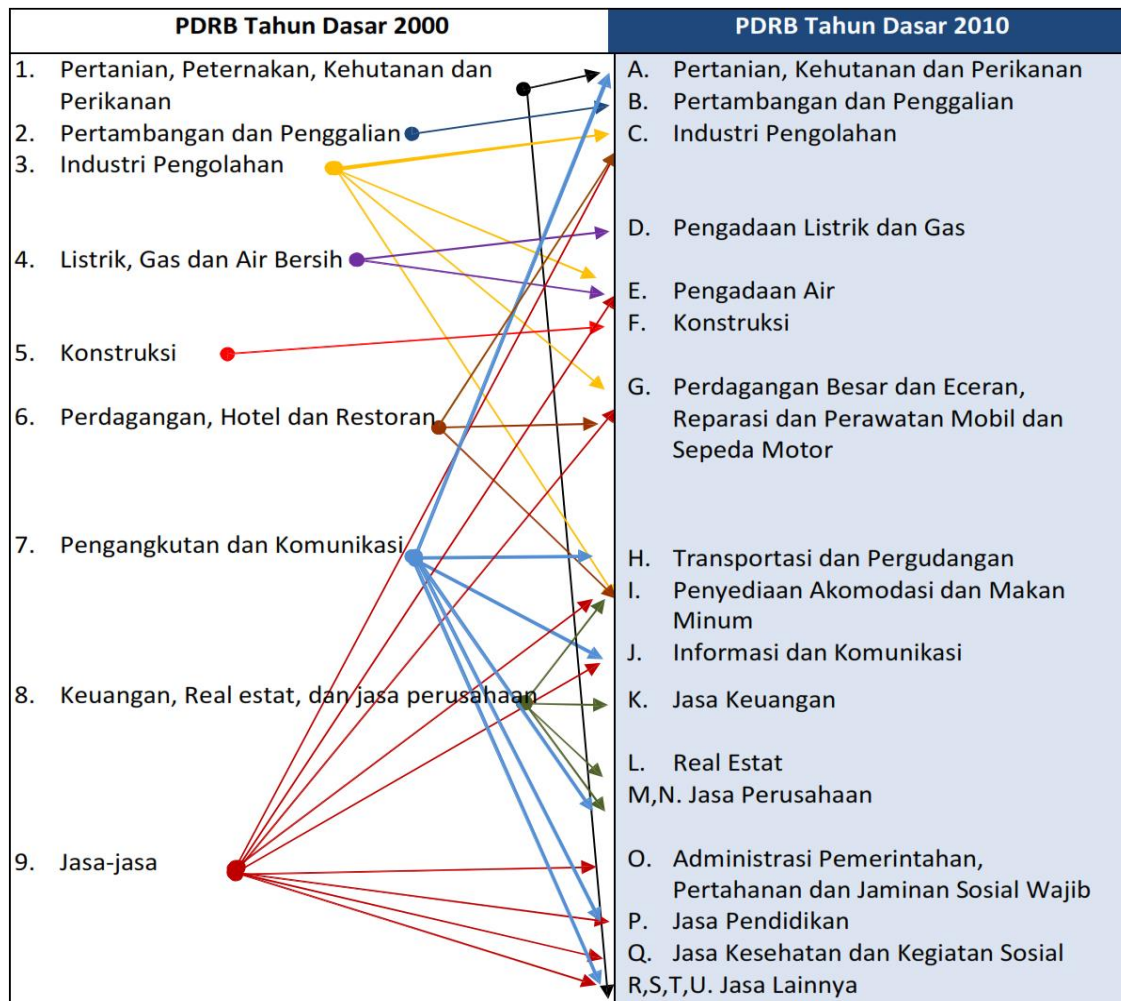
Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

1. Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
4. Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI);

6. Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Gambar 1.5

Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun Dasar 2000 dan 2010



Sumber : BPS Kab. Jember (PDRB Kabupaten Jember 2015 – 2019)

Perekonomian Kabupaten Jember diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diestimasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. PDRB dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu 1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010. PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Jember sejak tahun 2018-2019 menunjukkan peningkatan sementara pada tahun 2020



terjadi penurunan lalu meningkat kembali ditahun 2021-2022 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.15

PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.795,46	20.378,61	20.462,57	21.089,46	22.894,99
B	Pertambangan dan Penggalian	3.208,12	3.293,83	3.148,22	3.296,45	3.552,02
C	Industri Pengolahan	14.479,60	15.805,38	15.107,72	17.131,11	18.333,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35,31	37,55	37,69	39,1	42,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47,3	51,1	53,66	58,06	59,95
F	Konstruksi	5.850,63	6.424,98	6.030,70	6.274,82	6.873,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.990,72	10.965,71	10.480,34	11.561,53	12.998,07
H	Transportasi dan Pergudangan	1.283,70	1.409,87	1.333,86	1.440,67	1.773,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.751,98	1.963,24	1.737,36	1.851,15	2.148,72
J	Informasi dan Komunikasi	4.489,62	4.971,70	5.489,92	5.936,45	6.335,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.731,59	1.829,73	1.831,39	1.911,28	2.104,36
L	Real Estat	999,8	1.077,34	1.117,58	1.144,31	1.229,39
M,N	Jasa Perusahaan	262,82	290,09	282,4	292,75	319,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.565,31	2.736,78	2.777,71	2.759,42	2.833,59
P	Jasa Pendidikan	4.166,19	4.511,39	4.708,69	4.783,75	4.892,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	568,31	630,02	700,11	701,76	748,44
R,S, T,U	Jasa lainnya	785,64	848,39	740,05	796,78	934,56
	Produk Domestik Regional Bruto	72.012,10	77.225,71	76.039,97	81.068,85	88.075,44

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023)

PDRB ADHB Kabupaten Jember pada tahun 2022 sebesar 88.075,44 miliar Rupiah, mengalami peningkatan sebesar 7.006,59 miliar Rupiah



dibandingkan PDRB ADHB Kabupaten Jember tahun 2021. Peningkatan PDRB ADHB pada tahun 2022 ini didorong oleh tiga sektor utama PDRB ADHB yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Faktor pendorong terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 25,99 persen terhadap perubahan PDRB ADHB tahun 2022, selanjutnya Sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 20,82 persen terhadap perubahan PDRB ADHB tahun 2022 dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 14,76 persen terhadap perubahan PDRB ADHB tahun 2022.

Tabel 1.16
PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.845,12	14.046,58	13.895,89	13.881,23	14.318,85
B	Pertambangan dan Penggalian	2.564,80	2.588,33	2.417,34	2.445,02	2.551,17
C	Industri Pengolahan	10.888,41	11.656,83	10.867,31	11.745,49	12.120,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27,88	29,32	29,48	30,16	32,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,44	35,58	37,02	39,72	39,8
F	Konstruksi	3.667,65	3.995,00	3.725,62	3.804,07	4.044,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.875,84	7.410,80	6.990,66	7.569,41	8.087,97
H	Transportasi dan Pergudangan	822,19	892,77	838,74	902,52	1.047,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.191,21	1.309,02	1.135,42	1.169,97	1.308,17
J	Informasi dan Komunikasi	3.864,89	4.225,31	4.648,80	5.007,46	5.301,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.138,42	1.189,96	1.188,50	1.205,05	1.237,11
L	Real Estat	739,38	788,62	808,54	824,21	865,96
M,N	Jasa Perusahaan	172,46	185,24	176,38	180,17	190,1



	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.816,49	1.872,52	1.830,95	1.829,92	1.846,73
P	Jasa Pendidikan	2.717,99	2.903,62	2.976,29	3.020,51	3.054,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	398,49	429,05	468,93	460,34	478,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	605,86	641,49	550,69	573,46	642,4
Produk Domestik Regional Bruto		51.370,52	54.200,04	52.586,56	54.688,71	57.167,12

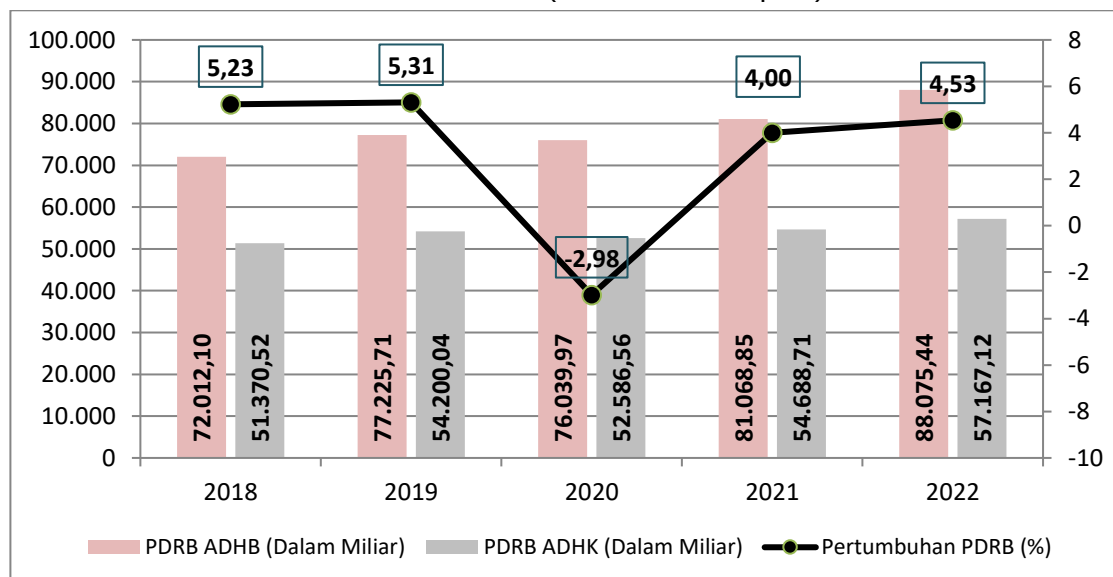
Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023)

PDRB ADHK Kabupaten Jember pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan kembali dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 57.167,12 Miliar Rupiah atau meningkat sebesar 2.478,41 Miliar Rupiah.

Indikator lain yang sangat penting untuk menjadi perhatian adalah indikator pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember. Pertumbuhan PDRB memberikan informasi tentang perubahan nilai PDRB ADHK tiap tahun dalam bentuk persentase. Gambar berikut ini menyajikan pergerakan pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Jember sejak tahun 2018 sampai dengan 2022.

Gambar 1.6

PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023 (data diolah))



Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 lalu meningkat kembali pada tahun 2021 hingga 2022. Pertumbuhan PDRB tahun 2019 sebesar 5,31 persen atau meningkat sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis hingga mencapai -2,98 persen akibat dampak dari Pandemi Covid-19 selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga mencapai 4,00 persen. Pada tahun 2022 Pertumbuhan PDRB sebesar 4,53 atau meningkat sebesar 0,53 persen dibandingkan tahun 2021.

Tabel 1.17

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar PDHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture,	0,02	1,46	-1,07	-0,11	3,15
B	Pertambangan dan Penggalian	5,67	0,92	-6,61	1,15	4,34
C	Industri Pengolahan	7,01	6,08	-6,77	8,08	3,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,9	5,18	0,54	2,31	6,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,32	6,4	4,06	7,29	0,20
F	Konstruksi	7,72	8,93	-6,74	2,11	6,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,42	7,8	-5,72	8,28	6,85
H	Transportasi dan Pergudangan/	7,52	8,58	-6,05	7,60	16,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,03	9,89	-13,26	3,04	11,81
J	Informasi dan Komunikasi	8,13	9,33	10,02	7,72	5,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,51	4,53	4,40	1,39	2,66
L	Real Estat	6,48	6,66	2,53	1,94	5,07
M, N	Jasa Perusahaan	7,41	7,41	-4,78	2,15	5,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,08	3,08	-2,22	-0,06	0,92
P	Jasa Pendidikan	6,83	6,83	2,50	1,49	1,12



	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,67	7,67	9,29	-1,83	3,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,88	5,88	-14,15	4,13	12,02
	Produk Domestik Regional Bruto	5,23	5,31	-2,98	4,00	4,53

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023)

PDRB Jember atas dasar harga berlaku Tahun 2018 mencapai sebesar Rp.72.012,10 miliar, Tahun 2019 sebesar Rp.77.225,71 miliar, Tahun 2020 sebesar Rp.76.039,97 miliar, Tahun 2021 sebesar Rp.81.068,85 miliar dan pada tahun 2022 sebesar Rp.88.075,44 miliar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, dengan capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 Rp. 51.370,52 miliar tumbuh sebesar 5,23%, Tahun 2019 sebesar Rp. 54.200,04 juta tumbuh sebesar 5,31%, Tahun 2020 sebesar Rp. 52.586,56 miliar tumbuh sebesar -2,98%, Tahun 2021 sebesar Rp. 54.688,71 miliar tumbuh sebesar 4,00% dan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 57.167,12 miliar tumbuh sebesar 4,53%.

Tabel 1.18

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. PDRB Jember					
ADHB (juta rupiah)	72.312.525,60	77.225.710,00	76.039.970,00	81.068.850,00	88.075.440,00
ADHK (juta rupiah)	51.472.979,10	54.204.138,70	52.586.560,00	54.688.710,00	57.167.120,00
Pertumbuhan PDRB terhadap ADHK (%)	5,23	5,31	-2,98	4,00	4,53
2. PDRB Perkapita					
ADHB (ribu rupiah)	29.627,61	31.512,11	29.975,60	31.403,95	34.081,85
ADHK (ribu rupiah)	21.089,31	22.118,11	20.730,07	21.184,97	22.121,50

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2023 (data diolah))

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan langkah konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan penyesuaian



titik berat pembangunan pada program-program prioritas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026.

APBD disusun menggunakan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), yaitu pendekatan penganggaran dengan keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, terkait dengan tingkat pelayanan dari hasil yang dapat dicapai.

Dalam pelaksanaannya, ABK adalah proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penerapannya diharapkan akan membuat proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena melibatkan pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, bahkan dalam tahap tertentu juga melibatkan warga masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik. Melalui ABK keterkaitan antara nilai uang dan hasil dapat diidentifikasi, sehingga program dapat dijalankan secara efektif. Dengan demikian, jika ada perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output dan outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, total realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan	: 3.681.543.878.583,13
2. Belanja	: 4.117.916.374.258,06
Surplus/Defisit	: (435.640.777.858,04)
3. Pembiayaan	
a. Pembiayaan Penerimaan	: 676.617.037.989,96
b. Pembiayaan Pengeluaran	
Pembiayaan Netto	: 676.617.037.989,96



a. Realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis pendapatan Tahun Anggaran 2022

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember di tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.3.852.241.731.262 dapat terealisasi sebesar Rp.3.681.543.878.583,13 atau 95,57%. Pendapatan Daerah Kabupaten Jember antara lain berasal dari 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 1.19
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH / (KURANG)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	694.849.881.962	639.619.914.327	92,05	(55.229.967.634,87)
1.1.1	Pajak Daerah	294.321.940.000,00	295.484.961.392,00	100,40	1.163.021.392,00
1.1.2	Restribusi Daerah	48.249.287.793,00	37.867.662.398,00	78,48	(10.381.625.395,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.102.248.169,00	6.829.382.856,25	111,92	727.134.687,25
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	346.176.406.000,00	299.437.907.680,88	86,50	(46.738.498.319,12)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.115.610.203.172,00	3.021.292.091.569,00	96,97	(94.318.111.603,00)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.830.489.325.612,00	2.736.292.242.890,00	96,67	(94.197.082.722,00)
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar daerah	285.120.877.560,00	284.999.848.679,00	99,96	(121.028.881,00)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.781.646.128,00	20.631.872.687,00	49,38	(21.149.773.441,00)
1.3.1	Pendapatan Hibah	21.434.337.465,00	9.451.113.846,00	44,09	(11.983.223.619,00)
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.347.308.663,00	11.180.758.841,00	54,95	(9.166.549.822,00)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.852.241.731.262,00	3.681.543.878.583,13	95,57	(170.697.852.678,87)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)



b. Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Belanja Daerah Kabupaten Jember di tahun anggaran 2022 yang dialokasikan sebesar Rp.4.421.740.725.710 dapat terealisasi sebesar Rp.4.117.916.374.258,06 atau 93,13%. Dalam rangka merealisasikan arah kebijakan belanja yang telah dirumuskan dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 secara garis besar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH / (KURANG)
2.1	BELANJA OPERASI	3.048.139.447.557,00	2.774.926.194.784,15	91,04	(273.213.252.772,85)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.466.744.121.206,00	1.384.499.814.845,00	94,39	(82.244.306.361,00)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.438.380.097.591,00	1.297.508.622.447,15	90,21	(140.871.475.143,85)
2.1.5	Belanja Hibah	94.693.757.760,00	48.739.512.592,00	51,47	(45.954.245.168,00)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	48.321.471.000,00	44.178.244.900,00	91,43	(4.143.226.100,00)
2.2	BELANJA MODAL	855.741.991.069,00	829.309.474.596,91	96,91	(26.432.516.472,09)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.899.926.570	110.179.303.905,68	93,45	(7.720.622.664,32)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.374.831.437	116.408.013.296,63	92,85	(8.966.818.140,37)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	577.881.101.224	571.264.002.627,99	98,85	(6.617.098.596,01)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.586.131.838	31.458.154.766,61	90,96	(3.127.977.071,39)
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	4.906.113.987,00	1.483.241.150,00	30,23	(3.422.872.837,00)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.906.113.987	1.483.241.150,00	30,23	(3.422.872.837,00)
2.4	BELANJA TRANSFER	512.974.004.469,00	512.197.463.727,00	99,85	(776.540.742,00)
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.065.196.660	22.065.196.658,00	100,00	(2,00)
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	490.908.807.809	490.132.267.069,00	99,84	(776.540.740,00)
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.421.761.557.082,00	4.117.916.374.258,06	93,13	(303.845.182.823,94)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

c. Realisasi Pembiayaan Daerah Menurut Jenis Pembiayaan Daerah Tahun 2022

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama



dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember di tahun anggaran 2022 berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah dialokasikan sebesar Rp.569.519.825.820,00 dapat terealisasi sebesar Rp.676.617.037.989,96 atau 118,80%. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.21
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH / (KURANG)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	569.519.825.820,00	676.617.037.989,96	118,80	107.097.212.169,96
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	569.519.825.820,00	676.617.037.989,96	118,80	107.097.212.169,96
Pembiayaan Netto		569.519.825.820,00	676.617.037.989,96	118,80	107.097.212.169,96

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (unaudited)

2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

*P*engelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jember mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Melalui Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dalam implementasi arah kebijakan keuangan daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan program prioritas.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam proses perencanaan dan penganggaran Kabupaten Jember sudah menggunakan SIPD yang mengacu pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengelola Keuangan Daerah telah mempedomani peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku agar seluruh sumberdaya keuangan daerah untuk dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, Tema Pembangunan Kabupaten Jember pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

“ Percepatan Menuju Jember Bangkit ”

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tersebut maka pembangunan Kabupaten Jember tahun 2022 diarahkan pada tujuh prioritas yaitu:

- Prioritas Jember 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian.
- Prioritas Jember 2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.
- Prioritas Jember 3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- Prioritas Jember 4. Mendorong Pariwisata yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya.
- Prioritas Jember 5. Memperkuat layanan Infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah.
- Prioritas Jember 6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah.
- Prioritas Jember 7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 bahwa pada tahun 2022 terdapat 209 Program, 493 Kegiatan dan 1083

Sub-kegiatan. Berikut disampaikan penjabaran perubahan besaran program kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022.

Tabel 2.1
Perubahan Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan pada Tahun 2022

PROGRAM				KEGIATAN				SUB-KEGIATAN			
RKPD 2022	APBD 2022	P-RKPD 2022	P-APBD 2022	RKPD 2022	APBD 2022	P-RKPD 2022	P-APBD 2022	RKPD 2022	APBD 2022	P-RKPD 2022	P-APBD 2022
280	285	286	289	670	691	697	703	1619	1690	1734	1810

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah secara umum diukur dengan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan persentase kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah sendiri meliputi penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama PAD yang merupakan indikator kekuatan dan kemandirian Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai kegiatan operasional baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. PAD merupakan komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan penerimaannya, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah adalah:



1. Meningkatkan pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, dan instansi terkait lainnya;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Unit Penghasil Lainnya;
6. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan Daerah;
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
8. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
9. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Transfer; dan
10. Optimalisasi peningkatan PAD melalui kajian dan pendataan potensi sumber sumber pajak/retribusi baru, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak/retribusi, pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penagihan piutang pajak/retribusi.
11. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sampai ditingkat desa/kelurahan, peningkatan kualitas sarana prasarana pemungutan pajak daerah, dan retribusi daerah serta kerja sama dengan lembaga keuangan/non keuangan dalam pemungutan pajak daerah.
12. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif.



13. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan transfer dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang professional;
3. Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif pilihan model layanan pembayaran dengan memperbanyak jaringan tempat pembayaran seluas-luasnya berkerja sama dengan pihak ketiga, baik dengan lembaga perbankan maupun non perbankan guna mewujudkan digitalisasi transaksi daerah sehingga diharapkan masyarakat akan tergerak untuk menggunakan transaksi non tunai atau secara digital.
4. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah bersinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan pemasukan penerimaan pajak daerah, pembentukan dan sinkronisasi data dengan pihak terkait serta pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dimana kepada wajib pajak diharuskan melunasi kewajiban pajaknya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan layanan publik tertentu dari pemerintah daerah.



5. Mengevaluasi regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara reguler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.
6. Mengefektifkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diadakan penyesuaian/perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
8. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
9. Meningkatkan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

2.1.2 Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 semula Rp.3.811.388.265.941 bertambah sebesar Rp.40.853.465.321 atau 1,07% menjadi Rp.3.852.241.731.262 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah semula Rp.648.584.268.098 bertambah sebesar Rp.46.265.613.864 atau 7,13% menjadi Rp. 694.849.881.962
- b. Pendapatan Transfer semula Rp.3.055.251.411.788 bertambah sebesar Rp.60.358.791.384 atau 1,98% menjadi Rp. 3.115.610.203.172
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp. 107.552.586.055 berkurang sebesar Rp.65.770.939.927 atau 61,15% menjadi Rp.41.781.646.128

Rincian Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.2
Penjabaran Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	648.584.268.098	694.849.881.962	46.265.613.864
1.1.1	Pajak Daerah	248.621.940.000	294.321.940.000	45.700.000.000
1.1.2	Restribusi Daerah	47.683.673.929	48.249.287.793	565.613.864
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.102.248.169	6.102.248.169	0
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	346.176.406.000	346.176.406.000	0
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.055.251.411.788	3.115.610.203.172	60.358.791.384
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.790.207.210.000	2.830.489.325.612	40.282.115.612
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar daerah	265.044.201.788	285.120.877.560	20.076.675.772
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.552.586.055	41.781.646.128	(65.770.939.927)
1.3.1	Pendapatan Hibah	21.434.337.465	21.434.337.465	0
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	86.118.248.590	20.347.308.663	(65.770.939.927)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.811.388.265.941	3.852.241.731.262	40.853.465.321

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

2.2.1 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah



(OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/ kegiatan.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2022 difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, yang meliputi: (1) Perencanaan yang tepat, (2) Penggunaan anggaran pada kebutuhan yang prioritas, (3) Pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati dan akuntabel, (4) Pengawasan dan pengendalian anggaran yang efektif, (5) Pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang disiplin. Sedangkan arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 adalah pada:

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, dalam wujud fasilitasi belanja penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya;
2. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga melalui stimulasi pembangunan ekonomi baik di sektor produktif maupun sarana dan prasarana wilayah;
4. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
5. Fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak termasuk untuk penanganan bencana;
6. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Kebijakan belanja daerah tersebut diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif.



Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 lebih difokuskan untuk pemulihan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Jember, penanganan pandemi Covid-19, pengurangan kemiskinan, pencapaian target IPM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat:

1. Pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005–2025 tahap IV;
2. Mempercepat pengimplementasian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Jember dan langkah strategis Pemerintah kabupaten Jember; dan
3. Melakukan monitoring pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.

2.2.2 Perubahan Penjabaran Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 semula Rp.4.397.793.785.319,00 bertambah sebesar Rp.23.967.771.763,00 atau 0,54% menjadi Rp.4.421.761.557.082,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi semula Rp.2.969.492.258.828,00 bertambah sebesar Rp.78.647.188.729,00 atau 2,65% menjadi Rp.3.048.139.447.557,00
- b. Belanja Modal semula Rp.904.465.910.444,00 berkurang sebesar Rp.48.723.919.375,00 atau 5,39% menjadi Rp.855.741.991.069,00
- c. Belanja Tak Terduga semula Rp.44.393.322.131,00 berkurang sebesar Rp.39.487.208.144,00 atau 88,95% menjadi Rp.4.906.113.987,00
- d. Belanja Transfer semula Rp.479.442.293.916,00 bertambah sebesar Rp.33.531.710.553,00 atau 6,99% menjadi Rp.512.974.004.469,00

Rincian Perubahan Penjabaran Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Penjabaran Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
2.1	BELANJA OPERASI	2.969.492.258.828,00	3.048.139.447.557,00	78.647.188.729,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.606.174.905.464,00	1.466.744.121.206,00	(139.430.784.258,00)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.224.747.006.747,00	1.438.380.097.591,00	213.633.090.844,00
2.1.5	Belanja Hibah	90.075.575.617,00	94.693.757.760,00	4.618.182.143,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	48.494.771.000,00	48.321.471.000,00	(173.300.000,00)
2.2	BELANJA MODAL	904.465.910.444,00	855.741.991.069,00	(48.723.919.375,00)
2.2.1	Belanja Modal tanah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.899.375.167	117.899.926.570	(2.999.448.597,00)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.288.472.383	125.374.831.437	(14.913.640.946,00)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	619.590.833.919	577.881.101.224	(41.709.732.695,00)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.687.228.975	34.586.131.838	10.898.902.863,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	44.393.322.131,00	4.906.113.987,00	(39.487.208.144,00)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	44.393.322.131	4.906.113.987	(39.487.208.144,00)
2.4	BELANJA TRANSFER	479.442.293.916,00	512.974.004.469,00	33.531.710.553,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.065.196.660	22.065.196.660	0,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	457.377.097.256	490.908.807.809	33.531.710.553,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.397.793.785.319,00	4.421.761.557.082,00	23.967.771.763,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

2.3.1 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan Daerah dan pengeluaran pembiayaan Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit atau surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah

dengan meningkatkan manajemen pembiayaan Daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran.

Salah satu sumber penerimaan daerah selain Pendapatan Daerah adalah Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diproyeksikan bersumber dari SILPA. Mempedomani Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa SILPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2.3.2 Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 semula Rp.586.480.519.378,00 berkurang sebesar Rp.16.960.693.558,00 atau 2,89% menjadi Rp. 569.519.825.820,00.

Rincian Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Penjabaran Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022

NO	PEMBIAYAAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	586.480.519.378,00	569.519.825.820,00	(16.960.693.558,00)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	586.480.519.378,00	569.519.825.820,00	(16.960.693.558,00)
Pembiayaan Netto		586.480.519.378,00	569.519.825.820,00	(16.960.693.558,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas. Hal itu

bermakna bahwa APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pelayanan publik semakin baik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.

APBD juga diarahkan pada pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan APBD Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 – 2020

URAIAN	TAHUN		
	2018	2019	2020
Pendapatan	3.601.294.429.685,50	3.815.931.626.881,96	3.665.003.964.118,68
Pendapatan Asli Daerah	609.304.818.610,50	667.598.426.909,96	660.367.999.055,62
Pendapatan Transfer	2.380.522.046.000,00	2.402.647.387.288,00	2.240.229.530.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	611.467.565.075,00	745.685.812.684,00	764.406.435.063,06
Belanja	4.163.624.940.931,97	3.876.912.578.274,08	4.271.921.483.957,88
Belanja Tidak Langsung	2.049.530.240.244,35	2.000.732.096.702,49	2.673.960.829.952,36
Belanja Langsung	2.114.094.700.687,62	1.876.180.481.571,59	1.597.960.654.005

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
(Sesuai Nomenklatur dalam Permendagri No 13 Th 2006 beserta perubahannya)*

Tabel 2.6
Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021-2022

URAIAN	TAHUN	
	2021	2022
Pendapatan	3.681.432.575.560,00	3.852.241.731.262,00
Pendapatan Asli Daerah	719.879.915.600,00	694.849.881.962,00
Pendapatan Transfer	2.743.316.319.429,00	3.115.610.203.172,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	218.236.340.531,00	41.781.646.128,00
Belanja	4.376.974.822.454,00	4.421.761.557.082,00
Belanja Operasi	3.121.862.751.642,00	3.048.139.447.557,00
Belanja Modal	735.350.920.728,00	855.741.991.069,00



URAIAN	TAHUN	
	2021	2022
Belanja Tidak Terduga	40.357.565.574,00	4.906.113.987,00
Belanja Transfer	519.761.150.084,00	512.974.004.469,00

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
(Sesuai Nomenklatur dalam Permendagri no 77 Tahun 2020)*

APBD Kabupaten Jember setiap tahunnya harus tetap ditujukan untuk belanja pelayanan dasar/publik yang berorientasi pada rakyat, sebagai upaya mencapai sasaran untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat Jember.

APBD Kabupaten Jember harus secara konsisten diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan agar mampu memecahkan persoalan-persoalan sosial yang mendasar, terutama pengangguran dan kemiskinan, serta mempertahankan stabilitas ekonomi.

3

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah



Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya, pembagian urusan juga mengalami penyesuaian yaitu Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, meliputi bidang urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, Kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi bidang urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.



Urusan Pemerintahan juga terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan), Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah), Unsur Kewilayahan (Kecamatan) dan Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik).

Berikut adalah Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta capaian Indikator Kinerja yang disusun berdasarkan urusan :



3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Berikut adalah Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2022 yang mencakup Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja yang telah disusun:

Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.0.00 .0.00.1..0 000		DINAS PENDIDIKAN									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1.01.01.2 .01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.01.01.2 .01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp. 834.960.650	2	Rp. 780.030.424	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.01.2 .01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Rp. 531.121.050	1	Rp. 287.845.405	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15626	Rp. 684.172.381.652	15075	Rp. 660.076.616.934	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.01.2 .02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Rp. 91.023.351.889	2	Rp. 89.401.289.290	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera merealisasikan peningkatan kesejahteraan GTT/PTT dengan merevisi kebijakan honor agar lebih sesuai dengan UMR dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah.
1.01.01.2 .03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
1.01.01.2 .03.05				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Rp. 231.208.630	1	Rp. 192.317.147	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.01.2 .06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1.01.01.2 .06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp. 21.045.090	1	Rp. 20.054.700	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.01.2 .06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp. 204.578.070	1	Rp. 192.416.100	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.01.2 .06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Rp. 263.675.760	1	Rp. 214.789.000	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.01.2 .06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Rp. 34.379.400	1	Rp. 33.560.850	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.01.2 .06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	Rp. 8.100.000	0	Rp. 0	Kegiatan tidak dilaksanakan	Kegiatan tidak dilaksanakan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Rp. 512.570.000	1	Rp. 249.164.900	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.01.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp. 8.910.000	1	Rp. 2.800.000	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Rp. 305.197.824	3	Rp. 243.190.328	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	Rp. 64.530.400	6	Rp. 40.960.354	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110	Rp. 547.555.100	63	Rp. 312.118.459	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Rp. 151.000.000	92	Rp. 138.905.280	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Rp. 300.260.000	9	Rp. 225.790.573	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan ormas keagamaan (NU dan Muhammadiyah) serta lembaga pondok pesantren dan lembaga lainnya yang mempunyai konsen dan perhatian terhadap masalah pendidikan untuk mewujudkan pendidikan merata dan peningkatan IPM.
1.01.01.2.05				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH							
1.01.02			MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
1.01.02.2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							
1.01.02.2.01.02				Penambahan Ruang Kelas Baru	1	Rp. 3.912.087.000	1	Rp. 3.842.086.133	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.01.04				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4	Rp. 378.995.002	4	Rp. 396.023.500	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.01.06				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3	Rp. 448.995.001	3	Rp. 447.695.000	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjnt Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.02.2 .01.24				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	1036	Rp. 253.381.448	934	Rp. 228.272.250	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2 .01.25				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200	Rp. 174.580.700	199	Rp. 172.698.014	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2 .01.27				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1200	Rp. 15.937.370.00 0	1130	Rp. 15.005.042.64 0	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong pemerataan pendidikan pada kelembagaan formal, nonformal dan informal, baik berupa pendidikan agama seperti madrasah, pondok pesantren, TPQ, Madrasah Diniyah, taman belajar dan sebagainya.
1.01.02.2 .01.29				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1036	Rp. 163.068.169.6 90	889	Rp. 139.934.454.8 39	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2 .01.30				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	65	Rp. 160.452.120	59	Rp. 145.283.036	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2 .01.08				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	17	Rp. 1.763.652.500	17	Rp. 1.749.358.094	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2 .01.22				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	124	Rp. 19.468.721.25 2	123	Rp. 19.320.143.56 0	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2 .01.23				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1036	Rp. 57.532.500	940	Rp. 52.229.700	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.02.2.01.31				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	11	Rp. 2.376.985.000	11	Rp. 2.370.915.000	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.02				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
1.01.02.2.02.35				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	25	Rp. 4.128.586.200	25	Rp. 4.123.816.200	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.02.37				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	94	Rp. 496.871.720	91	Rp. 483.751.680	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.02.38				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	10000	Rp. 44.392.407.750	9709	Rp. 43.098.617.740	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus membuka kriteria seleksi beasiswa serta akses data penerima beasiswa pendidikan sekaligus besaran anggaran yang sudah dikeluarkan kepada publik. Penerima beasiswa harus diprioritaskan pada peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik terutama pada Guru Honorer, GTT, PTT.
1.01.02.2.02.42				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	94	Rp. 85.420.770.470	55	Rp. 50.162.903.159	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.02.2.02.43				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	21	Rp. 80.229.170	18	Rp. 66.501.540	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.02.06				Pembangunan Laboratorium	6	Rp. 2.350.517.400	6	Rp. 2.248.650.050	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.02.12				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13	Rp. 3.217.655.000	13	Rp. 3.208.013.000	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.02.36				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	71102	Rp. 96.427.700	65980	Rp. 89.481.600	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.02.02				Penambahan Ruang Kelas Baru	2	Rp. 313.500.000	2	Rp. 313.410.000	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.03				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
1.01.02.2.03.01				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	4	Rp. 512.697.120	4	Rp. 492.198.720	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.03.02				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	27	Rp. 3.218.212.010	27	Rp. 3.213.527.000	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.03.11				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1000	Rp. 73.151.700	695	Rp. 50.821.000	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.03.12				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	250	Rp. 1.074.329.630	250	Rp. 1.072.807.000	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.02.2.03.15				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	6108	Rp. 22.890.011.664	5704	Rp. 21.373.938.800	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong pemerataan pendidikan pada kelembagaan formal, nonformal dan informal, baik berupa pendidikan agama seperti madrasah, pondok pesantren, TPQ, Madrasah Diniyah, taman belajar dan sebagainya.
1.01.02.2.03.18				Pengelolaan Dana BOP PAUD	1877	Rp. 42.000.000.000	1034	Rp. 23.128.888.000	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.03.19				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	11	Rp. 34.143.000	8	Rp. 24.469.701	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2.04				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.02.2 .04.12				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1000	Rp. 57.652.600	959	Rp. 55.280.000	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan kembali pendataan Kelompok umur dewasa maupun tua (25 tahun keatas) yang dulunya belum mendapat tingkat pendidikan yang baik dan menyiapkan program pendidikan Non Formal (PNF) yang memuat konten keaksaraan fungsional (kejar paket) atau konten muatan ketrampilan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau pemerintahan desa melalui komunitas belajar masyarakat (KBM).
1.01.02.2 .04.17				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	14	Rp. 1.888.400.000	7	Rp. 956.530.000	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.02.2 .04.18				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11	Rp. 42.133.950	5	Rp. 19.219.500	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.04			MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
1.01.04.2.01				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
1.01.04.2.01.01				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	Rp. 185.467.050	1	Rp. 137.333.700	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memikirkan nasib GTT yang melebihi batas usia 35 tahun dengan mempertimbangkan masa pengabdian untuk prioritas dimasukkan dalam formasi ASN dengan P3K.
1.01.04.2.01.02				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	Rp. 39.642.540	2	Rp. 37.390.418	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.01.03			MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							
1.01.03.2.01				PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR							
1.01.03.2.01.04				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	750	Rp. 103.513.600	606	Rp. 83.614.652	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.0.00 .000.1..0 000		DINAS KESEHATAN									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1.02.01.2 .01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.02.01.2 .01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Rp. 113.833.674	100	Rp. 106.767.195	kegiatan sudah sesuai rencana	sesuai	
1.02.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.02.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 120.919.546.659	100	Rp. 115.891.780.311	sesuai	target sudah tercapai	
1.02.01.2 .02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Rp. 6.343.769.800	100	Rp. 5.357.463.373	sesuai	target sudah tercapai	
1.02.01.2 .06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1.02.01.2 .06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Rp. 24.911.040	100	Rp. 24.605.703	sesuai	target sudah tercapai	
1.02.01.2 .06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 239.438.540	100	Rp. 237.040.100	sesuai	target sudah tercapai	
1.02.01.2 .06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	Rp. 231.187.300	100	Rp. 140.939.850	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	target sudah tercapai	
1.02.01.2 .06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	Rp. 15.075.650	100	Rp. 14.325.045	kegiatan sudah sesuai rencana	target sudah tercapai	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.01.2.06.08				Fasilitas Kunjungan Tamu	100	Rp. 287.770.000	100	Rp. 174.318.000	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	target sudah tercapai	
1.02.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Rp. 484.888.000	100	Rp. 390.525.215	kegiatan sudah sesuai rencana	target sudah tercapai	
1.02.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.02.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Rp. 17.800.000	100	Rp. 17.800.000	sesuai	sesuai	
1.02.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Rp. 461.250.000	100	Rp. 360.955.281	sesuai	sesuai	
1.02.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 209.984.000	100	Rp. 146.685.000	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	target sudah tercapai	
1.02.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.02.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 94.627.000	100	Rp. 66.835.300	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	target sudah tercapai	
1.02.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 410.999.450	100	Rp. 326.987.280	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	target sudah tercapai	
1.02.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	Rp. 30.430.000	100	Rp. 30.290.848	kegiatan sudah sesuai rencana	target sudah tercapai	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutt Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.02			MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1.02.02.2.01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
1.02.02.2.01.10				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	65	Rp. 5.965.234.200	65	Rp. 5.784.793.492	kegiatan sudah sesuai rencana	sesuai	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kesehatan yang memenuhi standart layanan dalam upaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dengan menaikkan status POLINDES untuk dijadikan PONKESDES sebagaimana RPJMD.
1.02.02.2.01.14				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	Rp. 31.452.208.812	100	Rp. 29.783.754.179	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	target sudah tercapai	
1.02.02.2.01.15				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	80	Rp. 40.000.000	80	Rp. 37.758.000	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	target sudah tercapai	
1.02.02.2.01.16				Pengadaan Obat, Vaksin	100	Rp. 6.510.575.984	100	Rp. 4.096.891.670	kegiatan sudah sesuai rencana	sesuai	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.02.2.01.17				Pengadaan Bahan Habis Pakai	100	Rp. 7.496.263.603	100	Rp. 6.391.098.615	kegiatan sudah sesuai rencana	sesuai	
1.02.02.2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1.02.02.2.02.01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	Rp. 797.127.753	79	Rp. 649.113.640	kegiatan sudah sesuai rencana	sesuai	
1.02.02.2.02.02				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	Rp. 1.250.680.000	91	Rp. 829.300.000	kegiatan sudah sesuai rencana	target sudah tercapai	
1.02.02.2.02.04				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100	Rp. 1.236.793.680	81	Rp. 743.056.564	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	sesuai	
1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50	Rp. 4.821.407.840	50	Rp. 4.685.172.235	kegiatan sudah sesuai rencana	target sudah tercapai	
1.02.02.2.02.19				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	50	Rp. 525.232.882	50	Rp. 493.816.882	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	target sudah tercapai	
1.02.02.2.02.25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	75	Rp. 7.540.728.213	75	Rp. 7.071.709.497	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	target sudah tercapai	
1.02.02.2.02.26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12300	Rp. 193.560.417.548	11000	Rp. 182.372.308.371	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	sesuai	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mendapatkan jaminan layanan kesehatan secara Mandiri.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.02.2.02.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	Rp. 3.348.109.654	92	Rp. 1.689.955.975	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	sesuai	
1.02.02.2.03				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							
1.02.02.2.03.02				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50	Rp. 36.196.030	50	Rp. 30.914.480	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	sesuai	
1.02.02.2.04				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.02.2 .04.03				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	15	Rp. 2.545.417.496	17	Rp. 2.452.459.482	kegiatan sudah sesuai rencana	sesuai	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional pada masyarakat dengan mempertimbangkan prioritas warga yang benar-benar membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan serta mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan baik di puskesmas atau rumah sakit rujukan milik pemerintah sebagai prioritas untuk pemberian pelayanan pasien rujukan atas pendanaan dari sistem jaminan kesehatan yang bersumberkan dari APBD.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.02.2 .04.04				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100	Rp. 7.177.428.454	100	Rp. 6.973.188.900	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	sesuai	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional pada masyarakat dengan mempertimbangkan prioritas warga yang benar-benar membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan serta mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan baik di puskesmas atau rumah sakit rujukan milik pemerintah sebagai prioritas untuk pemberian pelayanan pasien rujukan atas pendanaan dari sistem jaminan kesehatan yang bersumberkan dari APBD.
1.02.03			MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
1.02.03.2 .02				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.03.2 .02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	54	Rp. 7.473.902.400	54	Rp. 6.969.485.615	kegiatan sudah sesuai rencana	sesuai	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera melakukan dan menyampaikan pemetaan kebutuhan ideal tenaga kesehatan dan sekaligus segera menyusun program atau formasi untuk penentuannya. b) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menghitung alokasi honor yang ideal bagi tenaga kesehatan dan sesuai dengan standart UMR dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah serta mengusulkan formasi atau quota perawat untuk diangkat menjadi ASN PPPK bertahap serta dukungan pemda agar KEMENPANRB memberikan afirmasi point pada perawat yang telah bekerja dan mengabdikan di pemerintahan daerah.
1.02.04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
1.02.04.2 .03				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Dip							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.04.2.03.01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30	Rp. 406.874.000	30	Rp. 309.216.294	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	sesuai	
1.02.05			MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
1.02.05.2.01				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1.02.05.2.01.01				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	84	Rp. 52.080.771.700	84	Rp. 41.893.415.777	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan	sesuai	Pemerintah Daerah harus mendorong inovasi pelayanan kesehatan dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat sekaligus mendorong paradigma pola hidup sehat untuk mencegah sakit dari pada pelayanan ketika sudah sakit kepada masyarakat.
1.02.0.00.0.00.2.000			RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1.02.01.2				PENINGKATAN PELAYANAN BLUD							
1.02.01.2				PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	100	Rp. 74.077.666.035	93	Rp. 68.758.975.721	0	0	
1.02.0.00		RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD									
1.00.3..0000											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1.02.01.2				PENINGKATAN PELAYANAN BLUD							
1.02.01.2				PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	100	Rp. 253.096.900.294	86	Rp. 217.412.161.331	0	0	
1.02.0.00		RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD									
1.00.4..0000											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1.02.01.2				PENINGKATAN PELAYANAN BLUD							
1.02.01.2				PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	100	Rp. 40.741.191.967	65	Rp. 26.724.615.152	0	0	
1.03.0.00		DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR									
1.00.1..0000											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.03.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Rp. 26.894.900	3	Rp. 13.740.050	'Target kegiatan sudah tercapai pada TW-IV dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.03.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 49.924.545.502	14	Rp. 44.820.111.225	'Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan. (jumlah karyawan)	'pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600	Rp. 4.589.151.600	599	Rp. 4.266.767.000	-	-	
1.03.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1.03.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200	Rp. 14.045.950	175	Rp. 14.045.950	-	-	
1.03.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41	Rp. 327.555.509	29	Rp. 309.018.220	Target belum tercapai secara maksimal karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.	
1.03.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Rp. 161.178.160	12	Rp. 134.348.750	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	'pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5400	Rp. 49.475.000	3112	Rp. 28.520.350	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.	
1.03.01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12	Rp. 13.000.000	12	Rp. 13.000.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp. 163.450.000	12	Rp. 95.789.000	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1.03.01.2.07.03				Pengadaan Alat Besar	1	Rp. 16.370.100	1	Rp. 15.936.300	-	-	
1.03.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	Rp. 198.793.351	4	Rp. 101.250.000	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01.2 .08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 314.000.000	12	Rp. 280.533.329	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Rp. 258.065.586	12	Rp. 95.983.585	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 576.897.600	12	Rp. 478.113.971	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 528.286.565	1	Rp. 41.029.277	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Rp. 940.155.420	1	Rp. 719.950.015	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .09.03				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	53	Rp. 993.194.569	23	Rp. 305.312.265	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.ikan kembali sesuai dengan kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01.2 .09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9	Rp. 298.435.352	5	Rp. 156.530.000	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.	
1.03.01.2 .09.11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80	Rp. 1.823.884.123	6	Rp. 1.819.577.966	Target belum tercapai secara maksimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan.	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.	
1.03.02		MENINGKATNYA KUALITAS PRASARANA WILAYAH KABUPATEN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
1.03.02.2 .01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.02.2 .01.61				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Rp. 950.000.000	38	Rp. 741.624.829	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.02.2.01.62				Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Rp. 200.487.268	32	Rp. 86.893.190	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.	
1.03.02.2.01.46				Normalisasi/Restorasi Sungai	10	Rp. 730.159.620	1	Rp. 724.321.234	Target belum tercapai secara maksimal karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.	
1.03.02.2.02				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1.03.02.2.02.01				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	3600	Rp. 329.482.180	2757	Rp. 252.461.169	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.	
1.03.02.2.02.14				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1553	Rp. 2.169.191.477	1535	Rp. 8.139.010.927	-	-	
1.03.02.2.02.15				Rehabilitasi Bendung Irigasi	4	Rp. 3.036.123.319	4	Rp. 2.947.823.319	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.02.2.02.21				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	69511	Rp. 1.336.036.835	5690	Rp. 1.093.948.924	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan	
1.03.02.2.02.08				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1553	Rp. 2.169.191.477	1550	Rp. 2.166.184.907	-	-	
1.03.06			MENINGKATNYA KUALITAS PRASARANA WILAYAH KABUPATEN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							
1.03.06.2.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							
1.03.06.2.01.05				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	639	Rp. 294.728.482	297	Rp. 137.021.145	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.06.2 .01.09				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	18800	Rp. 1.660.000.000	18800	Rp. 1.635.607.639	Ada kelebihan realisasi kinerja sebesar 1287 meter karena ada penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini ketika P-APBD sebesar Rp 1.160.000.000	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.	
1.03.07			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							
1.03.07.2 .01				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							
1.03.07.2 .01.04				Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	226	Rp. 500.000.000	212	Rp. 469.214.805	-	-	
1.03.10			MENINGKATNYA KUALITAS PRASARANA WILAYAH KABUPATEN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
1.03.10.2 .01				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.10.2 .01.02				Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	4000	Rp. 655.594.652	1203	Rp. 197.549.965	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan	
1.03.10.2 .01.04				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2695	Rp. 912.458.600	2055	Rp. 719.044.904	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan	
1.03.10.2 .01.05				Pembangunan Jalan	1002301	Rp. 533.848.841.771	997899	Rp. 531.505.655.059	-	-	
1.03.10.2 .01.11				Pemeliharaan Rutin Jalan	10000	Rp. 2.467.003.423	9968	Rp. 2.459.806.817	-	-	
1.03.10.2 .01.18				Rehabilitasi Jembatan	27	Rp. 6.619.114.026	5	Rp. 6.591.621.550	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjnut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.10.2.01.19				Pemeliharaan Rutin Jembatan	80	Rp. 1.267.779.424	7	Rp. 1.205.429.944	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan	
1.03.1.04.2.10.1..000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1.03.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.03.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Rp. 612.151.290	10	Rp. 329.433.325	*Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1442	Rp. 7.813.524.292	1442	Rp. 7.660.685.489	'Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan. (jumlah karyawan)	'pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp. 11.455.460	1	Rp. 7.577.794	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .02.08				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Rp. 108.473.520	12	Rp. 75.994.127	'Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01.2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
1.03.01.2.03.06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Rp. 52.882.780	2	Rp. 48.743.389	-	-	
1.03.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1.03.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Rp. 31.501.580	4	Rp. 28.902.873	-	-	
1.03.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Rp. 310.386.080	4	Rp. 281.701.477	Target belum tercapai secara maksimal karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.	
1.03.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Rp. 64.423.880	4	Rp. 59.838.583	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01.2 .06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	Rp. 37.669.500	4	Rp. 30.156.232	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.	
1.03.01.2 .06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Rp. 156.230.000	4	Rp. 120.902.870	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.03.01.2 .08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp. 25.573.240	12	Rp. 22.853.387	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01.2 .08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 43.841.052.714	12	Rp. 43.828.364.987	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Rp. 125.059.070	4	Rp. 80.340.165	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	Rp. 3.733.766.136	13	Rp. 3.465.600.290	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	Rp. 78.394.370	4	Rp. 68.959.396	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252	Rp. 1.782.264.165	252	Rp. 1.652.752.835	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01.2 .09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Rp. 255.923.700	4	Rp. 250.911.710	-	-	
1.03.01.2 .09.11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Rp. 116.100.000	2	Rp. 114.676.000	Target belum tercapai secara maksimal karena menyesuaikan dengan kebutuhan.	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan.	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.03			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
1.03.03.2.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							
1.03.03.2.01.04				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	588	Rp. 4.735.385.516	588	Rp. 4.671.174.346	-	-	
1.03.03.2.01.11				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	20	Rp. 470.035.029	20	Rp. 468.575.421	-	-	
1.03.03.2.01.19				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500	Rp. 1.290.129.913	500	Rp. 1.273.363.080	-	-	
1.03.03.2.01.07				Perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan	20	Rp. 250.009.144	20	Rp. 233.800.000	-	-	
1.03.05			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
1.03.05.2.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							
1.03.05.2.01.06				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	870	Rp. 8.953.043.825	870	Rp. 8.267.790.712	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.05.2.01.15				Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1800	Rp. 803.638.360	1800	Rp. 558.575.213	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.08			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
1.03.08.2.01				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							
1.03.08.2.01.01				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1050	Rp. 1.611.692.498	1050	Rp. 1.376.225.193	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.08.2.01.02				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4	Rp. 362.178.700	4	Rp. 312.452.985	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.08.2.01.13				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	25	Rp. 11.892.933.800	25	Rp. 11.682.663.150	-	-	
1.03.12			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
1.03.12.2.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
1.03.12.2.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
1.03.12.2.03.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	4	Rp. 183.790.500	4	Rp. 107.240.911	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.12.2.04				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
1.03.12.2.04.04				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4	Rp. 303.207.590	4	Rp. 166.256.692	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.12.2.01				PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA							
1.03.12.2.01.01				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	4	Rp. 509.097.000	4	Rp. 434.311.231	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mengakselerasi dan menjelaskan progres penyusunan kebijakan penataan Ruang RTRW dan RDTR



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.12.2 .01.02				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2	Rp. 11.053.000	2	Rp. 3.354.545	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.03.10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
1.03.10.2 .01				PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA							
1.03.10.2 .01.05				Pembangunan Jalan	137	Rp. 32.340.960.000	137	Rp. 31.621.914.500	-	-	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.03			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
1.04.03.2 .01				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.04.03.2 .01.01				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	20	Rp. 331.541.410	20	Rp. 92.678.852	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.04.03.2 .02				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							
1.04.03.2 .02.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4	Rp. 628.771.850	4	Rp. 452.739.429	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.04.03.2 .03				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.04.03.2 .03.02				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	600	Rp. 254.728.700	600	Rp. 219.335.989	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mempertegas pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sesuai dengan mekanisme yang disepakati yaitu dalam bentuk hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2018 Pasal 23 A, pemberian bantuan sosial yang diserahkan pada individu/keluarga harus disampaikan nama, alamat dan besaran bantuan sosial yang diberikan. b) Dalam penentuan sasaran dan pendataan rumah tidak layak huni harus mengoptimalkan fungsi Tim fasilitator Lapangan (TFL), RW/RT, dan pemerintahan desa, serta membubarkan keberadaan tim yang pembentukannya tidak diatur dalam ketentuan dan
1.04.05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
1.04.05.2 .01				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.04.05.2 .01.02				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	31	Rp. 102.726.076.1 63	31	Rp. 101.697.540.2 03	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek terutama pada program multiyears agar tepat waktu sesuai dengan target yang ditentukan.
1.04.02		MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
1.04.02.2 .03			PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA								
1.04.02.2 .03.01				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5	Rp. 150.000.000	5	Rp. 100.000.000	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.10		MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERMUKIMAN MASYARAKAT	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.10.10.2.01				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota							
2.10.10.2.01.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	4	Rp. 399.071.793	4	Rp. 227.491.725	Target kegiatan sudah tercapai dan Penyerapan Anggaran untuk kegiatan tidak maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.	pada tahun berikutnya anggaran akan diproyeksikan kembali sesuai dengan kebutuhan	
1.05.0.00.0.00.1.0.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1.05.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.05.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.05.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	111	Rp. 11.777.497.702	111	Rp. 11.491.694.126	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 256.799.000	12	Rp. 211.894.000	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1.05.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Rp. 3.602.720	4	Rp. 3.595.800	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp. 66.204.628	1	Rp. 45.342.000	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp. 1.719.300	4	Rp. 1.550.200	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Rp. 58.529.650	12	Rp. 54.447.500	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Rp. 11.524.100	6	Rp. 9.303.300	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp. 146.924.000	12	Rp. 118.627.935	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 11.845.000	12	Rp. 7.716.998	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Rp. 13.696.300	12	Rp. 13.575.000	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 3.498.123.250	12	Rp. 3.486.804.030	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 41.044.350	1	Rp. 25.678.390	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17	Rp. 259.981.109	17	Rp. 210.982.146	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.02		TERJAGANYA KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
1.05.02.2.01			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1.05.02.2.01.01				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9	Rp. 148.639.200	9	Rp. 130.323.500	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera melakukan penataan PKL sebagaimana yang dijanjikan dalam RPJMD, maupun RKPD.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.02.2.01.03				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	11	Rp. 193.371.000	11	Rp. 189.862.940	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.02.2.01.04				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Rp. 92.141.834	1	Rp. 19.027.000	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.02.2.02				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1.05.02.2.02.01				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2	Rp. 5.086.540.650	2	Rp. 3.751.496.650	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.02.2.02.02				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6	Rp. 66.423.400	6	Rp. 5.625.000	kegiatan menunggu ada laporan pengaduan	kegiatan tetap jalan	
1.05.02.2.02.03				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30	Rp. 2.271.736.000	30	Rp. 1.002.831.500	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan berjalan belum ada penyerapakegiatan berjalan belum ada penyerapa	
1.05.03			MENINGKATNYA KAPASITAS PENANGANAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
1.05.03.2.02				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.03.2.02.02				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	248	Rp. 89.253.656	248	Rp. 58.934.005	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan bencana serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas bencana.
1.05.04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							
1.05.04.2.01				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
1.05.04.2.01.01				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8	Rp. 1.036.712.900	8	Rp. 923.274.000	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.04.2.01.02				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50	Rp. 465.569.500	50	Rp. 317.356.178	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.4.01.0.00.1..0000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.05.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1.05.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.05.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp. 8.500.300	2	Rp. 4.950.960	0	0	
1.05.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp. 3.577.764	1	Rp. 0	0	0	
1.05.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Rp. 6.583.800	1	Rp. 0	0	0	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01.2 .01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Rp. 3.451.800	1	Rp. 0	Kegiatan dapat dilaksanakan, akan tetapi anggaran honorarium tidak dapat diserap dikarenakan pegawai telah mendapatkan TPP	Nihil	
1.05.01.2 .01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Rp. 3.439.260	1	Rp. 0	Kegiatan dapat dilaksanakan, akan tetapi anggaran honorarium tidak dapat diserap dikarenakan pegawai telah mendapatkan TPP	Nihil	
1.05.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.05.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 4.487.742.610	14	Rp. 4.287.042.322	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2 .02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 285.670.000	12	Rp. 251.290.000	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2 .02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp. 9.823.530	1	Rp. 6.750.000	nihil	Nihil	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01.2.02.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Rp. 9.880.600	12	Rp. 6.750.000	Kegiatan dapat dilaksanakan, akan tetapi anggaran honorarium tidak dapat diserap dikarenakan pegawai telah mendapatkan TPP	Nihil	
1.05.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1.05.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	Rp. 230.000.000	100	Rp. 134.853.900	0	0	
1.05.01.2.05.05				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13	Rp. 1.238.970.000	10	Rp. 1.169.132.661	Nihil	Nihil	
1.05.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1.05.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp. 18.700.810	1	Rp. 17.988.644	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp. 46.232.130	1	Rp. 45.521.900	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	Rp. 292.543.630	12	Rp. 236.681.950	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Rp. 180.070.000	12	Rp. 133.998.000	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	Rp. 20.997.650	1	Rp. 3.290.800	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Rp. 195.990.000	2	Rp. 195.955.072	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp. 5.768.000	1	Rp. 2.900.000	Nihil	Nihil	
1.05.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	Rp. 173.628.000	2	Rp. 80.181.463	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	Rp. 26.000.000	2	Rp. 26.000.000	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 77.879.300	1	Rp. 44.973.287	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27	Rp. 732.721.750	27	Rp. 494.712.905	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	
1.05.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Rp. 33.129.000	10	Rp. 10.706.526	Nihil	Nihil	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp. 120.866.220	1	Rp. 113.587.370	Nihil	Nihil	
1.05.03		MENINGKATNYA KAPASITAS PENANGANAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
1.05.03.2.01				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							
1.05.03.2.01.01				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1	Rp. 222.132.250	1	Rp. 181.350.000	Nihil	Nihil	
1.05.03.2.01.02				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	200	Rp. 114.797.170	200	Rp. 92.388.860	Nihil	Nihil	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan bencana serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas bencana.
1.05.03.2.02				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							
1.05.03.2.02.01				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	Rp. 153.720.000	1	Rp. 115.685.000	Nihil	Nihil	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.03.2.02.02				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	200	Rp. 498.253.010	200	Rp. 248.824.412	kegiatan termasuk wajib dan mengikat	kegiatan tetap dilaksanakan tanpa ada kendala	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan bencana serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas bencana. b) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan sosial, konflik dan keamanan serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas terjadinya konflik sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban.
1.05.03.2.02.03				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	Rp. 82.034.000	9	Rp. 63.812.600	Nihil	Nihil	
1.05.03.2.02.04				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	10	Rp. 132.716.550	7	Rp. 118.966.500	Nihil	Nihil	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.03.2 .02.06				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2	Rp. 217.753.870	2	Rp. 178.203.100	Nihil	Nihil	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan bencana serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas bencana. b) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan sosial, konflik dan keamanan serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas terjadinya konflik sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban.
1.05.03.2 .02.07				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	4	Rp. 426.910.000	4	Rp. 294.429.550	Nihil	Nihil	
1.05.03.2 .02.08				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	25	Rp. 95.513.700	25	Rp. 78.340.000	Nihil	Nihil	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.03.2.02.10				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Rp. 232.764.000	1	Rp. 178.846.374	Nihil	Nihil	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan bencana serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas bencana. b) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan sosial, konflik dan keamanan serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas terjadinya konflik sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban.
1.05.03.2.03				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
1.05.03.2.03.02				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2	Rp. 346.480.000	2	Rp. 252.017.600	Nihil	Nihil	
1.05.03.2.03.04				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1000	Rp. 447.954.300	1000	Rp. 375.279.751	Nihil	Nihil	
1.05.03.2.03.06				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1	Rp. 119.566.700	1	Rp. 115.263.400	Nihil	Nihil	
1.06.0.00.0.00.1..0000		DINAS SOSIAL									



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1.06.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp. 65.500.000	5	Rp. 52.150.000	Merupakan Kegiatan Rutin Kantor dalam hal ini dilaksanakan berdasarkan pengajuan dari masyarakat untuk mengajukan permohonan rekomendasi ijin survei Pemondokan	Menunggu surat usulan pengajuan survei / ijin Rumah Rumah Pemondokan	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1.06.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26	Rp. 4.541.433.574	26	Rp. 3.913.063.960	Merupakan kegiatan rutin Kantor	Melengkapi Administrasi dan Teknis yang dibutuhkan untuk penyerapan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.01.2 .06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp. 15.062.300	1	Rp. 14.932.500	Merupakan kegiatan rutin Kantor	Melengkapi Administrasi dan Teknis yang dibutuhkan untuk penyerapan penyediaan Alat listrik yang dibutuhkan kantor Dinas Sosial	
1.06.01.2 .06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Rp. 54.186.100	1	Rp. 54.186.100	Merupakan kegiatan rutin Kantor	Melengkapi Administrasi dan Teknis yang dibutuhkan untuk penyerapan penyediaan Rumah Tangga yang dibutuhkan kantor Dinas Sosial	
1.06.01.2 .06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Rp. 57.945.993	1	Rp. 57.945.993	0	0	
1.06.01.2 .06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	Rp. 1.500.000	1	Rp. 1.500.000	Merupakan kegiatan rutin Kantor	Melengkapi Administrasi dan Teknis yang dibutuhkan untuk penyerapan penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp. 185.945.200	1	Rp. 185.945.200	Merupakan kegiatan rutin Kantor	Melengkapi Administrasi dan Teknis yang dibutuhkan untuk penyerapan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
1.06.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.06.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2184	Rp. 4.500.000	1980	Rp. 3.500.000	Merupakan kegiatan rutin Kantor	Melengkapi Administrasi dan Teknis yang dibutuhkan untuk penyerapan penyediaan Jasa Surat menyurat	
1.06.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 212.804.334	12	Rp. 212.804.334	Merupakan kegiatan rutin Kantor	Melengkapi Administrasi dan Teknis yang dibutuhkan untuk penyerapan penyediaan Tagihan Telepon, Air, Listrik	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 3.072.301.400	12	Rp. 3.052.383.959	Merupakan kegiatan rutin Kantor	Melengkapi Administrasi dan Teknis yang dibutuhkan untuk penyerapan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1.06.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.06.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Rp. 105.800.000	3	Rp. 101.972.284	Merupakan kegiatan rutin Kantor	Melengkapi Administrasi dan Teknis yang dibutuhkan untuk penyerapan Jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.01.2 .09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15	Rp. 321.153.750	15	Rp. 272.992.258	Merupakan kegiatan rutin Kantor	Melengkapi Administrasi dan Teknis yang dibutuhkan untuk penyerapan Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1.06.01.2 .09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25	Rp. 43.260.000	25	Rp. 43.260.000	Merupakan kegiatan rutin Kantor	Melengkapi Administrasi dan Teknis yang dibutuhkan untuk penyerapan penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya	
1.06.01.2 .09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Rp. 27.207.500	1	Rp. 26.988.500	Merupakan kegiatan rutin Kantor	Melengkapi Administrasi dan Teknis yang dibutuhkan untuk penyerapan penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.02			MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL LAINNYA	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
1.06.02.2.03				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							
1.06.02.2.03.01				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6000	Rp. 233.788.200	6000	Rp. 222.039.950	Penjadwalan kegiatan pemberian bantuan	pemberian bantuan juga mengikuti jadwal Bupati	
1.06.02.2.03.04				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	16	Rp. 658.861.000	16	Rp. 658.861.000	Kegiatan pemberian bantuan yang dilaksanakan menunggu hasil koordinasi dengan bidang lain	Dilaksanakan pemberian bantuan bekerja sama dengan bidang lain dan disesuaikan dengan jadwal bupati	
1.06.04			MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL LAINNYA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
1.06.04.2.01				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.04.2 .01.05				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	40	Rp. 1.509.317.800	40	Rp. 1.509.317.800	Pemberian bantuan dan pelayanan sosial bagi PMKS/Klien Liposos Dinas Sosial Kab Jember	Bantuan dan pelayanan kesehatan, pemberian makan minum pada klien, pemberian sandang dan bimbingan sosial	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih serius dalam penanganan dan kepedulian terhadap disabilitas dengan mengimplementasikan secara maksimal pelaksanaan perda disabilitas serta peraturan bupati terkait disabilitas.
1.06.04.2 .01.06				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	412	Rp. 1.067.127.000	412	Rp. 1.067.127.000	Kegiatan assesment terhadap calon penerima bantuan	Pemberian bantuan juga melibatkan pilar dan perangkat desa agar kegiatan berjalan maksimal	
1.06.04.2 .01.10				Pemberian Layanan Kedaruratan	70	Rp. 24.040.000	57,34	Rp. 13.785.000	0	0	
1.06.04.2 .01.01				Penyediaan Permakanan	1000	Rp. 1.111.773.000	1000	Rp. 864.399.210	Asesment dan monev terhadap calon penerima bantuan	pemberian bantuan diberikan secara bertahap	
1.06.04.2 .01.03				Penyediaan Alat Bantu	1000	Rp. 107.000.000	1000	Rp. 101.087.700	0	0	
1.06.04.2 .02				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.04.2 .02.03				Penyediaan Permakanan	12	Rp. 288.360.000	12	Rp. 188.590.000	Anggaran tidak semua direalisasi	Anggaran digeser untuk kegiatan lain	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengoptimalkan kordinasi penanganan kemiskinan dengan segera membentuk dan mengoptimalkan fungsi Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (di bawah wakil bupati) dalam penanganan kemiskinan di kabupaten.
1.06.04.2 .02.14				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	67	Rp. 419.517.000	67	Rp. 419.517.000	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal sekaligus menyesuaikan dengan jadwal Bupati	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.04.2 .02.07				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	26500	Rp. 6.777.183.200	26500	Rp. 6.777.183.200	tidak terdapat masalah dalam proses pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial telah sesuai	
1.06.05		MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL LAINNYA	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
1.06.05.2 .01				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							
1.06.05.2 .01.03				Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	45	Rp. 433.042.000	45	Rp. 433.042.000	penyaluran bantuan bagi anak-anak terlantar atau anak-anak PMKS	berhasil menyalurkan bantuan bagi anak-anak terlantar atau anak-anak PMKS	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/lanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.05.2.01.01				Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	750	Rp. 601.270.000	750	Rp. 589.720.000	Melakukan assesment terhadap anak yatim/yatim piatu/piatu	pemberian bantuan bagi anak yatim/yatim piatu/piatu berdasarkan proses assesment	
1.06.05.2.02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
1.06.05.2.02.02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1079362	Rp. 1.206.160.000	1079360	Rp. 1.509.317.800	melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima bantuan	berhasil melakukan verifikasi dan malidasi berdasarkan proses assesment dan monev terhadap masyarakat fakir miskin yang ada di Kabupaten Jember selaku calon penerima bantuan	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menjalankan pendataan dan updating data kemiskinan (6 bulan sekali) sesuai dengan ketentuan yang diatur. b) Pemda Kab Jember mengoptimalkan fungsi dan kerja Tim Kesos Kecamatan dalam penanganan kemiskinan di kecamatan. c) Pemda Kab Jember menjalankan penanganan kemiskinan berbasis desa dengan mengoptimalkan terbentuknya pskesos di setiap desa untuk penanganan dan pengaduan warga miskin. d) Pemda Kab Jember harus transparan dan berbasis kebutuhan dan data dalam pemberian sarpras terkait pemberdayaan warga miskin serta penyangang masalah kesejahteraan



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.05.2.02.04				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	150	Rp. 163.135.000	150	Rp. 5.760.000	Melakukan proses pendataan terhadap wanita rawan sosial di Kabupaten Jember	Meningkatkan progres pendataan terhadap wanita rawan sosial di Kabupaten Jember	
1.06.05.2.02.03				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	64733	Rp. 20.339.436.925	64733	Rp. 20.313.846.592	penyaluran Bantuan Langsung Tunai DBHCHT bagi kelompok masyarakat buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok	berhasil melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai DBHCHT bagi kelompok masyarakat buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok	
1.06.06			MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL LAINNYA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
1.06.06.2.01				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.06.2 .01.04				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	645	Rp. 1.731.375.000	645	Rp. 1.261.466.900	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	Bantuan dapat disalurkan bagi masyarakat dari kelompok rentan sebagai korban bencana alam dan sosial	
1.06.07			MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL LAINNYA	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
1.06.07.2 .01				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
1.06.07.2 .01.02				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	15	Rp. 123.970.600	15	Rp. 77.083.000	Tidak terdapat masalah dalam melakukan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang ada di Kabupaten Jember	Melakukan dan meningkatkan pemeliharaan terhadap Taman Makam Pahlawan yang ada di Kabupaten Jember	
2.07.0.00 .00.1..0 000		DINAS TENAGA KERJA									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2.07.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Rp. 34.983.190	7	Rp. 18.763.750	kegiatan berjalan lancar	kegiatan berjalan lancar	
2.07.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.07.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25	Rp. 3.673.285.084	25	Rp. 1.400.316.012	kegiatan berjalan lancar	-	
2.07.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Rp. 118.200.000	1	Rp. 118.200.000	kegiatan berjalan lancar	-	
2.07.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2.07.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Rp. 5.577.800	1	Rp. 5.219.000	kegiatan belum terlaksana	persediaan barang masih mencukupi	
2.07.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Rp. 87.244.050	3	Rp. 66.507.300	kegiatan berjalan lancar	-	
2.07.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Rp. 17.584.500	1	Rp. 9.696.000	kegiatan berjalan lancar	-	
2.07.01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2	Rp. 3.000.000	2	Rp. 3.000.000	kegiatan berjalan lancar	-	
2.07.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Rp. 128.966.000	100	Rp. 110.781.000	kegiatan berjalan lancar	-	
2.07.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2.07.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.07.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000	Rp. 2.340.000	2270	Rp. 2.200.000	kegiatan berjalan lancar	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 52.799.424	9	Rp. 38.887.351	kegiatan berjalan lancar	-	
2.07.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 319.960.000	12	Rp. 243.823.450	kegiatan berjalan lancar	-	
2.07.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.07.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 39.780.000	1	Rp. 29.131.300	kegiatan berjalan lancar	-	
2.07.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11	Rp. 64.582.000	11	Rp. 36.568.610	kegiatan berjalan lancar	-	
2.07.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	Rp. 11.590.000	10	Rp. 9.400.000	kegiatan mendapat anggaran saat PAPBD	kegiatan berjalan lancar	
2.07.03			MENINGKATNYA ANGKATAN KERJA YANG BERHASIL DITEMPATKAN	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
2.07.03.2.01				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07.03.2.01.01				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	200	Rp. 3.764.697.400	200	Rp. 3.016.876.600	sebenarnya jumlah peserta yang terlatih sebanyak 542 orang dari sumber dana APBD, DBH CHT, INFLASI	kegiatan berjalan lancar	
2.07.03.2.02				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
2.07.03.2.02.01				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	21	Rp. 35.302.600	13	Rp. 33.957.600	kegiatan telah terlaksana semua saat triwulan ke -3	-	
2.07.04			MENINGKATNYA ANGKATAN KERJA YANG BERHASIL DITEMPATKAN	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
2.07.04.2.01				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota							
2.07.04.2.03				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							
2.07.04.2.04				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07.04.2 .04.01				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	200	Rp. 83.026.200	76	Rp. 83.014.200	CPMI/PMI yang dilindungi merupakan CPMI/PMI yang bermasalah atau sakit	-	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan pendataan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri serta menjamin perlindungan baik pada PMI maupun keluarganya. b) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengimplementasikan UU Perlindungan Pekerja Migran dengan membuat Perda perlindungan pekerja migran serta pusat pelayanan terpadu baik ditingkat daerah maupun desa kantong-kantong PMI.
2.07.05			MENINGKATNYA ANGKATAN KERJA YANG BERHASIL DITEMPATKAN	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
2.07.05.2 .01				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07.05.2.01.03				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	40	Rp. 1.600.000.000	10	Rp. 252.000.000	Kegiatan mendapat anggaran pada triwulan 4 dari dana DBH CHT 1.600.000.000	Kegiatan mendapat anggaran pada triwulan 4 dari dana DBH CHT 1.600.000.000	
2.07.05.2.02				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							
2.07.05.2.02.04				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1	Rp. 155.442.970	1	Rp. 128.710.800	kegiatan berjalan lancar	-	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali fungsi dewan pengupahan daerah. b) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong untuk pemenuhan UMR pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jember. c) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan pengawasan dan operasi perusahaan/industri di daerah terutama yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
2.08.2.14.0.00.1..000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.08.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.08.01.2				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2.08.01.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.08.01.2				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 5.056.700.182	91,87	Rp. 4.448.674.405	100 % pegawai telah mendapatkan gaji	selesai	
2.08.01.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 407.700.000	100	Rp. 392.050.000	Selesai	selesai	
2.08.01.2				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
2.08.01.2				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100	Rp. 275.000.000	100	Rp. 274.780.000	Selsai	selesai	
2.08.01.2				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2.08.01.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 1.202.682.590	3,45	Rp. 1.105.738.520	100% selesai kontrak dan pembayaran	selesai	
2.08.01.2				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	Rp. 21.390.900	80,21	Rp. 12.819.800	Telah tersedianya bahan logistik kantor	Selesai	
2.08.01.2				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Rp. 129.624.000	99,8	Rp. 129.624.000	Selesai	selesai	
2.08.01.2				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.08.01.2											



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.08.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Rp. 84.468.173	100	Rp. 58.254.134	Selesai	selesai	
2.08.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 84.468.173	68,97	Rp. 58.254.134	Selesai	selesai	
2.08.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.08.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 26.366.300	73	Rp. 19.361.331	Selesai	selesai	
2.08.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 62.544.250	66,31	Rp. 41.475.981	Selesai	selesai	
2.08.02			MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
2.08.02.2.01				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.08.02.2.01.03				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	100	Rp. 30.908.000	99,5	Rp. 30.820.000	Selesai	selesai	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus serius dalam melakukan pangarusutamaan gender disetiap OPD baik untuk pendataan, perencanaan program, serta anggaran.
2.08.02.2.02				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.02.2.02.01				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100	Rp. 633.231.300	99,04	Rp. 627.131.300	Selesai dana DID	selesai dana DID	
2.08.03			MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
2.08.03.2.02				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.03.2.02.01				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Rp. 14.620.000	99,86	Rp. 14.600.000	Selesai	selesai	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan penanganan serius dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Jember.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.08.03.2.01				PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.08.07			MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
2.08.07.2.01				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							
2.08.07.2.02				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2.08.07.2.02.04				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Rp. 80.899.500	87,63	Rp. 70.890.500	Selesai	selesai	
2.08.07.2.02.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Rp. 464.617.000	99,57	Rp. 462.603.000	Selesai dana DID	selesai dana DID	
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.02			MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
2.14.02.2.02				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
2.14.02.2.02.02				Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	100	Rp. 60.009.900	44,4	Rp. 26.646.700	0	0	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.14.02.2.02.11				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	100	Rp. 72.250.200	99	Rp. 72.250.100	0	0	
2.14.02.2.02.13				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100	Rp. 144.000.000	100	Rp. 143.999.460	Selesai	selesai	
2.14.03			MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
2.14.03.2.02				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							
2.14.03.2.02.04				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5265	Rp. 1.190.400.000	92,78	Rp. 1.104.400.000	Selesai	selesai	
2.14.03.2.03				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							
2.14.03.2.03.08				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	Rp. 32.100.000	99,75	Rp. 32.020.000	Selesai	selesai	
2.14.03.2.03.03				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	Rp. 1.297.177.000	94,2	Rp. 1.220.926.680	Selesai	selesai	
2.14.03.2.03.01				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	Rp. 44.160.000	100	Rp. 44.160.000	Selesai	selesai	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.14.03.2.04				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keser							
2.14.03.2.04.03				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	100	Rp. 896.999.800	92,07	Rp. 825.825.800	Selesai	selesai	
2.14.03.2.01				PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL							
2.14.03.2.01.04				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100	Rp. 60.590.000	100	Rp. 60.587.470	Selesai	selesai	
2.14.03.2.01.01				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100	Rp. 4.373.000	73,95	Rp. 3.234.000	0	0	
2.14.03.2.01.02				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	Rp. 35.000.000	1	Rp. 35.000.000	0	0	
2.14.03.2.01.06				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	31	Rp. 2.171.102.600	31	Rp. 2.005.611.307	Selesai	selesai	
2.14.03.2.01.07				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	100	Rp. 1.215.002.040	84,36	Rp. 1.024.947.519	Selesai	selesai	
2.14.03.2.01.08				Pengendalian Program KKBPK	2	Rp. 40.000.000	2	Rp. 37.438.000	Selesai	selesai	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.14.04			MENINGKATNYA KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
2.14.04.2.01				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
2.14.04.2.01.05			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5265	Rp. 10.835.040.000	5265	Rp. 5.648.734.888	Selesai	selesai		
2.09.3.27.0.00.1..0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.02			TERCUKUPINYA KEBUTUHAN PANGAN YANG TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							
2.09.02.2.01				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.09.02.2.01.01				Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	3	Rp. 1.099.995.000	3	Rp. 1.092.357.200	Tingginya curah hujan, sehingga mempengaruhi proses pembangunan konstruksi	menambah jumlah tenaga kerja pada saat tidak hujan	
2.09.03		TERCUKUPINYA KEBUTUHAN PANGAN YANG TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
2.09.03.2.01				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga							
2.09.03.2.01.04				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	4	Rp. 165.502.750	4	Rp. 152.970.282	-	-	
2.09.03.2.04				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							
2.09.03.2.04.02				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	9	Rp. 1.224.654.420	9	Rp. 1.041.342.750	-	-	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3.27.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
3.27.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
3.27.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp. 2.969.950	3	Rp. 2.470.000	-	-	
3.27.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp. 9.295.000	1	Rp. 8.816.500	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp. 1.078.000	1	Rp. 1.044.000	-	-	
3.27.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp. 9.290.000	1	Rp. 8.794.500	-	-	
3.27.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Rp. 1.095.000	1	Rp. 937.800	-	-	
3.27.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Rp. 973.500	1	Rp. 887.000	-	-	
3.27.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
3.27.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 6.139.785.831	14	Rp. 5.649.442.133	-	-	
3.27.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 342.596.000	12	Rp. 265.447.696	-	-	
3.27.01.2.02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Rp. 1.086.200	3	Rp. 965.000	-	-	
3.27.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
3.27.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	Rp. 10.455.610	15	Rp. 9.346.100	-	-	
3.27.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Rp. 80.055.140	12	Rp. 76.953.970	-	-	
3.27.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Rp. 6.644.050	12	Rp. 5.277.600	-	-	
3.27.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
3.27.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 119.617.676	12	Rp. 113.187.188	-	-	
3.27.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 1.044.250.000	12	Rp. 1.018.750.000	-	-	
3.27.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
3.27.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 40.861.880	1	Rp. 32.861.167	-	-	
3.27.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22	Rp. 58.423.420	22	Rp. 40.635.066	-	-	
3.27.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	Rp. 30.000.000	20	Rp. 29.067.500	-	-	
3.27.02		MENINGKATKAN KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
3.27.02.2.02				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							
3.27.02.2.02.02				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	10	Rp. 673.427.751	10	Rp. 663.031.760	-	-	
3.27.02.2.03				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.02.2.05				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota							
3.27.02.2.05.05				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12	Rp. 35.548.000	12	Rp. 35.548.000	-	-	
3.27.04			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
3.27.04.2.01				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota							
3.27.04.2.01.01				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	40000	Rp. 30.960.000	40000	Rp. 13.155.250	-	-	
3.27.04.2.03				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							
3.27.04.2.03.01				Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	12	Rp. 14.511.000	12	Rp. 11.941.750	-	-	
3.27.04.2.03.02				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Rp. 326.957.061	12	Rp. 314.454.970	-	-	
3.27.04.2.04				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							
3.27.04.2.04.01				Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	50	Rp. 28.125.000	50	Rp. 27.420.000	-	-	
3.27.04.2.04.02				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12	Rp. 40.856.000	12	Rp. 35.606.340	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.03			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
3.27.03.2.02				PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN							
3.27.03.2.02.07				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	2	Rp. 847.774.300	2	Rp. 845.894.800	-	-	
3.27.03.2.02.09				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1	Rp. 799.127.000	1	Rp. 734.173.800	-	-	
2.11.0.00.0.00.1..000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.11.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2.11.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.11.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	280	Rp. 22.086.279.489	280	Rp. 20.894.982.997	-	-	
2.11.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250	Rp. 57.900.000	254	Rp. 41.880.000	Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2.11.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36	Rp. 9.931.000	36	Rp. 9.907.595	-	-	
2.11.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372	Rp. 180.598.000	356	Rp. 156.427.200	pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	akan diproyeksikan kembali target sesuai dengan kebutuhan pada tahun berikutnya	
2.11.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Rp. 189.932.300	3	Rp. 170.093.944	Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan	
2.11.01.2.06.05				penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24	Rp. 33.993.960	24	Rp. 28.436.000	Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan	
2.11.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2.11.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp. 2.650.000	5	Rp. 1.100.000	Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan	
2.11.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 71.997.775	12	Rp. 51.345.846	Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali untuk target dan anggaran sesuai kebutuhan	
2.11.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 630.407.000	12	Rp. 630.407.000	-	-	
2.11.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.11.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp. 14.885.000	12	Rp. 14.885.000	-	-	
2.11.02			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
2.11.02.2.01				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							
2.11.02.2.01.01				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1	Rp. 55.000.000	1	Rp. 54.978.300	-	-	
2.11.02.2.02				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.03			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
2.11.03.2.01				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
2.11.03.2.01.01				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	Rp. 66.000.000	1	Rp. 64.635.300	-	-	
2.11.03.2.03				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
2.11.05			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
2.11.05.2.01				Penyimpanan Sementara Limbah B3							
2.11.06			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
2.11.06.2.01				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2.11.09			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
2.11.09.2.01				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.09.2.01.01				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Rp. 112.099.600	1	Rp. 109.457.600	-	-	
2.11.10			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
2.11.10.2.01				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							
2.11.11			MENINGKATNYA KUALITAS LAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
2.11.11.2.01				Pengelolaan Sampah							
2.11.11.2.01.03				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	159870	Rp. 13.060.071.860	159870	Rp. 13.001.687.208	-	-	
2.12.0.00.0.00.1..0000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.12.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Rp. 164.950.000	7	Rp. 145.862.612	Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan	Dikarenakan efisiensi anggaran	
2.12.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.12.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23	Rp. 3.406.384.143	23	Rp. 2.956.559.193	Untuk belanja Gaji dan tunjangan ASN, TPP, dianggarkan sesuai volume pejabat lengkap sebanyak 17 pejabat. Sedangkan pada saat realisasi hanya terdapat 12 pejabat, untuk 5 pejabat masih kosong (belum terisi)	Belanja Gaji dan tunjangan ASN, TPP sudah sesuai realisasinya dengan kebutuhan	
2.12.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 305.980.000	12	Rp. 283.400.000	-	-	
2.12.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
2.12.01.2.05.10				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Rp. 66.817.200	200	Rp. 66.264.000	-	-	
2.12.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	Rp. 1.143.036.800	20	Rp. 1.034.141.600	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mengoptimalkan peran kecamatan serta sarana dan prasarana yang tersedia di kecamatan untuk mendukung pelayanan kependudukan.
2.12.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Rp. 102.503.000	3	Rp. 91.340.255	Realisasi sudah dilaksanakan sesuai kegiatannya	Kegiatan sudah dilaksanakan	
2.12.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	Rp. 47.749.800	2	Rp. 28.724.040	Realisasi sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	Kegiatan cetak dan penggandaan sudah dilaksanakan	
2.12.01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2	Rp. 10.500.000	2	Rp. 10.500.000	-	-	
2.12.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Rp. 437.129.000	2	Rp. 433.530.345	-	-	
2.12.01.2.06.07				Penyediaan Bahan / Material	3	Rp. 243.402.800	3	Rp. 225.880.500	-	-	
2.12.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.01.2 .08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Rp. 16.610.000	4	Rp. 9.360.600	Terdapat belanja pengiriman blanko KTP-el dari pusat dan surat admindukcapil melalui pos / JNT. Hal ini yang menyebabkan realisasi anggaran tidak maksimal. Pengambilan blanko KTP-el ke Pusat, cukup dilakukan pada saat ada undangan rapat di Pusat jadi sekaligus mengambil blanko KTP-el. Untuk surat yang dikirim melalui POS / JNT sudah sesuai dengan kebutuhan	Blanko KTP-el di Pusat tidak perlu dikirim	
2.12.01.2 .08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6	Rp. 337.342.728	6	Rp. 321.119.894	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	Rp. 2.203.350.000	13	Rp. 2.165.413.000	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menyusun dan menyiapkan terobosa inovasi dalam pelayanan kependudukan di kecamatan seperti yang sudah dijalankan di beberapa kabupaten lainnya.
2.12.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.12.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 50.035.000	1	Rp. 47.983.200	-	-	
2.12.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19	Rp. 257.508.800	19	Rp. 235.185.015	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.01.2.09.08				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	3	Rp. 304.960.000	3	Rp. 304.384.800	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan kebijakan desentralisasi pelayanan kependudukan di kecamatan seperti yang sudah dijalankan di beberapa kabupaten lainnya.
2.12.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25	Rp. 15.000.000	25	Rp. 15.000.000	-	-	
2.12.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18	Rp. 557.140.000	18	Rp. 551.790.000	-	-	
2.12.01.2.07				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
2.12.02			MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
2.12.02.2.01				Pelayanan Pendaftaran Penduduk							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.02.2.01.05				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4	Rp. 17.220.000	4	Rp. 14.720.000	Terdapat belanja perjalanan dinas dalam daerah, dalam rangka Cakupan kepemilikan KTP-el, kegiatan dan target sudah terpenuhi	kegiatan sudah dilaksanakan dan target sudah terpenuhi, realisasi anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	
2.12.02.2.02				Penataan Pendaftaran Penduduk							
2.12.03			MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
2.12.03.2.01				Pelayanan Pencatatan Sipil							
2.12.03.2.01.02				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	100	Rp. 17.220.000	100	Rp. 15.520.000	-	-	
2.12.03.2.02				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							
2.12.03.2.02.06				Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	3	Rp. 35.940.000	3	Rp. 35.940.000	0	0	
2.12.04			MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
2.12.04.2.01				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.04.2.03				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
2.12.04.2.03.05				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	Rp. 38.340.000	2	Rp. 37.840.000	-	-	
2.12.05			MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							
2.12.05.2.01				Penyusunan Profil Kependudukan							
2.12.05.2.01.02				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1	Rp. 63.266.000	1	Rp. 61.500.000	-	-	
2.12.01.2.05.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74	Rp. 130.000.000	74	Rp. 123.750.000	0	0	
2.13.0.00.0.00.1..0000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.13.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2.13.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28	Rp. 3.763.661.531	28	Rp. 3.532.744.991	Realisasi anggaran dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan	-	
2.13.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Rp. 365.874.000	2	Rp. 357.455.000	Target kegiatan dalam bentuk dokumen laporan kegiatan dan telah diselesaikan di TW IV. Realisasi anggaran dan kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan.	-	
2.13.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2.13.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp. 6.420.600	1	Rp. 6.396.650	Target kegiatan dalam bentuk paket pengadaan barang dan telah diselesaikan di TW IV. Realisasi anggaran dan kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan.	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.01.2 .06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Rp. 17.251.000	1	Rp. 17.249.300	Target kegiatan dalam bentuk paket pengadaan barang dan telah diselesaikan di TW IV. Realisasi anggaran dan kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan.	-	
2.13.01.2 .06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Rp. 30.050.720	1	Rp. 28.849.300	Target kegiatan dalam bentuk paket pengadaan barang dan telah diselesaikan di TW IV. Realisasi anggaran dan kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan.	-	
2.13.01.2 .06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Rp. 311.600.000	4	Rp. 309.504.481	Realisasi anggaran dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan	-	
2.13.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.01.2 .08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Rp. 95.572.968	1	Rp. 82.354.994	Target kegiatan dalam bentuk dokumen laporan kegiatan dan telah diselesaikan di TW IV. Realisasi anggaran dan kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan.	-	
2.13.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Rp. 869.235.500	1	Rp. 857.435.605	Target kegiatan dalam bentuk dokumen laporan kegiatan dan telah diselesaikan di TW IV. Realisasi anggaran dan kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan.	-	
2.13.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 33.012.100	1	Rp. 31.317.850	Target kegiatan dalam bentuk unit kendaraan. Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan, sedangkan realisasi kinerja telah diselesaikan 1 unit pada TW IV	-	
2.13.01.2 .09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21	Rp. 113.521.982	21	Rp. 105.617.179	Target kegiatan dalam bentuk unit kendaraan. Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan, sedangkan realisasi kinerja telah diselesaikan pada TW IV	-	
2.13.01.2 .09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77	Rp. 39.786.600	77	Rp. 38.708.760	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan, sedangkan realisasi kinerja telah diselesaikan pada TW IV.	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.04			MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
2.13.04.2.01				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
2.13.04.2.01.04				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3	Rp. 109.779.500	3	Rp. 106.530.800	Perbup DD, ADD, BGH telah selesai disusun dan disosialisasikan, realisasi anggaran telah menyesuaikan kebutuhan	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan UU Desa serta pelaksanaan dana desa.
2.13.04.2.01.05				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	226	Rp. 3.332.534.696	226	Rp. 2.724.749.464	Realisasi anggaran BPJS Kesehatan dan kegiatan Suspim telah sesuai dengan kebutuhan	Kegiatan suspim kades telah dilaksanakan untuk 80 orang kades, dan realisasi pembayaran tagihan BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan kebutuhan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan UU Desa serta pelaksanaan dana desa.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.04.2 .01.07				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	28	Rp. 106.537.070	28	Rp. 101.098.000	Output kegiatan dalam bentuk dokumen laporan dari 28 kecamatan selama 1 tahun. Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan, sedangkan realisasi kinerja telah diselesaikan pada TW IV	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan UU Desa serta pelaksanaan dana desa.
2.13.04.2 .01.08				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	28	Rp. 92.896.000	28	Rp. 43.712.000	Realisasi anggaran dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Telah dilaksanakan fasilitasi untuk total 28 BUMDesa di Kabupaten Jember selama Tahun 2022.	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.04.2 .01.09				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	Rp. 55.280.000	1	Rp. 41.199.500	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan, sedangkan realisasi kinerja dilaporkan dalam 1 laporan pada TW IV. Telah dilaksanakan pilkades PAW di 12 desa pada tanggal 6 Oktober 2022	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan UU Desa serta pelaksanaan dana desa.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.04.2 .01.01				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	15	Rp. 885.000.000	15	Rp. 819.707.000	Adanya Bantuan Keuangan dari Pemprov Jawa Timur untuk Honorarium Pembahas/Narasumber kegiatan Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf perangkat desa dengan total bantuan sebesar Rp 822.800.000	Fasilitasi penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan anggaran bantuan Keuangan dari Pemprov Jawa Timur telah dilaksanakan dan dicairkan untuk Kepala Desa, perangkat Desa dan Staf perangkat desa di Kabupaten Jember, dan Bantuan Keuangan dari Pemprov Jawa Timur untuk Honorarium Pembahas/Narasumber kegiatan Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf perangkat desa telah direalisasikan.	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong dan memfasilitasi lahirnya inovasi baik dalam peningkatan pelayanan maupun perekonomian desa.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.04.2.01.18				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	248	Rp. 193.294.860	248	Rp. 107.972.355	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan, sedangkan realisasi kinerja telah selesai dengan total 248 desa dan kelurahan yang sudah melakukan input ke dalam aplikasi epdeskel.	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong lahirnya desa percontohan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.
2.13.05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
2.13.05.2.01				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdaya							
2.13.05.2.01.02				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Rp. 2.528.784.000	1	Rp. 2.488.362.723	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan BPJSTK untuk ketua RT RW, sedangkan realisasi kinerja telah diselesaikan dengan 1 dokumen laporan pada akhir TW IV	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.05.2 .01.03				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10	Rp. 1.395.944.920	10	Rp. 1.171.925.920	Realisasi anggaran dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan	-	
2.13.05.2 .01.04				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10	Rp. 109.916.810	10	Rp. 67.002.530	Realisasi anggaran dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Realisasi anggaran BOP BKK Provinsi Jawa Timur sesuai kebutuhan, dan kegiatan telah dilaksanakan dengan menyalurkan BKK dari Pemprov Jawa Timur dalam bentuk Jatim Puspa, Desa Berdaya, dan BUMDesa untuk total 19 desa.	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.05.2 .01.05				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2	Rp. 343.208.720	2	Rp. 281.658.500	Target kegiatan dalam bentuk dokumen laporan hasil kegiatan pendampingan dan pelestarian aset simpan pinjam perempuan (SPP) kegiatan PDPM dan pelatihan usaha ekonomi. Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan, sedangkan realisasi kinerja telah diselesaikan pada TW IV	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.05.2 .01.06				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	Rp. 670.665.820	2	Rp. 641.060.600	Fasilitasi pelatihan digital desa untuk 10 desa telah dilaksanakan. Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan, dan laporan kegiatan telah diselesaikan.	-	
2.13.05.2 .01.09				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	31	Rp. 2.123.320.470	31	Rp. 1.730.093.446	Realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan, sedangkan realisasi kinerja telah diselesaikan pada TW IV	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.05.2.01.07				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Rp. 1.039.495.500	1	Rp. 813.004.870	Realisasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan seremonial pembukaan BBGRM telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022 di GOR PKPSO Kaliwates Jember.	-	
2.15.0.00.0.00.1..0000		DINAS PERHUBUNGAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.15.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2.15.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Rp. 95.641.000	4	Rp. 66.918.000	-	-	
2.15.01.2.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Rp. 113.992.000	3	Rp. 112.833.400	-	-	
2.15.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.15.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	756	Rp. 10.386.962.98	75	Rp. 8.494.570.423	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 6.152.756.008	12	Rp. 5.297.867.503	-	-	
2.15.01.2.02.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Rp. 99.732.000	12	Rp. 68.418.000	-	-	
2.15.01.2.04				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							
2.15.01.2.04.07				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Rp. 1.928.915.870	4	Rp. 1.873.044.150	-	-	
2.15.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
2.15.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2.15.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp. 19.740.300	1	Rp. 18.202.300	-	-	
2.15.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	Rp. 393.195.700	10	Rp. 379.315.750	-	-	
2.15.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	Rp. 26.488.890	2	Rp. 26.048.600	-	-	
2.15.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10	Rp. 1.312.660.000	10	Rp. 997.462.500	-	-	
2.15.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Rp. 272.267.000	50	Rp. 261.971.681	-	-	
2.15.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2.15.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 745.129.150	12	Rp. 559.878.491	-	-	
2.15.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	Rp. 1.098.580.420	3	Rp. 791.561.216	-	-	
2.15.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.15.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70	Rp. 606.549.900	70	Rp. 293.719.525	-	-	
2.15.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	Rp. 104.888.000	20	Rp. 98.850.000	-	-	
2.15.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Rp. 17.000.000	2	Rp. 16.980.000	-	-	
2.15.02		TERPENUHINYA SARANA PERHUBUNGAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
2.15.02.2.01				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.02.01				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4	Rp. 479.478.000	4	Rp. 460.128.540	-	-	
2.15.02.2.02.02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	Rp. 1.425.783.800	100	Rp. 1.293.290.260	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.02.2.02.03				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	4	Rp. 1.684.722.000	4	Rp. 1.558.854.708	-	-	
2.15.02.2.02.04				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	50	Rp. 979.856.000	50	Rp. 888.420.150	-	-	
2.15.02.2.03				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							
2.15.02.2.03.03				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	4,4E+07	Rp. 161.166.000	4,4E+07	Rp. 160.742.500	-	-	
2.15.02.2.04				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							
2.15.02.2.04.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1,1E+10	Rp. 5.016.489.800	1,1E+10	Rp. 4.953.257.000	-	-	
2.15.02.2.05				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
2.15.02.2.05.01				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,5E+09	Rp. 151.987.700	1,5E+09	Rp. 149.820.400	-	-	
2.15.02.2.05.07				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	Rp. 185.500.000	100	Rp. 183.949.600	-	-	
2.15.02.2.06				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.02.2.06.04				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	48	Rp. 791.435.000	48	Rp. 728.534.400	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan kembali penataan lalu lintas jalan terutama pada wilayah wilayah yang rawan kemacetan.
2.15.02.2.06.05				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	12	Rp. 59.100.000	12	Rp. 46.790.000	-	-	
2.15.02.2.07				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.07.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12	Rp. 40.500.000	12	Rp. 0	Kegiatan yang dilaksanakan hanya penyusunan laporan koordinasi dan sinkronisasi andalalin sedangkan anggaran tidak dapat diserap menyesuaikan aturan yang berlaku	pada tahun berikutnya akan memproyeksikan kembali target dan kebutuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
2.15.02.2.08				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							
2.15.02.2.09				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.02.2.09.01				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	261	Rp. 2.081.320.070	261	Rp. 1.892.230.534	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memiliki konsep inovatif dalam pengembangan moda transportasi publik massa yang ramah baik dalam layanan maupun trayek.
2.15.02.2.09.02				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2	Rp. 175.600.000	2	Rp. 88.300.000	-	-	
2.15.02.2.14				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.14.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Rp. 538.381.050	2	Rp. 459.668.543	-	-	
2.15.04			TERPENUHINYA SARANA PERHUBUNGAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN							
2.15.04.2.01				Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.04.2.01.01				Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	108	Rp. 509.422.650	108	Rp. 507.673.000	-	-	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan lobby pemulihan dan pengaktifan kembali operasionalisasi bandara. b) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera memperjelas kerjasama pengembangan bandara dengan pemerintah pusat, BUMN atau Angkasapura.
2.15.05		TERPENUHINYA SARANA PERHUBUNGAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								
2.15.05.2.02			Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.05.2.02.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Rp. 484.416.700	2	Rp. 451.643.600	-	-	
2.15.03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.03.2.12				PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL							
2.15.03.2.12.04				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1	Rp. 7.680.000	1	Rp. 7.680.000	-	-	
2.16.2.20.2.21.1.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.16.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.16.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26	Rp. 3.595.407.932	23	Rp. 3.179.865.693	Jumlah PNS yang digaji sampai dengan Bulan Desember 2022 sejumlah 23 pegawai	Dibayarkan sesuai dengan jumlah pegawai	
2.16.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 297.450.000	12	Rp. 274.900.000	-	Pembayaran honorarium telah sesuai	
2.16.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2.16.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp. 4.747.200	1	Rp. 4.266.800	-	-	
2.16.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 173.926.500	100	Rp. 158.240.000	-	-	
2.16.01.2.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	Rp. 29.755.500	100	Rp. 28.125.000	-	-	
2.16.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Rp. 29.873.200	4	Rp. 25.688.900	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	Rp. 14.644.000	5	Rp. 12.369.100	-	-	
2.16.01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12	Rp. 40.320.000	12	Rp. 38.880.000	-	-	
2.16.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.16.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp. 2.500.000	12	Rp. 2.191.400	-	-	
2.16.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 144.814.988	12	Rp. 127.965.626	-	-	
2.16.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 1.206.716.300	12	Rp. 1.168.668.352	-	-	
2.16.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.16.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 58.000.000	1	Rp. 54.748.358	-	-	
2.16.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	Rp. 71.820.000	5	Rp. 51.507.529	-	-	
2.16.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp. 23.800.000	1	Rp. 23.095.000	-	-	
2.16.02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
2.16.02.2.01				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16.02.2.01.02				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	Rp. 46.088.000	1	Rp. 45.026.000	-	-	
2.16.02.2.01.03				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12	Rp. 172.200.000	12	Rp. 170.793.300	-	-	
2.16.02.2.01.04				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5	Rp. 70.000.000	5	Rp. 58.100.000	-	-	
2.16.02.2.01.05				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	264	Rp. 468.400.000	674	Rp. 165.900.000	-	-	
2.16.02.2.01.06				Pelayanan Informasi Publik	12	Rp. 374.004.000	12	Rp. 355.191.400	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk memaksimalkan peran OPD dan PPID dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.
2.16.02.2.01.07				Layanan Hubungan Media	41	Rp. 9.246.700.000	41	Rp. 8.584.206.220	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk menjalin mitra kolaborasi dan strategis secara professional dengan beberapa pihak dalam penyediaan informasi pada publik terkait pembangunan.
2.16.03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							
2.16.03.2.01				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16.03.2.01.03				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Rp. 198.440.000	1	Rp. 197.051.233	-	-	
2.16.03.2.02				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2.16.03.2.02.03				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1	Rp. 189.121.945	1	Rp. 188.350.000	-	-	
2.16.03.2.02.07				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	22	Rp. 2.927.465.000	24	Rp. 1.895.167.000	-	-	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan percepatan dan langkah-langkah untuk implementasi E-Government terutama dalam mendukung pelayanan. b) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk menjalin mitra kolaborasi dan strategis secara professional dengan beberapa pihak dalam penyediaan informasi pada publik terkait pembangunan.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16.03.2.02.09				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1	Rp. 5.760.409.007	2	Rp. 5.193.956.761	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera mengimplementasikan sistem informasi desa terutama bagi daerah-daerah yang tidak kesulitan jaringan dalam mendukung penyelenggaraan informasi pembangun di desa.
2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2.20.02		MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
2.20.02.2.01			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
2.20.02.2.01.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	Rp. 99.659.800	1	Rp. 99.564.500	-	-	
2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.21.02			MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
2.21.02.2.01				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2.21.02.2.01.03				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Rp. 78.310.400	1	Rp. 75.000.000	-	-	
2.17.0.00.0.00.1..000		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.17.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2.17.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp. 966.700	2	Rp. 966.700	Sudah terealisasi sesuai pagu anggaran	Sudah terealisasi sesuai pagu anggaran	
2.17.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Rp. 2.419.000	2	Rp. 1.364.000	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	Rp. 4.610.000	2	Rp. 3.944.000	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	Rp. 1.844.500	2	Rp. 1.611.800	0	0	
2.17.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	Rp. 1.574.500	2	Rp. 1.506.200	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp. 791.000	1	Rp. 791.800	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp. 169.001	1	Rp. 168.900	Sudah teralisasi	Sudah teralisasi	
2.17.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.17.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21	Rp. 3.070.810.165	21	Rp. 2.973.252.870	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Rp. 245.235.000	4	Rp. 493.531.800	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
2.17.01.2.05.01				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	Rp. 320.246.000	2	Rp. 261.147.712	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.05.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21	Rp. 5.000.000	21	Rp. 3.897.500	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp. 25.753.500	1	Rp. 25.659.800	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp. 194.454.960	1	Rp. 191.060.940	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Rp. 243.862.430	1	Rp. 222.646.325	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Rp. 26.356.550	1	Rp. 25.548.350	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2	Rp. 4.200.000	2	Rp. 3.650.000	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Rp. 239.156.000	2	Rp. 228.395.729	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2.17.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.17.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Rp. 3.950.000	4	Rp. 3.776.625	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	Teralisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Rp. 129.471.580	64	Rp. 125.278.366	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	Rp. 454.401.366	4	Rp. 389.514.804	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21	Rp. 122.400.000	21	Rp. 106.640.621	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21	Rp. 14.250.000	21	Rp. 13.061.800	Teralisasi sesuai kebutuhan kegiatan	Teralisasi sesuai kebutuhan kegiatan	
2.17.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21	Rp. 105.028.634	21	Rp. 101.649.000	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Rp. 42.336.000	2	Rp. 42.083.200	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							
2.17.04.2.01				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
2.17.04.2.01.02				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Rp. 109.762.680	200	Rp. 53.718.500	Teralisasi sesuai kebutuhan kegiatan	Teralisasi sesuai kebutuhan kegiatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta wirausaha bari di Jember.
2.17.05			MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.05.2.01				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
2.17.05.2.02				PENDIDIKAN DAN LATIHAN UKM BAGI UKM DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.17.05.2.02.01				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	60	Rp. 354.639.980	60	Rp. 309.806.528	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.06			MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
2.17.06.2.01				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
2.17.06.2.01.01				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	945	Rp. 427.992.270	945	Rp. 376.771.132	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	
2.17.07			MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
2.17.07.2.01				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemas							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjnt Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.07.2.01.04				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	160	Rp. 3.657.172.000	160	Rp. 1.202.015.610	Teralisasi sesuai kebutuhan kegiatan	Teralisasi sesuai kebutuhan kegiatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta wirausaha bari di Jember.
2.17.08			MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
2.17.08.2.01				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							
2.17.08.2.01.01				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	80	Rp. 3.783.797.800	40	Rp. 3.432.598.568	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	Terealisasi sesuai dengan pagu anggaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta wirausaha bari di Jember.
2.17.03			MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
2.17.03.2.01				PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DA							
2.17.03.2.01.01				Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Rp. 48.720.000	60	Rp. 30.858.035	Teralisasi sesuai kebutuhan kegiatan	Teralisasi sesuai kebutuhan kegiatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah				
2.18.2.10.000.1..000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.10.02		MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS USAHA MIKRO	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI									
2.10.02.2.01				Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.10.02.2.01.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	100	Rp. 313.248.453	99	Rp. 309.801.950	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anngaran yang tepat sasaran		
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2.18.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.18.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.18.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 2.383.119.309	90	Rp. 2.132.938.914	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anngaran yang tepat sasaran		
2.18.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 1.180.752.000	85	Rp. 1.016.036.000	Karena Adanya aturan baru Terkait uang lembur ASN tidak boleh di cairkan	Perlu ditingkatkan penggunaan anngaran yang tepat sasaran		
2.18.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah								



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Rp. 9.432.830	99	Rp. 9.393.204	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	Rp. 91.253.690	85	Rp. 77.349.395	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Rp. 667.080.000	65	Rp. 436.681.024	Kegiatan Telah dilaksanakan Sesuai Kebutuhan	Untuk dilakukan perencanaan lebih matang pada tahun mendatang	
2.18.01.2.06.07				Penyediaan Bahan/Material	100	Rp. 142.238.360	92	Rp. 131.222.649	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.18.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Rp. 6.386.000	88	Rp. 10.000.000	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Rp. 260.392.704	81	Rp. 208.996.944	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 413.309.750	95	Rp. 392.283.740	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong penyelenggaraan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik.
2.18.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.18.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 68.834.160	73	Rp. 50.600.900	Karena adanya Terkendala Teknis	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 96.455.100	67	Rp. 63.934.015	Karena adanya Terkendala Teknis	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.01.2.09.11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	Rp. 74.305.720	85	Rp. 63.300.000	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.03			MENINGKATNYA JUMLAH INVESTOR PMDN/PMA BERSKALA NASIONAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
2.18.03.2.01				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.03.2.01.02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp. 79.364.560	95	Rp. 75.037.510	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.04			MENINGKATNYA JUMLAH INVESTOR PMDN/PMA BERSKALA NASIONAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
2.18.04.2.01				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							
2.18.04.2.01.01				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100	Rp. 841.740.000	94	Rp. 788.395.000	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.05			MENINGKATNYA JUMLAH INVESTOR PMDN/PMA BERSKALA NASIONAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
2.18.05.2.01				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.05.2 .01.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100	Rp. 213.023.560	76	Rp. 182.687.560	Kegiatan yang menggunakan DAK sudah dilaksanakan dengan lancar dan baik dan sesuai dengan juknis yang ada, tetapi ada sedikit silpa yang tidak bisa deserap yaitu honorarium narasumber, dikare nakan narasumber yang berasal dari Dinas penerima DAK tidak dapat nerima Honor	Kegiatan DAK Sudah sesuai dengan perka BKPM no 8 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik fasilitas penanaman modal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.05.2 .01.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	30	Rp. 170.890.256	40	Rp. 152.951.009	Kegiatan yang menggunakan DAK sudah dilaksanakan dengan lancar dan baik dan sesuai dengan juknis yang ada, tetapi ada sedikit silpa yang tidak bisa deserap yaitu honorarium narasumber, dikare nakan narasumber yang berasal dari Dinas penerima DAK tidak dapat nerima Honor	Kegiatan DAK Sudah sesuai dengan perka BKPM no 8 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik fasilitasi penanaman modal	
2.19.0.00 .00.01.0 000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										
2.19.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.19.01.2 .01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2.19.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 3.228.015.952	14	Rp. 3.209.096.065	Optimalisasi kegiatan direncanakan selesai pada triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 1.192.113.000	12	Rp. 1.115.709.805	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.01.2.06.07				Penyediaan Bahan/Material	12	Rp. 575.811.314	13	Rp. 573.044.645	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.01.2.07.05				Pengadaan Mebel	1	Rp. 33.185.460	1	Rp. 32.320.000	0	0	
2.19.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2.19.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Rp. 15.293.090	4	Rp. 15.258.418	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6	Rp. 224.159.160	6	Rp. 223.469.308	Optimalisasi kegiatan direncanakan selesai pada triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.01.2.06.08				Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Rp. 603.936.100	12	Rp. 588.815.726	Optimalisasi kegiatan direncanakan selesai pada triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2.19.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30	Rp. 1.175.323.286	45	Rp. 1.153.351.837	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.01.2.07.01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 232.820.500	1	Rp. 189.000.000	Optimalisasi kegiatan direncanakan selesai pada triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.19.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Rp. 8.195.000	6	Rp. 8.190.000	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 61.561.402	12	Rp. 47.888.165	Penganggaran kegiatan terlalu besar	Mengalihkan sebagian anggaran dalam P-APBD	
2.19.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	Rp. 129.496.000	11	Rp. 125.905.667	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	Rp. 736.650.000	12	Rp. 688.150.000	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.19.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	Rp. 224.631.600	7	Rp. 184.405.696	Perlu perubahan rincian rekening belanja dalam P-APBD	Mengoptimalkan perubahan rincian rekening belanja dalam P-APBD	
2.19.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7	Rp. 1.304.729.766	7	Rp. 1.292.821.381	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.02			MENINGKATNYA KEGIATAN KEPEMUDAAN UNTUK MENUNJANG PARIWISATA DAERAH DAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
2.19.02.2.01				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.02.2.01.01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	50	Rp. 77.823.700	49	Rp. 64.650.600	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan pada triwulan I	Mengoptimalkan realisasi kinerja anggaran	
2.19.02.2.01.09				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500	Rp. 1.080.019.240	389	Rp. 848.736.500	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan pada triwulan III	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.03			MENINGKATNYA KEGIATAN KEPEMUDAAN UNTUK MENUNJANG PARIWISATA DAERAH DAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
2.19.03.2.01				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
2.19.03.2.02				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2.19.03.2.02.01				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4	Rp. 10.134.525.798	4	Rp. 9.118.750.732	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi Stadion JSG dan manajemen, kalau memungkinkan didorong pembinaan prestasi olahraga dan menghasilkan PAD.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.03.2.02.03				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	250	Rp. 761.974.920	159	Rp. 535.446.155	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.03.2.03				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							
2.19.03.2.03.04				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	300	Rp. 3.166.304.200	620	Rp. 3.123.378.000	Kegiatan pemberian penghargaan direncanakan pada triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan reward untuk atlet berprestasi baik regional maupun nasional.
2.19.03.2.05				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							
2.19.03.2.05.01				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	4	Rp. 975.375.300	4	Rp. 859.834.705	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.03.2.05.05				Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	12	Rp. 155.678.230	12	Rp. 107.853.000	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.19.03.2.04				PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA							
2.19.03.2.04.01				Standardisasi Organisasi Keolahragaan	10	Rp. 60.220.000	10	Rp. 59.715.969	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.03.2.04.02				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3	Rp. 4.425.000.000	3	Rp. 4.424.932.500	Kegiatan telah terlaksana pada triwulan I dan IV	Mengoptimalkan realisasi kinerja anggaran	
2.19.04			MENINGKATNYA KEGIATAN KEPEMUDAAN UNTUK MENUNJANG PARIWISATA DAERAH DAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							
2.19.04.2.01				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							
2.19.04.2.01.05				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4	Rp. 68.940.500	4	Rp. 34.729.400	Kegiatan direncanakan selesai seluruhnya pada akhir triwulan IV	Mengoptimalkan kinerja sesuai jadwal kegiatan	
2.22.3.26.00.01.000		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.22.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2.22.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp. 1.892.600	12	Rp. 1.892.600	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	Kegiatan dilaksanakan dengan baik	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.22.02			MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
2.22.02.2				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
2.22.02.2.02.01				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	10	Rp. 608.762.000	10	Rp. 607.911.800	Tidak ada masalah dalam menjalankan kegiatan	Kegiatan dilaksanakan dengan baik	
2.22.05			MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
2.22.05.2				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							
2.22.05.2.02.01				Pelindungan Cagar Budaya	470	Rp. 305.436.245	461	Rp. 299.700.000	Kegiatan dilaksanakan dengan sesuai kebutuhan	Dilakukan Evaluasi Untuk peningkatan Kegiatan di tahun 2023	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
3.26.01.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
3.26.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	448	Rp. 4.095.814.633	430	Rp. 3.509.485.276	Belanja kegiatan dilaksanakan dengan sesuai kebutuhan	dilakukan evaluasi untuk peningkatan kegiatan di tahun berikutnya	
3.26.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.26.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Rp. 79.104.800	10	Rp. 58.357.600	Belaja kegiatan dilaksanakan dengan sesuai kebutuhan	dilakukan evaluasi untuk peningkatan kegiatan di tahun berikutnya	
3.26.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Rp. 37.739.000	10	Rp. 33.817.500	Belaja kegiatan dilaksanakan dengan sesuai kebutuhan	dilakukan evaluasi untuk peningkatan kegiatan di tahun berikutnya	
3.26.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Rp. 40.238.060	12	Rp. 40.071.550	Kegiatan dilaksanakan dengan sesuai kebutuhan	Dilakukan Evaluasi Untuk peningkatan Kegiatan di tahun 2023	
3.26.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Rp. 82.832.000	48	Rp. 82.273.475	Belaja kegiatan dilaksanakan dengan sesuai kebutuhan	Kegiatan dilaksanakan dengan baik	
3.26.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
3.26.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp. 2.810.000	11	Rp. 2.500.000	Kegiatan dilaksanakan dengan sesuai kebutuhan	dilakukan evaluasi untuk peningkatan kegiatan di tahun berikutnya	
3.26.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 257.403.295	10	Rp. 216.898.978	Kegiatan dilaksanakan dengan sesuai kebutuhan	Dilakukan Evaluasi Untuk peningkatan Kegiatan di tahun 2023	
3.26.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 2.791.852.000	12	Rp. 2.785.190.000	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	Kegiatan dilaksanakan dengan baik	
3.26.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.26.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62	Rp. 219.470.000	52	Rp. 183.753.534	Belaja kegiatan dilaksanakan dengan sesuai kebutuhan	dilakukan evaluasi untuk peningkatan kegiatan di tahun berikutnya	
3.26.02			MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
3.26.02.2.03				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
3.26.02.2.03.03				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Rp. 125.100.000	3	Rp. 123.600.000	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	Kegiatan dilaksanakan dengan baik	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kunjungan dan PAD dari sektor wisata.
3.26.02.2.03.04				Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	Rp. 100.000.000	2	Rp. 97.400.000	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	Kegiatan dilaksanakan dengan baik	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kunjungan dan PAD dari sektor wisata.
3.26.02.2.03.06				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	Rp. 1.049.772.500	2	Rp. 1.020.900.000	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	Kegiatan dilaksanakan dengan baik	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kunjungan dan PAD dari sektor wisata.
3.26.02.2.04				PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.26.02.2.04.04				Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1	Rp. 26.000.000	0,98	Rp. 25.680.000	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	Kegiatan dilaksanakan dengan baik	
3.26.03		MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
3.26.03.2.01				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							
3.26.03.2.01.02				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Rp. 115.000.000	2,79	Rp. 99.346.800	Belaja kegiatan dilaksanakan dengan sesuai kebutuhan	dilakukan evaluasi untuk peningkatan kegiatan di tahun berikutnya	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih inovatif dalam menyusun Calender of Event yang menarik dan berjalan sepanjang bulan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Jember.
3.26.03.2.01.04				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3	Rp. 253.480.000	3	Rp. 253.453.500	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	Kegiatan dilaksanakan dengan baik	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih inovatif dalam menyusun Calender of Event yang menarik dan berjalan sepanjang bulan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Jember.
3.26.05		MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATA		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
3.26.05.2.01				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.26.05.2.01.01				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	60	Rp. 105.800.000	55	Rp. 98.165.000	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	Kegiatan dilaksanakan dengan baik	
3.26.05.2.02				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif							
3.26.04				PENGEMBANGAN SISTEM PEMASARAN							
3.26.04.2.02				PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF							
3.26.04.2.02.05				Pengembangan Sistem Pemasaran	1	Rp. 272.472.000	1	Rp. 270.768.000	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	Kegiatan dilaksanakan dengan baik	
2.23.2.24.0.00.1..000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.23.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.23.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 2.526.176.080	14	Rp. 2.391.365.315	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	Rp. 140.040.000	10	Rp. 140.040.000	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.23.01.2.05.05				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Rp. 10.560.000	2	Rp. 3.600.000	Kegiatan movev pegawai tidak dapat dilaksanakan secara rutin dikarenakan padatnnya kegiatan di lapangan	Melakukan kegiatan movev pegawai secara rutin di tahun berikutnya	
2.23.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2.23.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15	Rp. 3.640.700	4	Rp. 3.616.500	Keterbatasan anggaran penyediaan alat listrik	Menyesuaikan kembali target kinerja dengan anggaran yang tersedia pada tahun berikutnya	
2.23.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	Rp. 196.094.700	5	Rp. 173.248.065	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6	Rp. 8.160.000	6	Rp. 8.122.000	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	Rp. 273.719.000	96	Rp. 271.153.149	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.06.07				Penyediaan Bahan/Material	1	Rp. 76.980.200	1	Rp. 73.472.354	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2.23.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Rp. 85.461.200	6	Rp. 75.044.205	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.23.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Rp. 1.910.000	2	Rp. 1.910.000	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 160.338.726	12	Rp. 152.439.819	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40	Rp. 1.047.555.968	36	Rp. 996.376.959	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.23.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 69.440.000	1	Rp. 65.493.000	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15	Rp. 98.935.600	15	Rp. 75.741.600	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Rp. 20.000.000	85	Rp. 19.635.000	Nihil	Nihil	
2.23.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp. 115.370.000	1	Rp. 111.943.450	Nihil	Nihil	
2.23.02			MENINGKATNYA TINGKAT LITERASI MASYARAKAT	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
2.23.02.2.01				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.23.02.2.01.04				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	120	Rp. 54.560.000	69	Rp. 54.560.000	Masih banyak lembaga perpustakaan yang belum memiliki jumlah buku perpustakaan sesuai standar	Peminjaman buku bergulir pada setiap lembaga perpustakaan dengan berkesinambungan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong budaya literasi pada masyarakat dengan kolaborasi dan pemberdayaan pada komunitas literasi yang ada di Jember.
2.23.02.2.01.09				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	5000	Rp. 226.670.000	3271	Rp. 220.082.775	Nihil	Nihil	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah (koleksi buku, gedung, serta perpustakaan digital, perpustakaan mobile).
2.23.02.2.02				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2.23.02.2.02.04				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	131770	Rp. 145.694.500	23893	Rp. 141.258.100	Kendaraan pusling untuk gelar pustaka peningkatan pengunjung perpustakaan dalam masa perbaikan	Percepatan perbaikan agar kegiatan gelar pustaka dapat berjalan kembali	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong pembinaan perpustakaan di fasilitas publik, kantor-kantor pemerintah serta di desa.
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.24.02			MENINGKATNYA TINGKAT LITERASI MASYARAKAT	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
2.24.02.2.01				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							
2.24.02.2.01.01				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	22500	Rp. 108.717.500	17450	Rp. 107.247.550	Nihil	Nihil	
2.24.02.2.02				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							
2.24.02.2.02.02				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	2600	Rp. 125.115.000	2600	Rp. 123.159.000	Nihil	Nihil	
2.24.02.2.03				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							
2.24.02.2.03.02				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	7916	Rp. 23.015.300	5540	Rp. 21.471.000	Kurangnya SDM pengelola kearsipan	Menambah dan meningkatkan SDM pengelola kearsipan	
3.25.0.00.0.00.1..000		DINAS PERIKANAN									
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
3.25.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
3.25.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp. 1.157.500	2	Rp. 746.000	Sesuai kebutuhan cetak dokumen perencanaan	Efisiensi	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp. 2.344.500	1	Rp. 1.202.500	Sesuai kebutuhan kegiatan penyusunan dokumen RKA	Efisiensi	
3.25.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Rp. 2.344.500	1	Rp. 1.230.000	Sesuai kebutuhan kegiatan penyusunan dokumen perubahan RKA	Efisiensi	
3.25.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Rp. 1.674.500	1	Rp. 979.500	Menyesuaikan anggaran kas	Efisiensi	
3.25.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Rp. 1.674.500	1	Rp. 757.500	Sesuai kebutuhan kegiatan penyusunan dokumen perubahan DPA	Efisiensi	
3.25.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp. 2.429.000	1	Rp. 1.865.000	Menyesuaikan anggaran kas	Efisiensi	
3.25.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
3.25.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	280	Rp. 2.758.160.764	204	Rp. 2.334.531.807	Sesuai kebutuhan	Sesuai jumlah pegawai yang ada	
3.25.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 1.069.062.000	12	Rp. 1.005.485.200	Tidak terserapnya uang lembur PNS pada triwulan IV	Sesuai dengan Perbup	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.01.2.02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Rp. 1.864.490	3	Rp. 1.243.000	Sesuai kebutuhan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan	Efisiensi	
3.25.01.2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
3.25.01.2.03.06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Rp. 13.140.000	2	Rp. 12.200.000	Sesuai kebutuhan	Efisiensi	
3.25.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
3.25.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp. 6.105.000	1	Rp. 5.525.000	Sesuai kebutuhan	Efisiensi	
3.25.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp. 89.546.000	1	Rp. 86.107.500	Kegiatan berjalan dengan lancar	Efisiensi	
3.25.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Rp. 120.274.700	1	Rp. 110.778.130	Kegiatan berjalan dengan lancar	Efisiensi	
3.25.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Rp. 1.800.000	1	Rp. 1.298.640	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan barang cetakan	
3.25.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp. 236.972.000	30	Rp. 141.590.265	Menyesuaikan perjalanan dinas yang diajukan	Sesuai kebutuhan perjalanan dinas	
3.25.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
3.25.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
3.25.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Rp. 4.700.000	2	Rp. 4.400.000	Kegiatan berjalan dengan lancar	Sesuai kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 141.122.881	12	Rp. 97.339.640	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan telisa	
3.25.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
3.25.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 45.955.200	1	Rp. 43.552.027	Kegiatan berjalan dengan lancar	Efisiensi	
3.25.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Rp. 128.065.600	3	Rp. 92.459.668	Menyesuaikan pengajuan pemeliharaan	Sesuai kebutuhan pemeliharaan	
3.25.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35	Rp. 25.000.000	24	Rp. 16.775.000	Menyesuaikan pengajuan pemeliharaan	Sesuai kebutuhan pemeliharaan	
3.25.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Rp. 35.700.000	2	Rp. 35.500.000	Kegiatan berjalan dengan lancar	Efisiensi	
3.25.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17	Rp. 10.000.000	14	Rp. 7.040.000	Sesuai pengajuan pemeliharaan	Sesuai kebutuhan pemeliharaan	
3.25.03			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
3.25.03.2.01				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.03.2.02				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							
3.25.03.2.02.01				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	4000	Rp. 679.672.000	3660	Rp. 338.247.600	Menyesuaikan jumlah penerima asuransi nelayan	Sesuai dokumen yang diajukan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan Nelayan.
3.25.03.2.02.02				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	5	Rp. 23.350.000	5	Rp. 23.350.000	Kegiatan berjalan dengan lancar	Sesuai pagu anggaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Nelayan.
3.25.03.2.03				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							
3.25.03.2.06				Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusah							
3.25.04			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
3.25.04.2.02				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							
3.25.04.2.02.04				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10	Rp. 176.855.000	10	Rp. 168.920.000	Kegiatan berjalan dengan lancar	Efisiensi	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.04.2.02.03				Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	25	Rp. 60.000.000	1	Rp. 29.000.000	Pemberian bantuan berupa mesin pakan dinilai tidak efisien bagi penerima aspirasi	Hanya diberikan bantuan berupa benih ikan	
3.25.04.2.04				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							
3.25.04.2.04.01				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Rp. 367.102.000	1	Rp. 312.482.075	Kegiatan berjalan dengan lancar	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas	
3.25.04.2.04.02				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7,9E+07	Rp. 279.285.000	7,8E+07	Rp. 277.151.500	Kegiatan berjalan dengan lancar	Efisiensi	
3.25.04.2.04.03				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	Rp. 363.635.000	10	Rp. 352.273.000	Kegiatan berjalan dengan lancar	Efisiensi	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali potensi perikanan yang dimiliki Jember.
3.25.05			MENINGKATKAN KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3.25.05.2.01				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.05.2 .01.01				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	Rp. 236.778.000	1	Rp. 225.542.950	0	Efisiensi	
3.25.06		MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERIKANAN		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
3.25.06.2 .01				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							
3.25.06.2 .02				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							
3.25.06.2 .02.01				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	30	Rp. 28.350.000	27	Rp. 25.441.500	Kegiatan berjalan dengan lancar	Efisiensi	
3.25.06.2 .03				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							
3.25.06.2 .03.01				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	158	Rp. 164.062.000	158	Rp. 161.611.000	Kegiatan berjalan dengan lancar	Efisiensi	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mempermudah ijin dan birokrasi dalam meningkatkan pengelolaan TPI (cold storage).
3.27.0.00 .0.00.1..0 000		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN									



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.27.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
3.27.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
3.27.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Rp. 22.700.040	10	Rp. 17.666.000	-	-	
3.27.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
3.27.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp. 18.977.633.651	12	Rp. 18.537.389.617	-	-	
3.27.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 995.724.700	12	Rp. 700.948.395	-	-	
3.27.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
3.27.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Rp. 172.843.400	12	Rp. 157.771.000	-	-	
3.27.01.2.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	Rp. 219.063.200	100	Rp. 212.005.000	tidak ada masalah	-	
3.27.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Rp. 472.798.500	12	Rp. 395.084.800	-	-	
3.27.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	Rp. 9.662.200	100	Rp. 4.804.000	-	-	
3.27.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
3.27.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
3.27.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp. 2.180.000	12	Rp. 1.880.000	tidak ada masalah	-	
3.27.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 112.609.056	12	Rp. 111.720.791	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 2.416.742.900	100	Rp. 2.372.475.853	-	-	
3.27.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
3.27.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 186.195.900	100	Rp. 151.173.230	-	-	
3.27.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Rp. 439.590.000	12	Rp. 369.854.700	tidak ada masalah	-	
3.27.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Rp. 35.000.000	12	Rp. 21.180.000	-	-	
3.27.02			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
3.27.02.2.01				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							
3.27.02.2.01.01				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	Rp. 4.621.918.750	1	Rp. 3.829.599.200	tidak ada masalah	tambahan 3 unit	
3.27.02.2.01.02				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	Rp. 8.607.546.000	1	Rp. 8.367.990.275	tidak ada masalah	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.03			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
3.27.03.2.01				Pengembangan Prasarana Pertanian							
3.27.03.2.01.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	1	Rp. 448.674.810	1	Rp. 223.617.300	tidak ada masalah	-	
3.27.03.2.02				Pembangunan Prasarana Pertanian							
3.27.03.2.02.01				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	8	Rp. 4.352.308.096	8	Rp. 3.424.475.500	tidak ada masalah	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan teknologi pertanian (alat pertanian, dan pupuk).
3.27.03.2.02.03				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7	Rp. 3.140.005.600	7	Rp. 2.383.887.000	tidak ada masalah	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan teknologi pertanian (alat pertanian, dan pupuk).
3.27.03.2.02.08				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	2	Rp. 1.730.132.120	2	Rp. 1.242.622.000	tidak ada masalah	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.03.2.02.09				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1	Rp. 705.000.000	1	Rp. 288.400.000	-	-	
3.27.05			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
3.27.05.2.01				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							
3.27.05.2.01.01				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	86154	Rp. 409.100.000	86154	Rp. 391.093.125	tidak ada masalah	-	
3.27.06			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							
3.27.06.2.01				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
3.27.07			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							
3.27.07.2.01				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.07.2.01.01				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	31	Rp. 69.999.840	31	Rp. 54.600.000	tidak ada masalah	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan peran Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian sesuai dengan tupoksinya dilapangan.
3.27.07.2.01.02				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	5	Rp. 215.128.100	5	Rp. 191.695.000	tidak ada masalah	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan program pemberdayaan pada kelompok tani.
3.27.07.2.01.03				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2	Rp. 1.607.768.000	2	Rp. 1.394.722.000	tidak ada masalah	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan program pemberdayaan pada kelompok tani.
3.27.07.2.01.05				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	18	Rp. 2.391.971.000	18	Rp. 1.493.272.905	tidak ada masalah	-	
3.31.3.30.00.1.000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp. 440.000	3	Rp. 0	belum dilaksanakan	Dilaksanakan awal waktu	
3.30.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
3.30.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Rp. 10.342.966.234	1	Rp. 9.945.761.875	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 116.906.440	12	Rp. 115.674.000	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
3.30.01.2.05.10				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Rp. 236.316.740	1	Rp. 215.863.790	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
3.30.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp. 281.700	1	Rp. 273.000	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Rp. 194.523.890	1	Rp. 165.284.250	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Rp. 261.233.500	1	Rp. 242.150.250	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp. 337.765.000	12	Rp. 285.178.856	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
3.30.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp. 200.000	1	Rp. 200.000	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 458.861.497	12	Rp. 419.062.587	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Rp. 218.000	12	Rp. 195.600	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Rp. 5.276.482.800	1	Rp. 5.026.671.200	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
3.30.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 111.041.647	1	Rp. 50.447.692	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64	Rp. 392.775.760	64	Rp. 288.053.414	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Rp. 3.000.000	12	Rp. 990.000	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Rp. 2.716.000	0	Rp. 0	Kegiatan tidak dilaksanakan	Kegiatan tidak dilaksanakan	
3.30.03			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							
3.30.03.2.01				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.03.2 .01.01				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Rp. 282.868.500	1	Rp. 55.967.500	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengarahkan program revitalisasi pasar lebih substantif mendorong pasar berstandart SNI sebagaimana diatur dalam Ketentuan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN yang didalamnya mengatur Pedoman pasar Rakyat serta PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.03.2.01.02				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	36	Rp. 506.620.000	36	Rp. 446.379.805	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuat kebijakan dan program perlindungan pedagang / pasar tradisional ditengah fenomena gempuran masuknya pasar modern dan berjangkauan.
3.30.04		MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								
3.30.04.2.01			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
3.30.04.2.01.03				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1000	Rp. 5.056.000	0	Rp. 1.890.000	Kegiatan tidak terlaksana (Hanya Koordinasi)	Akan dioptimalkan pada tahun berikutnya	
3.30.04.2.02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								
3.30.04.2.02.03				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	31	Rp. 2.167.257.114	31	Rp. 1.430.327.500	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.04.2.03			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.05			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
3.30.05.2.01				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
3.30.05.2.01.02				Pameran Dagang Nasional	1	Rp. 3.849.984.100	1	Rp. 220.470.000	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.30.06			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
3.30.06.2.01				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							
3.30.06.2.01.01				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	30000	Rp. 215.581.464	30000	Rp. 39.121.000	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.02			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.31.02.2.01				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
3.31.02.2.01.02				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	100	Rp. 1.710.190.766	100	Rp. 571.964.100	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	
3.31.02.2.01.05				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	120	Rp. 11.305.050.400	120	Rp. 799.492.246	Sudah dilaksanakan	Dilaksanakan tepat waktu	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera membuat perencanaan dan program dalam menumbuhkan kluster industri berbasis pertanian. b) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mendorong terbentuknya wirausaha baru sektor industri berbasis potensi unggulan daerah. c) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Pertembakauan di Jember untuk memberikan perlindungan kepentingan petani dan pengusaha tembakau di Jember. d) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih mengoptimalkan dana DBHCHT dengan ketentuan peraturan



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.0.00 .000.1..0 000		BAGIAN HUKUM									
4	UNSUR PENDUKUNG										
4,01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
4.01.01.2 .01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
4.01.01.2 .01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	Rp. 7.581.000	7	Rp. 3.221.000	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah dilaksanakan	
4.01.01.2 .01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	7	Rp. 7.581.000	7	Rp. 6.449.000	sedang dalam proses	pencairan menyesuaikan kegiatan	
4.01.01.2 .01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7	Rp. 7.581.000	1	Rp. 297.000	kegiatan sudah tidak dilaksanakan	kegiatan sudah tidak ada	
4.01.01.2 .01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7	Rp. 7.581.000	7	Rp. 6.229.000	sedang dalam proses	pencairan menyesuaikan kegiatan	
4.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4.01.01.2 .02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 778.564.052	12	Rp. 599.818.415	pencairan menyesuaikan anggaran kas	efisiensi anggaran	
4.01.01.2 .06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4.01.01.2 .06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Rp. 13.256.500	1	Rp. 12.397.000	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah dilaksanakan	
4.01.01.2 .06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp. 300.026.000	12	Rp. 310.946.245	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.02			MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
4.01.02.2.03				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							
4.01.02.2.03.01				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	673	Rp. 576.400.000	650	Rp. 283.168.550	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan menyesuaikan kegiatan	
4.01.02.2.03.03				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	600	Rp. 71.560.000	160	Rp. 78.750.000	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan menyesuaikan kegiatan	
4.01.02.2.03.02				Fasilitasi Bantuan Hukum	113	Rp. 1.780.650.000	113	Rp. 1.568.036.200	pencairan menyesuaikan anggaran kas	capaian realisasi kinerja melebihi target yaitu 168	
4.01.0.00.0.00.3..000		BAGIAN PEMBANGUNAN									
4	UNSUR PENDUKUNG										
4.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
4.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4.01.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 851.318.000	12	Rp. 721.469.165	pencairan menyesuaikan anggaran kas	efisiensi anggaran	
4.01.01.2.02.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	72	Rp. 314.560.000	72	Rp. 280.378.000	Melebihi target 72 laporan OPD pertriwulan	Menambahkan target pada perencanaan di tahun selanjutnya	
4.01.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01.2.05.11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Rp. 121.950.000	4	Rp. 101.318.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	Rp. 52.054.800	15	Rp. 18.385.876	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah tidak ada	
4.01.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Rp. 82.350.700	4	Rp. 68.819.778	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah dilaksanakan	
4.01.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10	Rp. 168.335.000	10	Rp. 162.267.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.01.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp. 3.825.000	12	Rp. 2.100.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 5.280.000	12	Rp. 783.831	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Rp. 80.000.000	12	Rp. 17.535.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 486.775.000	12	Rp. 689.774.070	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 24.865.000	1	Rp. 5.994.522	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9	Rp. 45.545.000	9	Rp. 11.595.524	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.03			MENINGKATNYA STABILITAS HARGA BARANG POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
4.01.03.2.02				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							
4.01.03.2.02.01				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	3	Rp. 461.410.000	3	Rp. 338.378.900	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.03.2.03				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
4.01.03.2.03.01				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Rp. 1.866.569.000	12	Rp. 1.566.549.905	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.03.2.03.02				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	12	Rp. 638.204.000	12	Rp. 817.634.993	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.0.00 .0.00.33. 0000		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4	UNSUR PENDUKUNG										
4.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
4.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4.01.01.2 .02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 467.618.000	12	Rp. 311.503.000	pencairan menyesuaikan anggaran kas	efisiensi anggaran	
4.01.01.2 .06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4.01.01.2 .06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Rp. 12.985.002	0	Rp. 0	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah tidak ada	
4.01.01.2 .06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Rp. 206.660.496	10	Rp. 54.243.150	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah dilaksanakan	
4.01.01.2 .06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Rp. 35.582.580	1	Rp. 16.940.570	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2 .06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp. 437.474.600	10	Rp. 168.630.300	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	
4.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.01.01.2 .08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp. 37.400.000	5	Rp. 11.280.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2 .08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 13.200.000	12	Rp. 7.995.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8	Rp. 61.972.200	7	Rp. 10.912.990	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	Rp. 70.000.000	10	Rp. 2.025.000	Pelaksanaan kegiatan tentatif sesuai kebutuhan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan & anggaran	
4.01.02			MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
4.01.02.2.02				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							
4.01.02.2.02.01				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16	Rp. 5.236.353.360	15	Rp. 2.235.241.285	Pelaksanaan kegiatan tentatif sesuai kebutuhan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan & anggaran	
4.01.02.2.02.02				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4	Rp. 19.564.920.000	3	Rp. 16.790.274.400	Pelaksanaan kegiatan tentatif sesuai kebutuhan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan & anggaran	
4.01.02.2.02.03				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3	Rp. 1.554.243.410	3	Rp. 983.400.000	Pelaksanaan kegiatan tentatif sesuai kebutuhan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan & anggaran	
4.01.02.2.04				Fasilitasi Kerjasama Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.02.2.04.01				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6	Rp. 1.687.469.730	6	Rp. 1.229.790.526	Pelaksanaan kegiatan tentatif sesuai kebutuhan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan & anggaran	
4.01.0.00.0.00.4.0.000		BAGIAN ORGANISASI									
4	UNSUR PENDUKUNG										
4.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
4.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
4.01.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Rp. 16.511.300	2	Rp. 15.231.300	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah dilaksanakan	
4.01.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	Rp. 16.511.296	2	Rp. 15.231.300	sedang dalam proses	pencairan menyesuaikan kegiatan	
4.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4.01.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Rp. 195.487.100	100	Rp. 203.415.600	pencairan menyesuaikan anggaran kas	efisiensi anggaran	
4.01.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
4.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4.01.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	Rp. 81.447.100	100	Rp. 72.022.750	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah dilaksanakan	
4.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.01.01.2.13				Penataan Organisasi							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjnt Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01.2 .13.01				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	72	Rp. 403.306.000	72	Rp. 384.200.050	Tidak ada kendala	seluruh proses kegiatan telah terlaksana	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih professional melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Inovasi Daerah.
4.01.01.2 .13.02				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	72	Rp. 314.294.200	72	Rp. 176.899.700	Tidak ada Kendala	seluruh proses kegiatan telah terlaksana	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih professional melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Inovasi Daerah.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01.2 .13.03				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	72	Rp. 248.082.000	72	Rp. 201.246.200	Tidak ada Kendala	seluruh proses kegiatan telah terlaksana	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dengan meningkatkan status WDP menjadi WTP serta peningkatan kinerja program melalui peningkatan nilai SAKIP. b) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih profesional melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Inovasi Daerah.
4.01.01.2 .09				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
4.01.01.2 .09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30	Rp. 50.876.500	30	Rp. 50.253.000	Pelaksanaan kegiatan tentatif sesuai kebutuhan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan & anggaran	
4.01.0.00 .0.00.7..0 000		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
4	UNSUR PENDUKUNG										
4.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
4.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp. 1.103.676.800	12	Rp. 1.045.368.477	penyerapan anggaran dan realisasi kinerja sudah sesuai dengan jadwal	penyerapan akan terus dilakukan tiap bulannya	
4.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Rp. 215.720.700	9	Rp. 214.907.000	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah tidak ada	
4.01.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Rp. 320.808.100	12	Rp. 308.671.151	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah dilaksanakan	
4.01.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Rp. 100.982.000	12	Rp. 100.144.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.01.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 54.001.452	12	Rp. 52.361.353	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9	Rp. 312.691.150	9	Rp. 306.274.700	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Rp. 35.000.000	3	Rp. 33.565.600	Pelaksanaan kegiatan tentatif sesuai kebutuhan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan & anggaran	
4.01.01.2.14				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01.2 .14.01				Fasilitas Keprotokolan	600	Rp. 1.391.134.800	600	Rp. 1.331.822.564	penyerapan anggaran dan realisasi kinerja sudah sesuai dengan jadwal	penyerapan anggaran dan realisasi kinerja sudah sesuai dengan jadwal	
4.01.01.2 .14.03				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	800	Rp. 2.723.895.800	800	Rp. 2.623.823.800	penyerapan anggaran dan realisasi kinerja sudah sesuai dengan jadwal	penyerapan anggaran dan realisasi kinerja sudah sesuai dengan jadwal	
4.01.0.00 .0.00.8.0 000		BAGIAN UMUM									
4	UNSUR PENDUKUNG										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
4.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	140	Rp. 16.380.633.189	140	Rp. 15.514.422.787	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.01.01.2 .02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Rp. 2.059.200.000	48	Rp. 1.992.845.000	pencairan menyesuaikan anggaran kas	efisiensi anggaran	
4.01.01.2 .03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
4.01.01.2 .03.02				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Rp. 18.000.000	4	Rp. 17.526.314	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.01.01.2 .05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
4.01.01.2 .05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6	Rp. 432.350.000	6	Rp. 385.866.369	0	0	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4.01.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp. 214.085.800	12	Rp. 207.887.556	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp. 276.438.600	6	Rp. 237.773.852	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah tidak ada	
4.01.01.2.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Rp. 69.922.600	1	Rp. 8.946.300	Belum Maksimal Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatkan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	
4.01.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Rp. 4.213.088.200	48	Rp. 4.200.244.012	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah dilaksanakan	
4.01.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Rp. 273.121.900	11	Rp. 229.251.970	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12	Rp. 6.000.000	0	Rp. 0	Kegiatan tidak dilaksanakan	Kegiatan tidak dilaksanakan	
4.01.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Rp. 2.884.554.000	47	Rp. 2.781.733.937	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	
4.01.01.2.06.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Rp. 3.000.550.000	70	Rp. 2.840.530.643	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.01.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp. 216.931.400	12	Rp. 166.078.050	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	Rp. 2.576.439.450	24	Rp. 2.515.991.704	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	Rp. 1.755.664.500	34	Rp. 1.626.637.100	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24	Rp. 2.238.650.000	24	Rp. 2.179.853.450	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40	Rp. 1.095.440.000	34	Rp. 954.435.243	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120	Rp. 2.390.625.000	100	Rp. 1.973.615.538	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Rp. 285.000.000	57	Rp. 164.430.004	Pelaksanaan kegiatan tentatif sesuai kebutuhan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan & anggaran	
4.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Rp. 1.482.030.000	6	Rp. 1.437.990.850	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.01.01.2.09.05				Pemeliharaan Mebel	100	Rp. 100.000.000	100	Rp. 99.661.200	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.01.01.2.11				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01.2.11.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Rp. 178.335.027	2	Rp. 174.299.721	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.01.01.2.11.02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	Rp. 259.650.000	4	Rp. 117.030.000	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.01.01.2.11.04				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Rp. 1.102.053.775	2	Rp. 959.641.500	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.01.01.2.12				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							
4.01.01.2.12.01				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12	Rp. 706.584.200	11	Rp. 618.543.300	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.01.01.2.12.02				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12	Rp. 501.852.600	11	Rp. 456.907.100	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.01.3.30.0.00.2.000		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM									
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.30.04		MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								
3.30.04.2.03			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.04.2.03.03				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12	Rp. 58.271.100	12	Rp. 47.623.800	belum dilaksanakan	Dilaksanakan awal waktu	
3.30.07			MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
3.30.07.2.01				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							
3.30.07.2.01.01				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100	Rp. 1.602.844.000	100	Rp. 1.423.937.225	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	
4	UNSUR PENDUKUNG										
4.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
4.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
4.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Rp. 5.358.000	6	Rp. 4.889.800	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	
4.01.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Rp. 1.373.200	6	Rp. 1.373.200	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	
4.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4.01.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 218.886.700	12	Rp. 207.074.360	pencairan menyesuaikan anggaran kas	efisiensi anggaran	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4.01.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Rp. 1.336.500	1	Rp. 1.336.500	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah dilaksanakan	
4.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.01.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp. 12.357.000	12	Rp. 12.357.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Rp. 19.000.000	1	Rp. 6.353.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	Rp. 16.000.000	20	Rp. 5.200.000	Pelaksanaan kegiatan tentatif sesuai kebutuhan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan & anggaran	
4.01.03			MENINGKATNYA STABILITAS HARGA BARANG POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
4.01.03.2.01				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							
4.01.03.2.01.01				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	Rp. 212.136.200	12	Rp. 164.599.270	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.03.2.01.02				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	Rp. 169.045.000	12	Rp. 11.709.100	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	
4.01.03.2.01.03				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	12	Rp. 27.755.000	12	Rp. 34.040.000	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	
4.01.03.2.01.05				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4	Rp. 48.398.000	4	Rp. 3.988.000	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	
4.01.03.2.04				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							
4.01.03.2.04.01				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12	Rp. 4.983.000	12	Rp. 4.983.000	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	
4.01.03.2.04.02				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4	Rp. 28.916.000	4	Rp. 4.635.000	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	
4.02.0.00.0.00.1.000		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH									
4	UNSUR PENDUKUNG										
4,02	SEKRETARIAT DPRD										
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
4.02.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp. 41.280.650	2	Rp. 19.533.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp. 28.334.700	1	Rp. 18.506.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Rp. 24.881.830	1	Rp. 13.136.200	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Rp. 28.871.860	1	Rp. 5.487.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Rp. 24.914.500	1	Rp. 22.746.600	0	0	
4.02.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4.02.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37	Rp. 4.177.603.562	37	Rp. 4.226.006.839	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4.02.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp. 110.517.200	1	Rp. 48.852.488	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp. 1.162.808.960	1	Rp. 2.321.365.350	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Rp. 153.686.800	12	Rp. 95.934.920	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Rp. 236.337.000	1	Rp. 216.588.015	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12	Rp. 38.206.280	12	Rp. 35.317.820	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96	Rp. 664.685.000	96	Rp. 317.347.620	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.02.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp. 73.120.000	1	Rp. 18.724.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.01.2 .08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 522.580.780	12	Rp. 637.445.022	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 508.555.000	12	Rp. 526.169.740	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.02.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9	Rp. 577.024.500	9	Rp. 508.467.980	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2 .09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16	Rp. 305.281.300	16	Rp. 214.562.430	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2 .09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	Rp. 731.660.000	50	Rp. 437.915.500	0	0	
4.02.01.2 .09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp. 2.555.983.940	1	Rp. 1.947.771.764	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2 .15				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.01.2 .15.01				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50	Rp. 31.508.258.063	50	Rp. 31.138.426.542	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2 .15.02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	240	Rp. 596.700.000	240	Rp. 570.781.750	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.01.2 .15.03				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50	Rp. 150.000.000	31	Rp. 95.200.000	Tidak semua melaksanakan MCU dikarenakan ada jadwal kegiatan yang bersamaan dan ada yang sedang sakit	penyesuaian jadwal proses MCU pada tahun berikutnya	
4.02.01.2 .16				Layanan Administrasi DPRD							
4.02.01.2 .16.03				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6	Rp. 118.514.019	6	Rp. 65.796.790	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.02			TERINTEGRASINYA PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA, DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN RPJMD DAN RKPD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
4.02.02.2.01				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							
4.02.02.2.01.01				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Rp. 56.435.320	1	Rp. 29.929.600	perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan usulan propemperda yang akan diusulkan	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja serta koordinasi dengan berbagai pihak	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.02.2.01.02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2	Rp. 292.491.120	2	Rp. 113.688.800	perubahan aturan/regulasi sehingga pada saat pembahasan membutuhkan koordinasi lebih lanjut	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja serta koordinasi dengan pihak terkait	
4.02.02.2.01.04				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4	Rp. 581.335.500	4	Rp. 252.234.480	Adanya perubahan aturan/regulasi	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja serta koordinasi dengan pihak terkait	
4.02.02.2.02				Pembahasan Kebijakan Anggaran							
4.02.02.2.02.02				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Rp. 77.275.100	2	Rp. 50.612.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2.02.04				Pembahasan APBD Perubahan	1	Rp. 119.520.850	1	Rp. 92.818.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2.02.06				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Rp. 108.630.300	1	Rp. 86.224.955	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.02.2.02.01				Pembahasan KUA dan PPAS	2	Rp. 110.459.866	2	Rp. 92.075.500	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2.02.03				Pembahasan APBD	1	Rp. 207.912.600	1	Rp. 175.522.375	0	0	
4.02.02.2.03				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
4.02.02.2.03.01				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1	Rp. 77.247.205	1	Rp. 65.111.440	Jadwal kegiatan AKD yang sering berubah-ubah	penyesuaian jadwal kegiatan AKD serta penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2.03.02				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	Rp. 82.115.810	12	Rp. 50.100.300	Jadwal kegiatan AKD yang sering berubah-ubah	penyesuaian jadwal kegiatan AKD serta penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2.03.03				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Rp. 97.897.830	1	Rp. 54.033.230	Jadwal kegiatan AKD yang sering berubah-ubah	penyesuaian jadwal kegiatan AKD serta penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.02.2 .03.04				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	Rp. 84.229.400	12	Rp. 39.020.450	Jadwal kegiatan AKD yang sering berubah-ubah	penyesuaian jadwal kegiatan AKD serta penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2 .03.05				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	Rp. 90.156.120	1	Rp. 35.437.870	Jadwal kegiatan AKD yang sering berubah-ubah	penyesuaian jadwal kegiatan AKD serta penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2 .03.06				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Rp. 84.265.950	1	Rp. 26.112.450	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2 .03.07				Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	Rp. 75.422.030	1	Rp. 45.843.680	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2 .03.08				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Rp. 175.428.400	1	Rp. 113.071.050	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2 .04				Peningkatan Kapasitas DPRD							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.02.2 .04.03				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2	Rp. 330.761.270	2	Rp. 148.525.824	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2 .04.04				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5	Rp. 378.751.680	5	Rp. 362.492.620	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2 .04.05				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7	Rp. 426.262.080	7	Rp. 425.724.788	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2 .04.06				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Rp. 57.193.900	12	Rp. 109.542.500	Kuota jumlah tamu yang datang untuk melaksanakan koordinasi melebihi dari kuota yang ada	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2 .04.07				Penyusunan Program Kerja DPRD	1	Rp. 25.334.500	1	Rp. 4.623.500	Adanya perubahan aturan/regulasi serta jadwal AKD yang berubah-ubah	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2 .05				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.02.2.05.01				Kunjungan Kerja dalam Daerah	72	Rp. 88.955.000	72	Rp. 80.180.000	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2.05.02				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1	Rp. 108.458.000	1	Rp. 52.972.800	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2.05.03				Pelaksanaan Reses	3	Rp. 2.093.861.700	3	Rp. 1.901.740.500	Jadwal yang berubah menyesuaikan kegiatan anggota	penyesuaian jadwal kegiatan dan perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2.06				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							
4.02.02.2.06.02				Pengawasan Kode Etik DPRD	4	Rp. 23.270.530	4	Rp. 3.236.450	nihil	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
4.02.02.2.08				Fasilitasi Tugas DPRD							
4.02.02.2.08.01				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Rp. 15.012.387.600	12	Rp. 16.881.472.919	Perubahan lokasi, waktu dan kegiatan koordinasi serta konsultasi	penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja pada tahun berikutnya	
5.01.4.01.5.06.1..000		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN									



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4	UNSUR PENDUKUNG										
4.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
4.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
4.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp. 8.289.126	3	Rp. 5.950.000	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	
4.01.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp. 9.114.420	1	Rp. 1.000.000	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah dilaksanakan	
4.01.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Rp. 8.198.400	1	Rp. 5.740.000	sedang dalam proses	pencairan menyesuaikan kegiatan	
4.01.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Rp. 8.580.840	0	Rp. 0	rekening honor lembur tidak dapat dicairkan	penyesuaian pada perencanaan tahun berikutnya	
4.01.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Rp. 8.502.708	0	Rp. 0	rekening honor lembur tidak dapat dicairkan	penyesuaian pada perencanaan tahun berikutnya	
4.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4.01.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 459.324.453	12	Rp. 452.319.746	pencairan menyesuaikan anggaran kas	efisiensi anggaran	
4.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp. 7.399.840	1	Rp. 7.399.840	kegiatan sudah tidak ada	kegiatan sudah tidak ada	
4.01.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Rp. 5.605.270	12	Rp. 5.605.270	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	Nihil	
4.01.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp. 272.454.000	12	Rp. 269.325.340	pencairan menyesuaikan anggaran kas	pencairan mengikuti kegiatan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01.2.06.08				kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	12	Rp. 4.831.200	12	Rp. 4.532.200	Tidak Ada	Tidak Ada	
4.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.01.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Rp. 27.600.000	12	Rp. 25.810.498	Pelaksanaan kegiatan tentatif sesuai kebutuhan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan & anggaran	
4.01.01.2.13				Penataan Organisasi							
4.01.01.2.13.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Rp. 17.920.000	1	Rp. 7.150.000	0	0	
4.01.01.2.14				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							
4.01.02			MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
4.01.02.2.01				Administrasi Tata Pemerintahan							
4.01.02.2.01.01				Penataan Administrasi Pemerintahan	12	Rp. 65.348.372	12	Rp. 57.783.000	tidak ada permasalahan pelaksanaan kegiatan	pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	
4.01.02.2.01.02				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	Rp. 35.969.200	3	Rp. 26.517.000	tidak ada permasalahan pelaksanaan kegiatan	pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.02.2.01.03				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	Rp. 290.648.888	100	Rp. 283.153.389	tidak ada permasalahan pelaksanaan kegiatan	pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan	
4.01.02.2.04				Fasilitasi Kerjasama Daerah							
4.01.02.2.04.01				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100	Rp. 627.501.685	100	Rp. 610.400.740	Pelaksanaan kegiatan tentatif sesuai kebutuhan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan & anggaran	
5.01.5.05.000.1.000		BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH									
5	UNSUR PENUNJANG										
5,01	PERENCANAAN										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
5.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Rp. 33.637.418	6	Rp. 15	0	0	
5.01.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Rp. 73.318.290	2	Rp. 28.594.000	rekening honor lembur tidak dapat dicairkan	penyesuaian pada perencanaan tahun berikutnya	
5.01.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	Rp. 11.045.100	0	Rp. 0	rekening belanja dialihkan pada sub kegiatan lain	penyesuaian pada perencanaan tahun berikutnya	
5.01.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp. 20.847.000	1	Rp. 0	0	0	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
5.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 4.594.561.115	7	Rp. 1.614.622.870	0	0	
5.01.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp. 276.900.000	5	Rp. 78.930.000	0	0	
5.01.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
5.01.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Rp. 134.983.320	1	Rp. 108.225.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	-	
5.01.01.2.05.09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	Rp. 476.233.500	50	Rp. 463.302.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	-	
5.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
5.01.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	Rp. 13.228.050	0	Rp. 0	kegiatan tidak dilaksanakan	anggaran dialihkan pada perubahan APBD 2022	
5.01.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	Rp. 74.354.400	1	Rp. 1.000.000	0	0	
5.01.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	Rp. 52.296.120	100	Rp. 51.150.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	-	
5.01.01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Rp. 6.660.000	12	Rp. 3.960.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	-	
5.01.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Rp. 273.788.000	25	Rp. 40.361.148	0	0	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
5.01.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Rp. 21.544.800	1	Rp. 19.252.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	-	
5.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.01.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 86.400.264	3	Rp. 13.442.202	0	0	
5.01.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp. 8.600.000	1	Rp. 8.594.500	Tidak ada permasalahan yang dihadapi	-	
5.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 876.111.500	5	Rp. 241.200.000	0	0	
5.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 44.100.000	50	Rp. 7.900.000	0	0	
5.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 283.440.000	25	Rp. 28.107.000	0	0	
5.01.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Rp. 75.375.000	25	Rp. 2.346.058	0	0	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.01.2.09.11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	Rp. 66.155.000	0	Rp. 0	dalam proses menunggu persetujuan pemakaian ruangan	anggaran dialihkan pada perubahan APBD 2022	
5.01.02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
5.01.02.2.01				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							
5.01.02.2.01.01				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	100	Rp. 5.400.000	100	Rp. 5.400.000	Kegiatan FGD dilaksanakan oleh Bidang Mitra di Bappeda	Sehingga sebagian besar alokasi anggaran digeser ke subkegiatan yang lebih prioritas dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan lain	
5.01.02.2.01.03				Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	Rp. 56.569.984	1	Rp. 17.830.000	0	0	
5.01.02.2.01.04				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	Rp. 143.647.950	1	Rp. 41.425.000	0	0	
5.01.02.2.01.05				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Rp. 223.567.640	1	Rp. 58.530.000	0	0	
5.01.02.2.01.06				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	31	Rp. 136.049.990	31	Rp. 46.423.000	0	0	
5.01.02.2.01.07				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4	Rp. 384.807.850	2	Rp. 104.007.000	0	0	
5.01.02.2.02				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.02.2 .02.01				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Rp. 66.566.450	100	Rp. 42.850.725	Alokasi anggaran honor dan lembur PNS tidak dapat dicairkan namun demikian kegiatan dapat terlaksana dengan baik melalui pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan	Alokasi anggaran yang tidak dapat direalisasikan menjadi Silpa sebagai potensi kekuatan APBD tahun anggaran berikutnya	
5.01.02.2 .02.03				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	150	Rp. 147.603.140	150	Rp. 142.896.000	Tidak ada permasalahan yang dihadapi, kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai anggaran yang tersedia	kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan KAK	
5.01.02.2 .03				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.02.2 .03.03				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20	Rp. 595.503.730	20	Rp. 466.597.679	Alokasi anggaran honor dan lembur PNS tidak dapat dicairkan namun demikian kegiatan dapat terlaksana dengan baik melalui pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan	Alokasi anggaran yang tidak dapat direalisasikan menjadi Silpa sebagai potensi kekuatan APBD tahun anggaran berikutnya	
5.01.03		TERSEDIAANYA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG, MENENGAH, DAN/ATAU TAHUNAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
5.01.03.2 .01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.03.2.01.03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14	Rp. 124.934.530	14	Rp. 400.000	0	0	
5.01.03.2.01.04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100	Rp. 346.361.780	35,9	Rp. 96.548.000	0	0	
5.01.03.2.01.07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Rp. 133.859.700	4	Rp. 12.260.000	0	0	
5.01.03.2.01.08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100	Rp. 399.474.380	26,2	Rp. 80.342.000	0	0	
5.01.03.2.02				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
5.01.03.2.02.03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	Rp. 268.792.800	1	Rp. 5.519.350	0	0	
5.01.03.2.02.04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100	Rp. 532.232.090	40	Rp. 189.920.840	0	0	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.03.2.02.07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	Rp. 259.454.870	0	Rp. 2.856.150	0	0	
5.01.03.2.02.08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	100	Rp. 172.996.640	30	Rp. 24.636.860	0	0	
5.01.03.2.03				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							
5.01.03.2.03.02				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9	Rp. 308.159.290	0	Rp. 10.738.974	0	0	
5.01.03.2.03.03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	Rp. 135.020.640	1	Rp. 0	0	0	
5.01.03.2.03.04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100	Rp. 354.818.320	16	Rp. 58.630.000	0	0	
5.01.03.2.03.07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	Rp. 109.332.740	1	Rp. 8.530.000	0	0	
5.01.03.2.03.08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	100	Rp. 236.969.720	16	Rp. 255.130.000	0	0	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjnut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02			TERSEDIA NYA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG, MENENGAH, DAN/ATAU TAHUNAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
5.05.02.2.02				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							
5.05.02.2.02.10				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	100	Rp. 477.160.000	75	Rp. 380.428.200	ada 1 Kajian yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu	sudah dianggarkan di tahun anggaran berikutnya	
5.05.02.2.03				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							
5.05.02.2.03.03				Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	100	Rp. 407.944.573	0	Rp. 0	ada 2 Kajian yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu	sudah dianggarkan di tahun anggaran berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.05.02.2.03.07				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	100	Rp. 389.466.540	100	Rp. 384.233.200	kegiatan Penelitian sudah selesai pada TW 3	-	
5.05.02.2.03.12				Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	100	Rp. 342.062.540	100	Rp. 337.414.000	kegiatan Penelitian sudah selesai pada TW 3	-	
5.02.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - PPKD									
5.02.0.00.0.00.1.0.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - SKPD									
5	UNSUR PENUNJANG										
5,02	KEUANGAN										
5.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
5.02.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
5.02.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Rp. 58.566.040	4	Rp. 58.566.040	-	-	
5.02.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Rp. 85.138.197	1	Rp. 84.340.523	-	-	
5.02.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Rp. 66.275.000	1	Rp. 66.275.000	-	-	
5.02.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	Rp. 30.191.990	2	Rp. 33.528.410	-	-	
5.02.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Rp. 37.144.000	1	Rp. 37.144.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Rp. 67.207.500	4	Rp. 67.207.500	-	-	
5.02.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
5.02.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp. 21.954.469.375	12	Rp. 21.954.469.376	-	-	
5.02.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Rp. 942.078.855	1	Rp. 942.078.856	-	-	
5.02.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 52.597.620	100	Rp. 52.597.620	-	-	
5.02.01.2.02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp. 31.585.150	1	Rp. 31.585.149	-	-	
5.02.01.2.02.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Rp. 23.606.020	18	Rp. 23.606.020	-	-	
5.02.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
5.02.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85	Rp. 85.000.000	85	Rp. 85.000.000	-	-	
5.02.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
5.02.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Rp. 16.655.230	12	Rp. 16.655.230	-	-	
5.02.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Rp. 374.236.280	12	Rp. 374.236.280	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Rp. 117.079.950	12	Rp. 117.079.950	-	-	
5.02.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp. 374.854.000	12	Rp. 374.854.000	-	-	
5.02.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
5.02.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85	Rp. 263.931.800	85	Rp. 263.931.800	-	-	
5.02.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp. 9.152.000	12	Rp. 9.152.000	-	-	
5.02.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 210.000.000	12	Rp. 210.000.000	-	-	
5.02.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Rp. 886.438.200	12	Rp. 886.438.200	-	-	
5.02.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 1.902.165.760	12	Rp. 1.902.165.760	-	-	
5.02.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 73.120.000	1	Rp. 73.120.000	-	-	
5.02.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44	Rp. 571.000.000	44	Rp. 571.000.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
5.02.02.2.01				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							
5.02.02.2.01.03				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	72	Rp. 304.600.000	72	Rp. 304.600.000	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02.2 .01.04				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	72	Rp. 278.186.000	72	Rp. 278.186.000	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.
5.02.02.2 .01.05				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	72	Rp. 220.400.400	72	Rp. 220.400.400	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02.2 .01.06				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	72	Rp. 220.400.400	72	Rp. 220.400.400	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.
5.02.02.2 .01.07				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Rp. 212.318.400	2	Rp. 212.318.400	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02.2 .01.08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Rp. 217.850.400	2	Rp. 217.850.400	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.
5.02.02.2 .01.09				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	Rp. 573.965.600	4	Rp. 573.965.600	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02.2 .01.10				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100	Rp. 79.338.000	100	Rp. 79.338.000	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.
5.02.02.2 .01.11				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100	Rp. 91.690.400	100	Rp. 91.690.400	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02.2 .01.13				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Rp. 1.033.203.400	72	Rp. 1.033.203.400	-	-	a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara. b) Pemerintah daerah harus mengoptimalkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan terutama dalam penggunaan SIPD.
5.02.02.2 .01.01				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	72	Rp. 55.210.400	72	Rp. 55.210.400	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Rp. 175.056.000	1	Rp. 175.056.000	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.
5.02.02.2.02				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							
5.02.02.2.02.05				Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	Rp. 442.765.100	100	Rp. 442.765.100	-	-	
5.02.02.2.02.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1	Rp. 817.405.000	1	Rp. 817.405.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjnt Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02.2 .02.09				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100	Rp. 1.254.757.900	100	Rp. 1.254.757.900	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih professional melalui peningkatan Indenks Reformasi Birokrasi dan Indeks Inovasi Daerah
5.02.02.2 .02.11				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12	Rp. 354.548.400	12	Rp. 354.548.400	-	-	Pemerintah daerah harus mengoptimalkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan terutama dalam penggunaan SIPD.
5.02.02.2 .03				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
5.02.02.2 .03.03				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	260	Rp. 258.893.640	260	Rp. 258.893.640	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dengan meningkatkan status WDP menjadi WTP serta peningkatan kinerja program melalui peningkatan nilai SAKIP.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/lanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02.2 .03.04				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Rp. 674.181.710	1	Rp. 674.181.712	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dengan meningkatkan status WDP menjadi WTP serta peningkatan kinerja program melalui peningkatan nilai SAKIP.
5.02.02.2 .03.05				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Rp. 171.888.120	2	Rp. 171.888.120	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dengan meningkatkan status WDP menjadi WTP serta peningkatan kinerja program melalui peningkatan nilai SAKIP.
5.02.02.2 .03.11				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Rp. 619.888.520	72	Rp. 619.888.521	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dengan meningkatkan status WDP menjadi WTP serta peningkatan kinerja program melalui peningkatan nilai SAKIP.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02.2.04				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
5.02.02.2.04.08				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	226	Rp. 491.694.404.333	226	Rp. 491.694.404.333	-	-	
5.02.02.2.04.09				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100	Rp. 4.906.113.987	100	Rp. 4.906.113.987	-	-	
5.02.02.2.04.10				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	226	Rp. 22.065.196.660	226	Rp. 22.065.196.660	-	-	
5.02.03			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
5.02.03.2.01				Pengelolaan Barang Milik Daerah							
5.02.03.2.01.02				Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Rp. 64.410.500	2	Rp. 64.410.500	-	-	
5.02.03.2.01.03				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	72	Rp. 31.983.300	72	Rp. 31.983.300	-	-	
5.02.03.2.01.04				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Rp. 189.370.700	4	Rp. 189.370.700	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.03.2.01.05				Penatausahaan Barang Milik Daerah	100	Rp. 116.786.100	100	Rp. 116.786.100	-	-	
5.02.03.2.01.06				Inventarisasi Barang Milik Daerah	1300	Rp. 60.420.200	800	Rp. 60.420.200	-	-	
5.02.03.2.01.07				Pengamanan Barang Milik Daerah	1300	Rp. 2.853.387.500	1300	Rp. 2.853.387.500	-	-	
5.02.03.2.01.08				Penilaian Barang Milik Daerah	100	Rp. 559.702.300	100	Rp. 559.702.299	-	-	
5.02.03.2.01.09				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Rp. 23.343.600	100	Rp. 23.343.600	-	-	
5.02.03.2.01.10				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100	Rp. 7.556.404.000	100	Rp. 7.556.404.000	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih professional melalui peningkatan Indenks Reformasi Birokrasi dan Indeks Inovasi Daerah
5.02.03.2.01.11				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	72	Rp. 28.970.200	72	Rp. 28.970.200	-	-	
5.02.03.2.01.12				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	72	Rp. 986.180.000	72	Rp. 986.180.000	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih professional melalui peningkatan Indenks Reformasi Birokrasi dan Indeks Inovasi Daerah



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.03.2.01.13				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2	Rp. 55.308.400	2	Rp. 55.308.400	-	-	
5.02.0.00.0.00.2.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH									
5	UNSUR PENUNJANG										
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
5.02.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Rp. 156.951.700	13	Rp. 141.402.000	-	-	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
5.02.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1308	Rp. 18.509.017.099	1308	Rp. 18.024.918.795	-	-	
5.02.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77	Rp. 1.565.019.571	76	Rp. 1.467.299.115	-	-	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
5.02.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Rp. 6.727.490	3	Rp. 6.651.725	-	-	
5.02.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	Rp. 2.799.790.372	8	Rp. 2.667.842.350	tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13	Rp. 848.258.493	13	Rp. 713.631.880	-	-	
5.02.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10	Rp. 477.921.386	10	Rp. 355.858.300	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Rp. 508.844.000	10	Rp. 345.197.720	-	-	
5.02.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Rp. 5.000.000	2	Rp. 5.000.000	-	-	
5.02.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	Rp. 544.799.670	36	Rp. 515.225.490	-	-	
5.02.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32	Rp. 79.123.120	32	Rp. 49.670.150	-	-	
5.02.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28	Rp. 467.115.472	28	Rp. 387.111.450	-	-	
5.02.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63	Rp. 195.000.000	63	Rp. 147.800.000	tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Rp. 735.246.000	3	Rp. 646.442.427	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
5.02.02.2.03				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
5.02.02.2.03.03				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	20	Rp. 118.076.000	20	Rp. 112.019.000	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dengan meningkatkan status WDP menjadi WTP serta peningkatan kinerja program melalui peningkatan nilai SAKIP.
5.02.04			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
5.02.04.2.01				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.04.2 .01.04				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9	Rp. 161.941.660	9	Rp. 119.700.000	tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2 .01.05				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1500	Rp. 1.051.200.000	1500	Rp. 1.017.986.000	tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2 .01.06				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	Rp. 125.400.000	12	Rp. 51.400.000	tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2 .01.07				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	305977	Rp. 313.477.500	305977	Rp. 256.500.000	tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2 .01.08				Penetapan Wajib Pajak Daerah	1089851	Rp. 180.716.220	1089833	Rp. 178.283.750	tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2 .01.09				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	41126	Rp. 429.787.000	41126	Rp. 408.879.300	tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2 .01.10				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	14050	Rp. 205.190.000	14047	Rp. 176.802.500	Kode pembayaran SPTPD wajib pajak kadaluarsa karena belum terbayar sehingga melewati batas berlakunya Virtual Account	Koordinasi dengan OC untuk menghidupkan kembali Virtual Account tersebut	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.04.2.01.11				Penagihan Pajak Daerah	1404	Rp. 492.952.000	1404	Rp. 421.631.000	Beberapa wajib pajak kurang jujur tentang omset, sehingga pajak yang dibayarkan kurang optimal	Diharapkan dengan pemasangan sinkron box dapat meningkatkan pembayaran pajak dan meningkatkan kejujuran wajib pajak	
5.02.04.2.01.12				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4139	Rp. 98.904.000	4136	Rp. 87.056.000	tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2.01.13				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	154	Rp. 2.304.640.000	154	Rp. 2.198.038.505	tidak terdapat permasalahan	-	
5.02.04.2.01.14				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	80	Rp. 10.760.000	80	Rp. 8.800.000	tidak terdapat permasalahan	-	
5.03.5.04.0.00.1.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM									
5	UNSUR PENUNJANG										
5,03	KEPEGAWAIAN										
5.03.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
5.03.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
5.03.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	Rp. 4.990.480	30	Rp. 4.988.401	0	0	
5.03.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24	Rp. 11.430.078	24	Rp. 11.423.247	0	0	
5.03.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	24	Rp. 4.999.929	24	Rp. 4.998.147	0	0	
5.03.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24	Rp. 6.999.773	24	Rp. 6.996.803	0	0	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.03.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	24	Rp. 5.412.880	24	Rp. 5.407.831	0	0	
5.03.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	Rp. 4.633.420	30	Rp. 4.628.371	0	0	
5.03.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
5.03.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3722	Rp. 163.786.248.694	3722	Rp. 159.647.969.354	Sesuai rencana	-	
5.03.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 610.004.600	12	Rp. 589.591.367	Sesuai rencana	-	
5.03.01.2.02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Rp. 1.998.480	2	Rp. 1.998.480	Sesuai rencana	-	
5.03.01.2.02.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Rp. 3.406.920	4	Rp. 3.406.920	Sesuai rencana	-	
5.03.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
5.03.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	171	Rp. 129.390.000	171	Rp. 122.137.200	0	0	
5.03.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
5.03.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Rp. 143.559.240	4	Rp. 136.307.560	0	0	
5.03.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Rp. 374.309.700	4	Rp. 338.814.320	0	0	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.03.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Rp. 212.583.550	4	Rp. 181.291.700	0	0	
5.03.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4	Rp. 16.999.840	4	Rp. 16.649.710	0	0	
5.03.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.03.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	Rp. 5.250.000	200	Rp. 2.000.000	0	0	
5.03.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 510.827.951	12	Rp. 406.231.600	0	0	
5.03.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Rp. 268.450.000	1	Rp. 266.450.000	0	0	
5.03.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.03.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp. 42.201.210	12	Rp. 31.138.110	0	0	
5.03.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Rp. 123.493.060	12	Rp. 56.428.123	0	0	
5.03.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	Rp. 43.620.400	4	Rp. 37.298.400	0	0	
5.03.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp. 175.000.000	1	Rp. 171.062.000	0	0	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.03.02			TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK OLEH SDM APARATUR YANG KOMPETEN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
5.03.02.2.01				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							
5.03.02.2.01.02				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4	Rp. 992.854.900	4	Rp. 872.442.571	0	0	
5.03.02.2.01.06				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1500	Rp. 173.695.500	1479	Rp. 166.615.088	0	0	
5.03.02.2.01.08				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	95	Rp. 27.232.000	95	Rp. 16.775.000	0	0	
5.03.02.2.01.11				Pengelolaan Data Kepegawaian	100	Rp. 511.531.300	100	Rp. 413.328.556	Simpeg yg belum sepenuhnya mengakomidir manajemen ASN	Pengembangan aplikasi Simpeg sesuai kebutuhan manajemen ASN berdasarkan regulasi terbaru	
5.03.02.2.02				Mutasi dan Promosi ASN							
5.03.02.2.02.01				Pengelolaan Mutasi ASN	200	Rp. 122.279.025	185	Rp. 112.162.620	Sesuai rencana	-	
5.03.02.2.02.02				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2000	Rp. 528.041.100	1980	Rp. 476.033.615	Sesuai rencana	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.03.02.2.02.03				Pengelolaan Promosi ASN	800	Rp. 230.543.210	800	Rp. 214.646.379	-	sesuai rencana	
5.03.02.2.03				Pengembangan Kompetensi ASN							
5.03.02.2.03.02				Pengelolaan Assessment Center	230	Rp. 497.266.500	137	Rp. 357.962.409	Sesuai rencana	-	
5.03.02.2.03.03				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	80	Rp. 76.263.366	40	Rp. 43.212.300	-	sesuai rencana	
5.03.02.2.03.01				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	100	Rp. 734.165.285	100	Rp. 499.708.622	-	sesuai rencana	
5.03.02.2.03.06				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	50	Rp. 619.670.630	50	Rp. 242.714.894	-	sesuai rencana	
5.03.02.2.03.04				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	100	Rp. 85.023.549	95	Rp. 37.195.902	-	sesuai rencana	
5.03.02.2.04				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
5.03.02.2.04.02				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75	Rp. 150.109.150	75	Rp. 146.546.721	-	sesuai rencana	
5.03.02.2.04.04				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	100	Rp. 91.924.400	35	Rp. 71.272.988	-	sesuai rencana	
5.03.02.2.04.07				Pembinaan Disiplin ASN	40	Rp. 230.158.950	25	Rp. 209.429.580	-	sesuai rencana	
5.03.02.2.04.01				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10	Rp. 62.311.610	7	Rp. 56.989.976	-	sesuai rencana	
5.03.02.2.04.10				Evaluasi Disiplin ASN	4	Rp. 121.681.200	3	Rp. 110.014.800	-	sesuai rencana	
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.04.02			TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK OLEH SDM APARATUR YANG KOMPETEN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
5.04.02.2.01				Pengembangan Kompetensi Teknis							
5.04.02.2.01.03				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	550	Rp. 1.405.524.922	550	Rp. 868.898.596	-	sesuai rencana	
5.04.02.2.02				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							
5.04.02.2.02.07				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	555	Rp. 5.001.773.588	553	Rp. 3.714.033.575	-	sesuai rencana	
6.01.0.00.0.00.1..000		INSPEKTORAT									



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6	UNSUR PENGAWAS										
6,01	INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
6.01.01.2				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
6.01.01.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Rp. 21.600.000	3	Rp. 18.726.000	-	-	
6.01.01.2				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69	Rp. 293.992.000	69	Rp. 195.018.200	surat edaran Bupati terdapat himbauan terkait dengan rekening lembur tidak bisa di cairkan dikarenakan telah digantikan oleh TPP	tahun depan untuk tidak menganggarkan	
6.01.01.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
6.01.01.2				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 5.623.374.699	13	Rp. 5.582.167.638	-	-	
6.01.01.2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 1.135.661.800	12	Rp. 698.567.806	-	-	
6.01.01.2				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
6.01.01.2				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Rp. 309.000.000	6	Rp. 219.000.000	-	-	
6.01.01.2				Administrasi Umum Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Rp. 736.842.230	12	Rp. 614.403.250	-	-	
6.01.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Rp. 26.523.000	4	Rp. 26.391.000	-	-	
6.01.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Rp. 44.313.000	12	Rp. 39.336.068	-	-	
6.01.01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12	Rp. 4.500.000	12	Rp. 3.360.000	-	-	
6.01.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	Rp. 977.851.000	82	Rp. 831.948.271	-	-	
6.01.01.2.06.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Rp. 82.280.000	12	Rp. 51.626.020	-	-	
6.01.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
6.01.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41	Rp. 228.880.000	40	Rp. 183.720.000	-	-	
6.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
6.01.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	Rp. 3.000.000	74	Rp. 466.090	beberapa surat pemberitahuan menggunakan Humas Center sehingga (VIA WhastApp)	untuk tahun depan penganggaran dilakukan efisiensi anggaran sebagian akan dialihkan ke kegiatan lain	
6.01.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 4.800.000	9	Rp. 1.277.417	-	-	
6.01.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Rp. 39.798.500	12	Rp. 39.021.211	-	-	
6.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp. 78.260.000	12	Rp. 71.300.744	-	-	
6.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Rp. 198.928.000	12	Rp. 155.205.941	-	-	
6.01.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Rp. 46.750.000	12	Rp. 25.117.813	-	-	
6.01.02			MENINGKATKAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
6.01.02.2.01				Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
6.01.02.2.01.01				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2	Rp. 24.000.000	2	Rp. 23.790.000	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.02.2 .01.02				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6	Rp. 399.912.000	6	Rp. 89.379.000	surat edaran Bupati himbauan terkait dengan rekening lembur tidak bisa di cairkan dikarenakan telah digantikan oleh TPP	untuk tahun depan penganggaran dilakukan efesiensi anggaran sebagian akan dialihkan ke kegiatan lain/rekening belanja yang lain	
6.01.02.2 .01.07				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60	Rp. 88.600.000	60	Rp. 51.930.520	surat edaran Bupati himbauan terkait dengan rekening lembur tidak bisa di cairkan dikarenakan telah digantikan oleh TPP	untuk tahun depan penganggaran dilakukan efesiensi anggaran sebagian akan dialihkan ke kegiatan lain/rekening belanja yang lain	
6.01.02.2 .01.03				Reviu Laporan Kinerja	4	Rp. 26.676.000	4	Rp. 24.205.000	0	0	
6.01.02.2 .01.04				Reviu Laporan Keuangan	12	Rp. 190.152.000	12	Rp. 152.083.000	0	0	
6.01.02.2 .01.05				Pengawasan Desa	45	Rp. 279.816.000	45	Rp. 181.851.600	0	0	
6.01.02.2 .02				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.02.2.02.01				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4	Rp. 104.374.000	4	Rp. 46.285.680	surat edaran Bupati terdapat himbauan terkait dengan rekening lembur tidak bisa di cairkan dikarenakan telah digantikan oleh TPP	untuk tahun depan penganggaran dilakukan efesiensi anggaran sebagian akan dialihkan ke kegiatan lain	
6.01.02.2.02.02				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	150	Rp. 190.900.000	150	Rp. 153.227.820	-	-	
6.01.03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
6.01.03.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.03.2 .01.01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3	Rp. 43.526.000	3	Rp. 10.795.680	terbatasnya waktu karena tugas mandatory dari pusat yang begitu banyak & Jumlah SDM baik secara kualitas maupun kuantitas masih jauh dari kebutuhan (anjab) sehingga untuk belanja paket meeting untuk pembahasan perumusan kebijakan tidak bisa terealisasi	mengusulkan penambahan kebutuhan pegawai ke BKPSDM	
6.01.03.2 .02				Pendampingan dan Asistensi							
6.01.03.2 .02.01				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4	Rp. 160.000.000	4	Rp. 111.514.500	-	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.03.2 .02.02				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	Rp. 73.424.000	10	Rp. 18.328.400	surat edaran Bupati terdapat himbauan terkait dengan rekening lembur tidak bisa di cairkan dikarenakan telah digantikan oleh TPP & Jumlah SDM baik kualitas maupun kuantitas jauh dari kebutuhan di tambah banyaknya tugas Mandatory Pusat	untuk tahun depan penganggaran dilakukan efisiensi anggaran sebagian akan dialihkan ke kegiatan lain dan mengusulkan penambahan pegawai d BKPSDM serta meningkatkan kegiatan yang bersifat diklat, bimtek, PKS dsb	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.03.2 .02.03				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	Rp. 813.529.000	6	Rp. 493.198.560	surat edaran Bupati terdapat himbauan terkait dengan rekening lembur tidak bisa di cairkan dikarenakan telah digantikan oleh TPP & Jumlah SDM baik kualitas maupun kuantitas jauh dari kebutuhan di tambah banyaknya tugas Mandatory Pusat	untuk tahun depan penganggaran dilakukan efesiensi anggaran sebagian akan dialihkan ke kegiatan lain dan mengusulkan penambahan pegawai d BKPSDM serta meningkatkan kegiatan yang bersifat diklat, bimtek, PKS dsb	
6.01.03.2 .02.04				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3	Rp. 50.000.000	3	Rp. 49.500.000	Proses pelaksanaan SPI pada TW IV	-	
7.01.0.00 .000.1..0 000		KECAMATAN AJUNG									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7,01	KECAMATAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2 .01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	Rp. 79.680.000	100	Rp. 79.680.000	kekurangan tenaga asn yang menguasai IT sehingga pekerjaan hanya menumpuk dikerjakan satu orang asn dibantu tenaga banpol PP	-Diupayakan Permintaan Penambahan staf ke BKASDM Jember melalui surat	
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 1.745.785.473	69	Rp. 1.821.188.387	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 6.435.500	100	Rp. 4.826.625	-tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	Rp. 37.871.200	100	Rp. 37.871.200	Persediaan peralatan Rumah Tangga masih kekurangan lampu penerangan kantor ,pengharum ruangan,sapu lantai,alat pel masih kekurangan	Diupayakan ada penembahan penyediaan peralatan rumah tangga	
7.01.01.2 .06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	Rp. 3.448.000	88	Rp. 3.448.000	Persediaan Bahan Logistik Kantor mulai menipis, sehingga triwulan IV dibelanjakan hampir 100%	untuk triwulan berikutnya diusahakan untuk pengadaan bahan logistik kantor diusahakan supaya pertriwulan terpenuhi sehingga tidak terjadi kekurangan	
7.01.01.2 .06.05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	Rp. 4.277.450	86	Rp. 4.277.600	seluruh kegiatan pasca covid 19 normal kembali sehingga penyerapan anggaran meningkat walaupun belum maksimal	triwulan berikutnya kegiatan ditingkatkan agar penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Rp. 24.019.200	89	Rp. 24.019.200	ada penambahan AC peruangan sehingga menambah daya pemakaian listrik	penggunaan AC disesuaikan dengan kondisi, apabila ruangan tidak digunakan AC dimatikan untuk efisiensi	
7.01.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 4.000.000	100	Rp. 4.000.000	seiring dengan pengadaan AC baru, untuk AC lama dipindah ke ruangan lain sehingga memerlukan biaya/jasa service	Triwulan berikutnya kondisi AC masih layak pakai sehingga hanya perlu service ringan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 88.800.000	80	Rp. 88.800.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 30.797.250	86	Rp. 30.797.200	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2 .09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Rp. 4.760.000	100	Rp. 3.570.000	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 13.262.000	71	Rp. 9.946.500	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 726.810.000	75,2	Rp. 726.810.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjnut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 126.187.000	81	Rp. 121.027.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 6.880.000	43	Rp. 3.440.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 292.752.400	93	Rp. 292.752.400	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
7.01.0.00.0.00.10.0000		KECAMATAN KALISAT									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Rp. 9.378.000	57	Rp. 5.367.750	Tidak ada Permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 2.596.817.537	95	Rp. 2.314.148.644	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 200.995.000	89	Rp. 179.200.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 203.877.101	91	Rp. 185.600.853	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 39.860.000	76	Rp. 30.374.922	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 37.300.000	73	Rp. 27.254.767	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Rp. 17.000.000	98	Rp. 16.590.000	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2 .01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 757.902.000	91	Rp. 693.640.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2 .02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2 .02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 672.000	89	Rp. 597.500	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2 .01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 5.474.600	97	Rp. 5.397.400	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 82.444.000	89	Rp. 73.463.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2 .02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 310.100.000	93	Rp. 286.916.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.0.00.0.00.11.0000		KECAMATAN KALIWATES									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 8.683.260.562	11	Rp. 11.130.901.670	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp. 98.631.000	12	Rp. 39.680.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanj Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	Rp. 17.778.400	98	Rp. 23.588.400	Persediaan Bahan Logistik Kantor mulai menipis, sehingga triwulan IV dibelanjakan hampir 100%	untuk triwulan berikutnya diusahakan untuk pengadaan bahan logistik kantor diusahakan supaya pertriwulan terpenuhi sehingga tidak terjadi kekurangan	
7.01.01.2 .07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	Rp. 1.034.122.805	12	Rp. 1.778.711.647	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp. 33.488.500	11	Rp. 33.907.876	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2 .09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	Rp. 44.198.000	9	Rp. 8.200.330	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sprepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2 .09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111	Rp. 30.000.000	85	Rp. 26.817.000	Nihil	Nihil	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2 .01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	789	Rp. 3.257.737.250	705	Rp. 3.475.738.399	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 4.816.000	88	Rp. 3.150.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.03		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7.01.03.2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01.03.2.02.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32	Rp. 295.427.700	31	Rp. 217.524.280	Nihil	Nihil	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13	Rp. 205.580.000	12	Rp. 247.046.000	Nihil	Nihil	
7.01.0.00.0.00.12.0000		KECAMATAN KENCONG									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 1.775.496.712	89	Rp. 1.586.725.071	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 81.320.000	93	Rp. 75.590.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7.01.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	Rp. 4.255.200	99	Rp. 4.239.000	Sesuai Anggaran Kas	-	
7.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 112.291.640	88	Rp. 98.700.650	-tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
7.01.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
7.01.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Rp. 25.011.779	88	Rp. 21.965.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Rp. 20.255.000	82	Rp. 16.542.863	ada penambahan AC ruangan sehingga menambah daya pemakaian listrik	penggunaan AC disesuaikan dengan kondisi, apabila ruangan tidak digunakan AC dimatikan untuk efisiensi	
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 53.928.360	87	Rp. 46.520.308	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 33.477.800	95	Rp. 31.661.549	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 20.276.050	80	Rp. 16.242.600	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Rp. 12.919.250	98	Rp. 12.623.050	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 789.202.250	99	Rp. 787.800.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.03			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 3.420.450	100	Rp. 2.350.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 91.056.300	97	Rp. 88.180.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.03.2 .05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
7.01.04			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2 .02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2 .02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 299.385.440	100	Rp. 299.120.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.0.00 .0.00.13. 0000		KECAMATAN LEDOKOMBO									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 1.847.511.782	14	Rp. 1.752.280.605	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 144.000.000	100	Rp. 144.000.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 126.728.699	100	Rp. 169.883.287	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 34.271.000	100	Rp. 28.498.457	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 12.773.000	100	Rp. 9.222.754	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Rp. 32.787.900	100	Rp. 32.200.000	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	
7.01.01.2.06				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH							
7.01.01.2.07				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
7.01.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Rp. 48.884.400	100	Rp. 59.688.400	Nihil	Nihil	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 682.800.000	100	Rp. 681.600.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 4.280.000	100	Rp. 4.280.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 89.875.000	100	Rp. 85.889.400	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.02				KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH							
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 207.800.000	100	Rp. 207.240.200	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.0.00.0.00.14.0000		KECAMATAN MAYANG									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 1.715.930.925	96,65	Rp. 1.710.629.073	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 352.000	0	Rp. 0	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 199.219.430	84,39	Rp. 183.785.361	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 24.842.100	25,59	Rp. 6.356.000	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 18.888.300	86,79	Rp. 16.393.240	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Rp. 25.598.010	75,33	Rp. 19.282.200	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 552.480.000	99,05	Rp. 547.075.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.03			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 5.680.000	89,79	Rp. 5.100.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 138.269.750	88,19	Rp. 121.925.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.04		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
7.01.04.2 .02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2 .02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 305.042.240	91,15	Rp. 278.050.292	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.0.00 .0.00.15. 0000		KECAMATAN MUMBULSARI									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2 .01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Rp. 75.840.000	99	Rp. 71.580.000	Nihil	Nihil	
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 1.826.768.069	100	Rp. 1.826.767.972	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .04				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 772.031.680	100	Rp. 772.031.597	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 31.817.000	100	Rp. 31.768.709	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2 .09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Rp. 40.457.100	98	Rp. 39.457.100	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.11				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
7.01.01.2.06				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH							
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 23.234.339	100	Rp. 23.234.300	-tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 133.373.600	100	Rp. 133.373.600	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
7.01.06.2.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.06.2.01.11				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Rp. 253.505.800	99	Rp. 253.078.000	tidak ada masalah	tidak ada	
7.01.0.00.0.00.16.0000		KECAMATAN PAKUSARI									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	Rp. 4.240.000	100	Rp. 4.240.000	kekurangan tenaga asn yang menguasai IT sehingga pekerjaan hanya menumpuk dikerjakan satu orang asn dibantu tenaga banpol PP	-Diupayakan Permintaan Penambahan staf ke BKASDM Jember melalui surat	
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Rp. 1.603.395.928	1	Rp. 1.289.563.132	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 29.860.000	100	Rp. 24.429.600	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2 .09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 20.552.000	100	Rp. 17.700.000	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sprepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2 .09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Rp. 8.206.000	100	Rp. 6.526.000	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	
7.01.01.2 .06				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH							
7.01.01.2 .06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 86.555.300	100	Rp. 71.287.824	-tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
7.01.01.2 .08				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanj Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 129.310.000	100	Rp. 133.450.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2 .01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 480.150.000	100	Rp. 438.900.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.03				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							
7.01.02.2.03.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100	Rp. 10.676.700	100	Rp. 10.250.000	tidak ada masalah	pelaksanaan sesuai rencana anggaran	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 9.240.000	100	Rp. 7.800.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 113.826.000	100	Rp. 118.636.600	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.03.2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01.03.2.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 326.284.000	100	Rp. 256.264.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.0.00.0.00.18.0000		KECAMATAN PATRANG									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp. 9.086.000	2	Rp. 5.420.000	Tidak ada Permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Rp. 32.510.000	2	Rp. 3.251.000	adanya pergeseran anggaran di proses PAPBD	Serapan anggaran disesuaikan dengan adanya pergeseran anggaran	
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp. 9.016.700.215	12	Rp. 6.176.784.213	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Rp. 11.684.000	2	Rp. 1.780.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 15.372.300	100	Rp. 15.178.000	-tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
7.01.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Rp. 7.500.000	12	Rp. 5.520.500	seluruh kegiatan pasca covid 19 normal kembali sehingga penyerapan anggaran meningkat walaupun belum maksimal	triwulan berikutnya kegiatan ditingkatkan agar penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp. 90.216.720	12	Rp. 84.183.527	ada penambahan AC ruangan sehingga menambah daya pemakaian listrik	penggunaan AC disesuaikan dengan kondisi, apabila ruangan tidak digunakan AC dimatikan untuk efisiensi	
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 1.483.201.100	100	Rp. 1.618.006.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 30.637.200	1	Rp. 24.129.778	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11	Rp. 52.188.000	11	Rp. 36.831.568	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	9	Rp. 81.790.000	9	Rp. 80.315.450	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2 .01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 2.148.266.000	100	Rp. 2.121.638.479	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2 .02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2 .02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 27.240.000	100	Rp. 21.711.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.03		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7.01.03.2 .01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9	Rp. 36.262.600	9	Rp. 29.636.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01.03.2.02.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	Rp. 103.960.000	100	Rp. 90.900.000	Nihil	Nihil	
7.01.04			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.04				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2.04.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 149.500.000	100	Rp. 149.500.000	adanya pergeseran anggaran di proses PAPBD	Serapan anggaran disesuaikan dengan adanya pergeseran anggaran	
7.01.0.00.0.00.19.0000		KECAMATAN PUGER									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 2.029.992.900	93,4	Rp. 1.896.073.614	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 19.435.445	93,71	Rp. 18.212.000	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2 .09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 4.193.750	89,9	Rp. 3.770.000	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sprepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2 .06				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH							
7.01.01.2 .06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 110.314.805	88,8	Rp. 110.314.805	-tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.08				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
7.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 136.880.000	100	Rp. 136.880.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 1.071.120.000	98,24	Rp. 1.071.120.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 10.600.000	76,04	Rp. 8.060.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 128.820.000	97,64	Rp. 125.784.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.04		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
7.01.04.2 .04			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2 .02			KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH								
7.01.04.2 .02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 367.736.000	95,38	Rp. 350.736.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.0.00 .0.00.2.0 000		KECAMATAN AMBULU									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	252	Rp. 2.098.840.579	233	Rp. 1.959.248.548	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90	Rp. 96.330.000	90	Rp. 95.980.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Rp. 12.000.000	1	Rp. 11.700.000	Sesuai Anggaran Kas	-	
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 138.023.390	12	Rp. 117.493.174	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 25.731.450	1	Rp. 23.044.490	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Rp. 18.660.950	2	Rp. 14.549.600	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Rp. 10.054.800	2	Rp. 9.222.000	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	
7.01.01.2.01				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH							
7.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp. 4.504.000	3	Rp. 3.055.000	Tidak ada Permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Rp. 1.022.045.800	12	Rp. 1.018.530.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12000	Rp. 30.926.000	10590	Rp. 28.758.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	Rp. 2.988.800	16	Rp. 2.190.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	Rp. 78.811.750	20	Rp. 58.785.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2 .02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24	Rp. 251.128.250	20	Rp. 241.508.500	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
7.01.06.2.01				FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
7.01.06.2.01.01				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	Rp. 8.620.800	3	Rp. 5.780.000	Nihil	Nihil	
7.01.06.2.01.03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	Rp. 9.566.800	3	Rp. 7.000.000	Nihil	Nihil	
7.01.0.00.0.00.20.0000		KECAMATAN RAMBIPUJI									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 1.912.901.813	14	Rp. 1.839.939.042	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanj Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp. 114.320.000	12	Rp. 113.460.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 208.333.165	12	Rp. 204.915.585	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 25.371.600	1	Rp. 25.371.600	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2 .09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Rp. 10.929.600	1	Rp. 10.880.800	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sprepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2 .09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp. 15.320.000	1	Rp. 15.320.000	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Rp. 793.840.000	12	Rp. 792.840.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12000	Rp. 52.880.000	12000	Rp. 50.880.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Rp. 3.080.000	1	Rp. 3.080.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp. 74.595.000	12	Rp. 74.595.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Rp. 304.415.000	12	Rp. 304.415.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.0.00.0.00.21.0000		KECAMATAN SEMBORO									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Rp. 1.911.000	2	Rp. 1.901.000	Tidak ada Permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp. 1.956.914.060	12	Rp. 1.798.136.698	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp. 113.220.000	12	Rp. 111.530.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp. 1.245.000	1	Rp. 1.235.000	Administrasi terselesaikan pada akhir tahun	Administrasi diselesaikan sebelum akhir tahun	
7.01.01.2 .06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Rp. 23.302.800	4	Rp. 23.300.000	-tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 120.189.800	12	Rp. 114.671.576	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 27.949.200	1	Rp. 26.371.169	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Rp. 12.269.200	1	Rp. 11.500.000	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp. 16.900.000	1	Rp. 16.900.000	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2 .01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Rp. 541.215.000	12	Rp. 538.785.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2 .02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2 .02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 51.134.000	100	Rp. 47.900.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2 .01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Rp. 2.775.000	1	Rp. 2.225.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp. 45.425.000	12	Rp. 40.104.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.04		MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp. 357.564.000	12	Rp. 350.835.000	Nihil	Nihil	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.0.00 .0.00.22. 0000		KECAMATAN SILO									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp. 1.892.056.502	12	Rp. 1.798.578.504	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 228.788.200	93	Rp. 210.985.500	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 22.036.250	12	Rp. 18.706.925	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 29.860.000	80	Rp. 23.422.000	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 18.415.000	90	Rp. 16.383.400	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp. 34.000.000	1	Rp. 33.475.750	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2 .01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Rp. 998.800.000	12	Rp. 832.400.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2 .02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2 .01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 93.415.000	93	Rp. 83.795.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.03.2 .01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	Rp. 3.740.000	15	Rp. 3.740.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2 .02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2 .02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 318.145.500	98	Rp. 311.001.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.04.2.04				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.0.00.0.00.23.0000		KECAMATAN SUKORAMBI									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp. 1.589.878.594	12	Rp. 1.454.224.352	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 312.872.272	93	Rp. 291.278.270	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 27.044.600	90	Rp. 24.776.406	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 2.295.000	99	Rp. 2.295.000	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 410.276.000	91	Rp. 374.575.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 4.220.000	88	Rp. 3.702.500	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 106.657.500	99	Rp. 105.680.250	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 302.031.000	99	Rp. 302.031.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.0.00.0.00.24.0000		KECAMATAN SUKOWONO									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 2.280.312.486	14	Rp. 1.936.939.119	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp. 105.680.000	12	Rp. 103.180.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 67.316.900	100	Rp. 54.805.140	-tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 115.817.810	100	Rp. 87.575.500	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 18.740.000	100	Rp. 18.764.000	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 12.180.000	100	Rp. 13.785.000	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.02		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 654.000.000	100	Rp. 643.200.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 39.100.000	100	Rp. 32.000.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 4.400.000	100	Rp. 3.000.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 96.000.000	100	Rp. 60.100.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.04		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
7.01.04.2 .02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2 .02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 309.692.000	100	Rp. 286.625.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.0.00 .0.00.25. 0000		KECAMATAN SUMBERBARU									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2 .01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 1.909.213.189	14	Rp. 1.725.067.375	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	Rp. 45.564.530	100	Rp. 45.310.100	Sesuai Anggaran Kas	-	
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 229.204.950	100	Rp. 221.193.396	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 31.875.000	1	Rp. 30.375.000	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Rp. 28.475.000	2	Rp. 22.475.000	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.02		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	Rp. 922.926.000	6	Rp. 920.440.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Rp. 6.267.200	1	Rp. 4.017.200	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	Rp. 98.463.750	16	Rp. 93.885.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.04				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2.04.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Rp. 324.246.600	12	Rp. 324.168.000	adanya pergeseran anggaran di proses PAPBD	Serapan anggaran disesuaikan dengan adanya pergeseran anggaran	
7.01.0.00.0.00.26.0000		KECAMATAN SUMBERJAMBE									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 1.540.410.392	14	Rp. 1.497.944.779	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230	Rp. 106.079.200	230	Rp. 99.763.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Rp. 257.421.400	60	Rp. 228.434.035	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 50.625.000	1	Rp. 46.518.981	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Rp. 38.700.000	2	Rp. 20.789.565	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18	Rp. 696.219.300	18	Rp. 684.950.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp. 33.558.200	12	Rp. 31.532.400	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Rp. 9.336.100	6	Rp. 5.286.100	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp. 145.551.220	9	Rp. 131.846.500	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.04		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
7.01.04.2 .02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2 .02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Rp. 348.445.800	12	Rp. 241.012.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.0.00 .0.00.27. 0000		KECAMATAN SUMBERSARI									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2 .01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 8.292.404.447	14	Rp. 6.169.434.889	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 417.917.800	12	Rp. 535.374.874	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp. 20.800.000	12	Rp. 23.813.500	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Rp. 50.350.000	12	Rp. 47.839.020	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sprepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Rp. 3.394.000	100	Rp. 3.394.000	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Rp. 2.791.126.000	12	Rp. 2.788.933.173	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 806.580.000	100	Rp. 689.100.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
7.01.03.2.02.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	Rp. 204.778.400	100	Rp. 243.909.000	Nihil	Nihil	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.04				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04.2.04.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 327.790.000	100	Rp. 345.246.000	adanya pergeseran anggaran di proses PAPBD	Serapan anggaran disesuaikan dengan adanya pergeseran anggaran	
7.01.05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
7.01.05.2.01.08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	Rp. 13.200.000	100	Rp. 13.200.000	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan target	
7.01.0.00.0.00.28.0000		KECAMATAN TANGGUL									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Rp. 6.002.490	100	Rp. 6.001.350	Tidak ada Permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 3.271.620.015	100	Rp. 2.459.338.958	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 60.420.000	100	Rp. 60.420.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	Rp. 8.800.000	100	Rp. 8.800.000	Sesuai Anggaran Kas	-	
7.01.01.2 .06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 81.472.930	100	Rp. 80.586.000	-tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
7.01.01.2 .06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	Rp. 4.179.060	100	Rp. 3.103.600	seluruh kegiatan pasca covid 19 normal kembali sehingga penyerapan anggaran meningkat walaupun belum maksimal	triwulan berikutnya kegiatan ditingkatkan agar penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Rp. 29.076.000	100	Rp. 28.288.063	ada penambahan AC peruangan sehingga menambah daya pemakaian listrik	penggunaan AC disesuaikan dengan kondisi, apabila ruangan tidak digunakan AC dimatikan untuk efesiensi	
7.01.01.2 .08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 1.500.000	100	Rp. 1.500.000	seiring dengan pengadaan AC baru, untuk AC lama dipindah ke ruangan lain sehingga memerlukan biaya/jasa service	Triwulan berikutnya kondisi AC masih layak pakai sehingga hanya perlu service ringan	
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 130.789.480	100	Rp. 158.646.750	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 29.677.600	100	Rp. 29.645.000	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 14.579.600	100	Rp. 14.550.000	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sprepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Rp. 10.786.092	100	Rp. 10.781.500	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 751.472.000	100	Rp. 751.296.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 2.420.000	100	Rp. 2.200.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 109.705.950	100	Rp. 68.723.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 361.704.000	100	Rp. 361.704.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.0.00.0.00.29.0000		KECAMATAN TEMPUREJO									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 1.484.287.670	14	Rp. 992.124.559	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp. 98.340.000	12	Rp. 98.340.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 84.694.700	12	Rp. 73.089.398	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp. 41.694.000	12	Rp. 40.471.883	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Rp. 17.528.500	12	Rp. 14.894.211	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.02		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Rp. 670.560.000	12	Rp. 660.560.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp. 109.266.800	12	Rp. 109.129.700	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Rp. 2.200.000	12	Rp. 2.200.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp. 85.236.000	12	Rp. 81.631.840	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.04		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
7.01.04.2 .02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2 .02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Rp. 338.680.000	12	Rp. 335.780.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.0.00 .0.00.3..0 000		KECAMATAN ARJASA									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 2.119.611.959	100	Rp. 2.119.611.957	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 282.334.850	100	Rp. 282.334.852	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjnut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90	Rp. 32.245.450	90	Rp. 29.020.906	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90	Rp. 26.833.100	90	Rp. 24.149.790	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sprepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.06				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH							
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Rp. 98.533.600	5	Rp. 98.533.600	-tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.01				KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 390.000.000	100	Rp. 390.000.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90	Rp. 34.540.000	90	Rp. 31.086.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	90	Rp. 5.025.000	90	Rp. 4.522.500	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 243.688.000	100	Rp. 243.688.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.0.00.0.00.30.0000		KECAMATAN UMBULSARI									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp. 3.138.858.650	12	Rp. 3.138.858.648	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 77.495.250	12	Rp. 77.495.250	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp. 50.560.000	12	Rp. 50.560.000	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Rp. 7.653.000	12	Rp. 7.653.000	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.07				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
7.01.02			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2 .01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Rp. 663.300.000	12	Rp. 663.300.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2 .01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp. 57.200.000	12	Rp. 57.200.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.04		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
7.01.04.2 .02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2 .02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Rp. 321.955.000	12	Rp. 321.955.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.0.00 .0.00.31. 0000		KECAMATAN WULUHAN									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 1.834.679.629	14	Rp. 1.664.932.421	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp. 96.000.000	12	Rp. 96.000.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 192.800.900	12	Rp. 179.301.766	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 25.300.000	1	Rp. 25.256.570	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Rp. 19.669.000	3	Rp. 19.663.921	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23	Rp. 1.029.840.000	23	Rp. 1.029.840.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjnut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Rp. 10.917.000	12	Rp. 10.917.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23	Rp. 121.933.300	23	Rp. 121.128.100	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15	Rp. 251.440.000	15	Rp. 251.439.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.0.00.0.00.32.0000		KECAMATAN PANTI									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Rp. 4.360.000	100	Rp. 4.360.000	Tidak ada Permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 2.792.626.656	70	Rp. 1.498.467.324	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2.02.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	100	Rp. 88.280.000	97	Rp. 84.990.000	Terdapat situasi yang menyebabkan sebagian kegiatan tidak dapat telaksana	Penyesuaian di awal tahun anggaran berikutnya	
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 417.741.174	89	Rp. 262.054.804	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanj Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 28.084.000	70	Rp. 21.859.000	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2 .09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 22.659.400	77	Rp. 17.429.680	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sprepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2 .09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Rp. 90.100.000	99	Rp. 89.780.000	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	
7.01.01.2 .09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Rp. 8.500.000	82	Rp. 6.945.000	Nihil	Nihil	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 4.820.000	91	Rp. 4.400.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 100.000.000	93	Rp. 92.778.500	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 5.715.400	76	Rp. 4.361.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 245.800.000	96	Rp. 237.450.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
7.01.06.2.01				FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
7.01.06.2.01.05				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100	Rp. 623.021.000	100	Rp. 618.000.000	Tidak terdapat situasi dan kondisi yang menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana	Penyesuaian di awal tahun anggaran berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.0.00 .00.04..0 000		KECAMATAN BALUNG									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Rp. 2.157.800.483	14	Rp. 2.027.599.124	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp. 79.320.000	12	Rp. 79.320.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 106.013.960	12	Rp. 100.432.018	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 27.088.705	1	Rp. 26.311.343	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Rp. 25.940.560	3	Rp. 26.560.997	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Rp. 567.640.000	12	Rp. 567.340.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16000	Rp. 48.780.000	5513	Rp. 48.300.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	321	Rp. 13.728.000	321	Rp. 12.440.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	904	Rp. 145.830.410	904	Rp. 134.832.100	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.04		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
7.01.04.2 .02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2 .02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	228	Rp. 266.757.100	228	Rp. 262.255.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.0.00 .0.00.5..0 000		KECAMATAN BANGSALSARI									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2 .02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 2.074.641.085	92	Rp. 1.880.574.413	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 208.632.000	99	Rp. 204.926.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 106.707.240	92	Rp. 97.957.912	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 33.572.100	94	Rp. 31.589.979	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 20.358.000	97	Rp. 19.805.647	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Rp. 6.000.000	89	Rp. 5.332.364	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2 .01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 990.280.000	100	Rp. 989.995.200	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2 .02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2 .02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 2.000.000	100	Rp. 2.000.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2 .01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 5.360.000	91	Rp. 4.900.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 83.400.000	80	Rp. 66.324.180	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2 .02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 299.000.000	100	Rp. 299.000.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.0.00.0.00.6.000		KECAMATAN GUMUKMAS									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 2.148.935.640	100	Rp. 1.935.723.168	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 91.040.000	100	Rp. 91.040.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Rp. 2.670.000	100	Rp. 2.670.000	Administrasi terselesaikan pada akhir tahun	Administrasi diselesaikan sebelum akhir tahun	
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 92.936.700	100	Rp. 82.444.609	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Rp. 39.914.700	100	Rp. 36.818.327	ada penambahan AC ruangan sehingga menambah daya pemakaian listrik	penggunaan AC disesuaikan dengan kondisi, apabila ruangan tidak digunakan AC dimatikan untuk efisiensi	
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Rp. 40.217.400	12	Rp. 34.975.125	service rutin, penggantian sparepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Rp. 30.210.000	12	Rp. 29.891.010	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sparepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Rp. 20.400.000	100	Rp. 19.931.000	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	
7.01.01.2.05				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH							
7.01.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	Rp. 23.007.600	100	Rp. 22.999.200	Sesuai Anggaran Kas	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Rp. 715.580.000	12	Rp. 713.110.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 22.377.600	100	Rp. 16.037.600	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanj Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2 .01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2 .01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60	Rp. 3.650.000	60	Rp. 3.640.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 110.494.000	100	Rp. 96.372.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
7.01.05.2 .01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.05.2.01.08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Rp. 7.392.000	4	Rp. 7.360.000	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan	Kegiatan sudah sesuai dengan target	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.04				KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN QANUN DAN PERATURAN KEPALA DAERAH							
7.01.04.2.04.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 319.410.000	100	Rp. 319.410.000	adanya pergeseran anggaran di proses PAPBD	Serapan anggaran disesuaikan dengan adanya pergeseran anggaran	
7.01.0.00.0.00.7..0000		KECAMATAN JELBUK									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Rp. 2.059.125.677	0,86	Rp. 2.059.125.677	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Rp. 209.628.400	12	Rp. 203.719.400	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2 .06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp. 19.710.500	0,9	Rp. 17.759.850	-tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Rp. 48.805.292	11,5	Rp. 48.804.892	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 18.441.500	0,97	Rp. 17.618.000	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Rp. 373.600.000	1	Rp. 372.798.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	300	Rp. 6.179.800	293	Rp. 6.044.800	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Rp. 138.209.480	0,98	Rp. 136.573.586	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.02				KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Rp. 280.799.690	1	Rp. 280.754.690	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.0.00.0.00.8.0.000		KECAMATAN JENGGAWAH									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 2.118.215.992	100	Rp. 1.653.156.779	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanj Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 164.650.000	100	Rp. 159.770.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	
7.01.01.2 .08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2 .08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 57.391.680	90	Rp. 49.887.239	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2 .09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Rp. 33.073.000	95	Rp. 27.340.815	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Rp. 18.262.000	92	Rp. 9.683.020	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sprepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.02		MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02.2 .01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 760.480.000	100	Rp. 760.214.880	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2 .02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2 .02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 6.660.000	98	Rp. 6.630.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	
7.01.03			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2 .01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03.2 .01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 2.840.000	98	Rp. 2.787.200	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2 .01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 86.960.000	99	Rp. 86.582.620	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2 .02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04.2 .02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Rp. 337.600.000	99	Rp. 337.538.400	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.0.00 .0.00.9..0 000		KECAMATAN JOMBANG									
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7.01.01.2 .02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Rp. 1.655.053.417	100	Rp. 1.596.504.961	kekurangan tenaga/staf sehingga kasubbag perencanaan bekerja sendiri	Diupayakan ada penambahan staf yang menguasai IT atau dibimtek staf melalui bidang diklat BKSDM	
7.01.01.2 .02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Rp. 86.480.000	100	Rp. 86.480.000	Belanja Lembur PNS tidak dapat diserap dengan adanya kebijakan regulasi Penetapan Uang Lembur	Penyerapan anggaran sesuai jadwal hanya belanja lembur PNS tidak dapat diserap, direncanakan kembali pengajuan sesuai regulasi Anggaran 2023 dan untuk yang lain sudah maksimal	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7.01.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	Rp. 19.836.400	100	Rp. 19.836.400	Sesuai Anggaran Kas	-	
7.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7.01.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Rp. 98.040.580	100	Rp. 89.117.923	-tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan	
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Rp. 98.040.580	100	Rp. 89.117.923	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kadang kadang honorarium petugas kebersihan ,full timer, perjalanan dinas kadang kadang terlambat realisasinya sehingga pembayarannya molor/agak terlambat	Triwulan berikutnya diupayakan Pengajuannya dimajukan supaya tidak ada keterlambatan honorariumnya	
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanj Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01.2 .09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 38.251.600	1	Rp. 37.612.411	service rutin, penggantian sprepart dan biaya perpanjangan kendaraan dinas jabatan	Triwulan berikutnya diupayakan secara rutin/berkala kendaraan diservis	
7.01.01.2 .09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Rp. 11.853.900	2	Rp. 11.173.600	Kondisi kendaraan operasional lapangan kurang layak sehingga diperlukan service/penggantian sprepart	Triwulan berikutnya diupayakan servis secara rutin sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang besar	
7.01.01.2 .09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Rp. 17.000.000	3	Rp. 16.896.000	Kondisi bangunan masih layak pakai sehingga tidak perlu adanya perbaikan	Triwulan berikutnya diupayakan adanya pemeliharaan ringan dan pengecatan tembok secara rutin	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Rp. 667.440.000	100	Rp. 667.380.000	Kegiatan Pasca covid mulai berangsur pulih/normal sehingga penyerapan anggaran mulai ada peningkatan	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 119.276.500	100	Rp. 115.595.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Rp. 2.642.000	100	Rp. 2.642.000	-tidak ada permasalahan	--tidak ada permasalahan	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Rp. 119.276.500	100	Rp. 115.595.000	Kegiatan pasca covid mulai normal kembali sehingga penyerapan anggaran bertambah	Triwulan berikutnya diupayakan kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sehingga penyerapan anggaran ada peningkatan dari triwulan berikutnya	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Rp. 385.153.000	1	Rp. 384.790.000	kegiatan ketertiban masyarakat pasca covid mulai normal kembali	Triwulan berikutnya diupayakan ada peningkatan kegiatan sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal	
8.01.0.00.0.00.1..000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
8.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
8.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Rp. 76.990.000	7	Rp. 75.005.956	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
8.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24	Rp. 3.151.339.207	24	Rp. 3.149.837.580	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Rp. 225.300.000	24	Rp. 219.829.466	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
8.01.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp. 1.502.900	1	Rp. 1.497.000	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Rp. 17.538.100	1	Rp. 17.417.000	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Rp. 4.535.760	1	Rp. 4.515.000	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12	Rp. 2.700.000	12	Rp. 2.600.000	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Rp. 104.855.000	1	Rp. 104.791.030	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.01.2.06.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Rp. 1.980.000	1	Rp. 1.960.000	0	-	
8.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
8.01.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Rp. 83.910.000	1	Rp. 46.188.313	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp. 24.835.500	1	Rp. 24.826.700	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Rp. 101.650.000	1	Rp. 97.828.827	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
8.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp. 22.178.900	1	Rp. 22.000.200	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Rp. 75.187.100	2	Rp. 74.874.900	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.01.2.7				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
8.01.02			MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							
8.01.02.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.02.2.01.02				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Rp. 503.763.290	1	Rp. 494.246.000	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.03			MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA							
8.01.03.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Per							
8.01.03.2.01.02				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	11	Rp. 3.177.392.800	11	Rp. 3.157.842.500	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.04			MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
8.01.04.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
8.01.04.2.01.03				Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	550	Rp. 67.586.900	550	Rp. 62.061.000	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.05			MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
8.01.05.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.05.2.01.01				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12	Rp. 92.462.700	12	Rp. 92.460.900	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	
8.01.06			MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DAN STABILITAS POLITIK DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
8.01.06.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							
8.01.06.2.01.04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35	Rp. 134.624.500	35	Rp. 131.654.700	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan sosial, konflik dan keamanan serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas terjadinya konflik sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban.



Kode	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.06.2 .01.05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	Rp. 134.955.800	1	Rp. 134.820.000	Sudah sesuai dengan Anggaran	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan sosial, konflik dan keamanan serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas terjadinya konflik sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban.



3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2022

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1	Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah	• Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. • Pengelolaan aset desa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa
2	Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022-2024	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	• Memberikan arah tentang rencana kerja rinci yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan
3	Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan	• Menyamakan cara pandang, langkah dan tahapan dalam pelaksanaan program budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	Budaya Kerja dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Jawa Timur	• Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja • Memperlancar komunikasi dan hubungan kerja • Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga dapat mendorong kreatifitas kerja
4	Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Jember	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	• Mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Jember • Mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan • Mewujudkan keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
5	Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	• Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan • Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas • Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Jember
6	Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Nelayan di Kabupaten Jember	Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam	• Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan skala kecil dan tradisional • Mewujudkan Nelayan di Kabupaten Jember memperoleh Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
7	Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Petani di Kabupaten Jember	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	• Mewujudkan pemberian perlindungan dasar jaminan Sosial ketenagakerjaan yang optimal untuk Petani • Mewujudkan Petani di Kabupaten Jember memperoleh Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan
8	Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	• Meningkatkan kualitas pelayanan publik • Menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme • Mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik • Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
9	Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomo 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10	Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Gratis "J-PASTI	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	• Memberikan pelayanan kesehatan bagi Kabupaten Jember secara optimal, terpadu, tepat sasaran dan tepat manfaat • Mendorong tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Jember sesuai



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	KUEREN" di Kabupaten Jember		Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan upaya kolaborasi Bersama untuk memastikan bahwa seluruh Penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN • Menjamin terpenuhinya pembiataan kesehatan bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dan/atau belum diintegrasikan ke dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau peserta JKN dengan kartu tidak aktif di Kabupaten Jember • Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standart Panduan Praktek Klinis (PPK) dengan tetap mengacu pada prinsip kendali mutu dan kendali biaya
11	Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2022	Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi	• Mewujudkan Aparatur Negara yang berintegritas, akuntabel dan transparan



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi	• Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi • Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor tindak pidana korupsi
12	Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	• Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022
13	Peraturan Bupati No 104 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman	• Penetapan Perbup APBD Tahun Anggaran 2022



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	
14	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milih Daerah	• Menyelenggarakan kegiatan usaha agrobisnis, agroindustry dan agrowisata yang memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan potensi Daerah berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik • Memberikan manfaat bafi perkembangan perekonomian Kabupaten Jember • Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perkebunan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat Jember sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Kabupaten Jember berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik • Meningkatkan kesejahteraan masyarkat



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
			Daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan
15	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan Jember	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milih Daerah	• Memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum • Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya
16	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/439/1.12/2022 Tentang Pembentukan J-PERMATAKU (Jember-Perkumpulan Remaja Pecinta Buku) Kabupaten Jember	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	• Membentuk J-Permataku (Jember-Perkumpulan Remaja Pecinta Buku) di seluruh desa Se-Kabupaten Jember • Meningkatkan dan mengembangkan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat • Menjalin kerjasama dengan instansi lain yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam menyelenggarakan akuntabilitas masyarakat literat • Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
			penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non-profesi, serta masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literat • Menggerakkan potensi lembaga dan/atau sarana perpustakaan, taman baca, rumah pintar dan sebutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat • Memberdayakan segenap potensi yang ada dalam rangka membentuk masyarakat pembelajar sepanjang hayat • Mengembangkan literasi informasi dan minat baca melalui aktivitas yang kreatif, inspiratif, inovatif dengan mengakomodasi kearifan local yang tumbuh di masyarakat • Pembentukan dan kepengurusan J-Permataku (Jember-Perkumpulan Remaja Pecinta Buku) pada setiap desa ditetapkan dengan



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
			Keputusan Kepala Desa Semua kegiatan, aktivitas, yang dilaksanakan oleh J-Permataku (Jember-Perkumpulan Remaja Pecinta Buku) pada masing-masing desa dibawah binaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember
17	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/25/1.12/2022 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Kabupaten Jember Tahun 2022	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan	Menyelesaikan permasalahan pertanahan dengan efektif, efisien dan akuntabel
18	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/61/1.12/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jember	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	- Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif - Mempercepat penurunan stunting secara efektif, lancer dan tepat sasaran



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
19	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/475/1.12/2022 tentang Penerima bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa paket ayam petelur bagi keluarga stunting di kabupaten jember Tahun 2022	- PMK No 134/pmk.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi TA 2022 - SE Mendagri No 840/5412/SJ tentang Juknis tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah	Pengendalian dan antisipasi dampak inflasi sebagai perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja guna mempercepat penyaluran belanja bantuan sosial untuk melindungi daya beli terutama pada kelompok rentan yang selanjutnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.
20	Peraturan Bupati Jember Nomor : 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	- Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. - Permen PANRB No.53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan PK, Laporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Pedoman penerapan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		- Permen PANRB No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah - Permen PANRB No.89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.	
21	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/173/1.12/2022 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember	- Perpres Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	- Memberikan pelayanan Kesehatan gratis kepada masyarakat jember
22	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/336/1.12/2022 tentang Penyelenggaraan	- Peraturan Pemerintah nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	- Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional komplementer yang aman, bermutu dan efektif. - Memberikan pelayanan Kesehatan



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Griya Sehat di Kabupaten Jember	- Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	perorangan yang bersifat pencegahan penyakit, peningkatan Kesehatan, penyembuhan dan pemulihan Kesehatan - Wahana Pendidikan Kesehatan tradisional atau jejaring fasilitas pelayanan Kesehatan.
23	Keputusan Bupati Nomor : 188.45/496/1.12/2022 tentang Pemberian Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Buruh Tani Tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022	- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	- Memebrikan perlindungan Dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan
24	Keputusan Bupati Nomor : 188.45/596/1.12/2022 tentang Penerima Bantuan	- Permenkeu Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka	- Pengendalian dan antisipasi dampak inflasi sebagai perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja guna mempercepat penyaluran



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Instan Transportasi (Subsidi BBM bagi ojek Online dan Ojek Pangkalan serta Sewa Angkutan Kota) di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022	Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022	belanja bantuan sosial untuk melindungi daya beli terutama pada kelompok rentan yang selanjutnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.
25	Keputusan Bupati Nomor : 188.45/457/1.12/2022 tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Sumber Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Kabupaten Jember	- Permenkeu Nomor : 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil TEMBAKAU MENURUT Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022	- Pemberian bantuan Uang Tunai/BLT DBHCHT pada Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat Lainnya.
26	Keputusan Bupati Nomor : 188.45/510/1.12/2022 tentang Penerima Santunan Bantuan Langsung Tunai dari Unsur Warga Lanjut Usia dan	- Permenkeu Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganann Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022	- Penanganan Dampak Inflasi Daerah, berupa Pemberian Bantuan Uang Tunai/BLT pada Nelayan, Tukang Ojek dan Masyarakat Lainnya yang terdampak Inflasi di Kabupaten Jember.



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Fakir Miskin di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022		
27	Peraturan Bupati Jember No 2 Tahun 2022 tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten jember	- Permen PANRB no 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja	- Memberikan kepastian / pedoman penerapan kelas jabatan ASN pada manajemen kepegawaian
28	Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata naskah dinas lingkungan pemerintahan kabupaten jember	- Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah	- Memberikan pedoman penerapan tata naskah dinas di lingkungan Pemkab Jember
29	Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2022 tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di	- PP no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah	- Memberikan pedoman kebijakan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemkab Jember



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	lingkungan pemerintah kabupaten jember		
30	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang indikator kinerja utama pemerintah kabupaten jember	- Perpres 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- Memberikan penetapan IKU dan pedoman tentang definisi operasional IKU Pemerintah Kabupaten Jember
31	Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten jember	- Perpres 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - permenPANRB no. 53 tahun penyusunan PK, laporan kinerja dan review atas laporan kinerja instansi pemerintah - PermenPANRB no 88/2021 tentang evaluasi AKIP instansi pemerintah - PermenPANRB no.89 / 2021 tentang penjenjangan kinerja	- Memberikan pedoman penerapan SAKIP di lingkungan pemerintah kabupaten jember



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		instansi pemerintah	
32	Keputusan bupati jember nomor 288.45/227/ 1.12/2022 tentang peta proses bisnis di lingkungan pemerintah kabupaten jember	- PermenPANRB no.19/2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah	- Memenuhi ketentuan penyusunan peta proses bisnis dalam pencapaian kinerja pemerintah kabupaten
33	Keputusan bupati jember nomor 188.45/107 1.12/2022 tentang penunjukan kepala PD, kepala bagian di lingkup setda dan direktur RSD sebagai agen perubahan dalam rangka pelaksanaan RB di lingkungan pemmerintah kabupaten jember	- PermenPANRB no 27/2014 tentang pedoman pembangunan agen perubahan di instansi pemerintah	- Memenuhi ketentuan pembentukan agen perubahan di lingkungan pemerintah kabupaten



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
34	Keputusan bupati jember nomor 188.45/353 1.12/2022 tentang tim penyelenggaraan mall pelayanan publik kabupaten jember tahun 2022	- UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - PermenPANRB nomor 92 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan mall pelayanan publik	- Penyediaan dasar bagi tim lintas PD yang bertugas untuk memfasilitasi penyelenggaraan MPP kabupaten jember
35	Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2022 Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun	- Peraturan bupati tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif di lingkungan pemerintah kabupaten jember



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340)	



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatue Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif	
36	Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/258/1.12/2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah pegawai negeri Sipil Pemerintah Kabupaten	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara - Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah	- Tim pelaksana kegiatan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten jember tahun anggaran 2022



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Jember Tahun Anggaran 2022	Nomor 54 Tahun 2003 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 200 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemerintah Daerah	
37	Peraturan bupati jember nomor 22 tahun 2022 tentang tata cara pengisian jabatan administator dan jabatan pengawas lingkungan pemerintah kabupaten jember	- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen	- Peraturan bupati tentang tata cara pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkungan pemerintah kabupaten jember



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik	



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340) - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.	
38	Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) - Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia	- Peraturan bupati jember tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten jember



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
		Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041) - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Ta. 2013 Nomor 1217) - Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127)	



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
39	Keputusan Bupati Jember Nomor:188.45/398/1.12/2022 tentang pengangkatan pimpinan badan amil zakat nasional kabupaten jember periode 2022-2027	- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	- Terbentuknya kepengurusan baznas kabupaten jember periode 2022 - 2027
40	Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2022 tentang Masterplan Pengembangan Smart City Tahun 2022-2026	- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Panduan perencanaan pengembangan daerah dimensi smart city
41	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/112/1.12/2022 tentang Tim Pengelola Smart City Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022	- Undang – Undang Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Pengelolaan sumberdaya dan aplikasi smart city yang digunakan di Lingkungan Pemrintah Kabupaten Jember
42	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/147/1.12/2022	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35	- Pengelola layanan informasi dan dokumentasi daerah



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jember	Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah - Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
43	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/149/1.12/2022 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan dan Keterbukaan Informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022	- Undang – Undang Republik Indonesia No 14 Ta 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional	- Mengelola (menerima aduan, memberikan respon, menindaklanjuti aduan) pada aplikasi SP4N-Lapor dan melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
44	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/561/1.12/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Daftar klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember
45	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/484/1.12/2022 tentang Komite Komunikasi Digital Kabupaten Jember Periode 2022-2024	- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Memantau dan memverifikasi Konten Digital dari media berbasis internet dan media sosial serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas kabar bohong, hoax dan ujaran kebencian
46	Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomer 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara	- Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 - Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang	- Amanat Peraturan Perundangan - Dasar Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022, yang menjadi salah satu sumber Anggaran dalam APD Desa Penggunaan ADD - Salah satunya diperuntukkan Untuk belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Pembagian, Penetapan Rincian Dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022	desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), setelah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)	Desa serta operasional Pemerintahan Desa
47	Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/456/1.12/2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi dan Penghapusan Sanksi Periodik Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jember	- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020	- Membebaskan sanksi administrative (denda keterlambatan per bulan) dan sanksi periodik (1 periodik=6 bulan) terhadap KBWU yang mati uji untuk mengaktifkan kembali KBWU
48	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/162/1.12/2022	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011	- Monitoring, evaluasi dan rekomendasi atas kegiatan penyelenggaraan Lalu lintas dan



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	tentang Tim Pelaksana Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Jember Tahun 2022	tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Angkutan Jalan
49	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/438/1.12/2022 tentang Tim Penilai dan Monitoring Evaluasi Dampak Lalu Lintas Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	- Dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas



3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

A. Urusan Pendidikan

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan kembali pendataan Kelompok umur dewasa maupun tua (25 tahun keatas) yang dulunya belum mendapat tingkat pendidikan yang baik dan menyiapkan program pendidikan Non Formal (PNF) yang memuat konten keaksaraan fungsional (kejar paket) atau konten muatan ketrampilan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau pemerintahan desa melalui komunitas belajar masyarakat (KBM).	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Tujuan : Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui Paket A dan Paket B, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Kursus dan Pendidikan Kecakapan Hidup, serta Pendidikan Kesetaraan Paket C Masalah yang diselesaikan : - Terlaksananya Program Paket A,B dan C; - Pendataan Warga Belajar Buta Aksara Tahun 2022;	Dinas Pendidikan Kab. Jember
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong pemerataan pendidikan pada kelembagaan formal, nonformal	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tujuan : Menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan	Dinas Pendidikan Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	dan informal, baik berupa pendidikan agama seperti madrasah, pondok pesantren, TPQ, Madrasah Diniyah, taman belajar dan sebagainya.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Masalah yang diselesaikan : - Pemberian Honorarium/Insentif Guru Tidak Tetap PAUD & RA - Bantuan PROGRAM BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA (BPPDGS)	
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan ormas keagamaan (NU dan Muhammadiyah) serta lembaga pondok pesantren dan lembaga lainnya yang mempunyai konsen dan perhatian terhadap masalah pendidikan untuk mewujudkan pendidikan merata dan peningkatan IPM.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tujuan : Sinergitas antara lembaga pemerintahan (Dinas Pendidikan) dengan lembaga organisasi masyarakat Masalah yang diselesaikan : - Mengakomodir usulan dari organisasi masyarakat terkait	Dinas Pendidikan Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					dengan permohonan bantuan yang diusulkan	
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus membuka kriteria seleksi beasiswa serta akses data penerima beasiswa pendidikan sekaligus besaran anggaran yang sudah dikeluarkan kepada publik. Penerima beasiswa harus diprioritaskan pada peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik terutama pada Guru Honorer, GTT, PTT.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Dinas Pendidikan Kab. Jember
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera merealisasikan peningkatan kesejahteraan GTT/PTT dengan merevisi kebijakan honor agar lebih sesuai dengan UMR dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dinas Pendidikan Kab. Jember
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memikirkan nasib GTT yang melebihi batas usia 35 tahun dengan mempertimbangkan masa pengabdian untuk prioritas dimasukkan dalam formasi ASN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Tujuan : Memetakan tenaga kependidikan di tingkat satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	dengan P3K.		Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan	berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Masalah yang diselesaikan : - Sudah terlaksananya seleksi Tenaga PPPK Guru dari Tenaga Honorer/GTT	
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera mengoptimalkan fungsi dan peran dewan pendidikan dalam menyusun konsep pendidikan berkualitas dan bermutu kedepan.	Nihil	Nihil	Nihil	Tujuan : Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan Masalah yang diselesaikan : Penyusunan konsep pendidikan berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Jember.	Dinas Pendidikan Kab. Jember



B. Urusan Kesehatan

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional pada masyarakat dengan mempertimbangkan prioritas warga yang benar – benar membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan serta mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan baik di puskesmas atau rumah sakit rujukan milik pemerintah sebagai prioritas untuk pemberian pelayanan pasien rujukan dari APBD.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan baik di puskesmas atau rumah sakit rujukan milik pemerintah sebagai prioritas untuk pemberian pelayanan pasien rujukan	Dinas Kesehatan Kab. Jember
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mendapatkan jaminan layanan kesehatan secara Mandiri.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada masyarakat dengan mempertimbangkan prioritas warga yang benar-benar	Dinas Kesehatan Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan	
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera melakukan dan menyampaikan pemetaan kebutuhan ideal tenaga kesehatan dan sekaligus segera menyusun program atau formasi untuk penentuannya.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Melakukan pemetaan kebutuhan ideal tenaga kesehatan di Kab Jember	Dinas Kesehatan Kab. Jember
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menghitung alokasi honor yang ideal bagi tenaga kesehatan dan sesuai dengan standart UMR dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah serta mengusulkan formasi atau quota perawat untuk diangkat menjadi ASN PPPK bertahap serta dukungan pemda agar KEMENPANRB memberikan afirmasi point pada perawat yang telah bekerja dan mengabdikan di pemerintahan daerah.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Menindaklanjuti kebijakan KemenPAN-RB dengan melakukan pendataan bagi tenaga kesehatan dan umum pada Dinas Kesehatan Kab Jember	Dinas Kesehatan Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kesehatan yang memenuhi standart layanan dalam upaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dengan menaikkan status POLINDES untuk dijadikan PONKESDES sebagaimana RPJMD.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dilakukan penilaian Polindes sesuai standar sarana dan prasarana pada Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. jika memenuhi syarat maka Polindes dapat ditingkatkan menjadi Ponkesdes	Dinas Kesehatan Kab. Jember
6	Pemerintah Daerah harus mendorong inovasi pelayanan kesehatan dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat sekaligus mendorong paradigma pola hidup sehat untuk mencegah sakit dari pada pelayanan ketika sudah sakit kepada masyarakat.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong paradigma pola hidup sehat untuk mencegah sakit (preventif promotive)	Dinas Kesehatan Kab. Jember



C. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek terutama pada program multiyears agar tepat waktu sesuai dengan target yang ditentukan.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyelenggaraan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Masih adanya perumahan dan permukiman yang belum mendapatkab penerangan Jalan Umum (PJU)	DPRKPCK Kab. Jember
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus bisa menjelaskan target capaiannya program tersebut dan manfaat yang didapatkan masyarakat atas program tersebut dengan mengacu pada target capaian Program sebagaimana tertera dalam RPJMD tahun 2021 sebagaimana sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 188/224/KPTS/013/2020 tentang Hasil Evaluasi Raperda APBD Jember Tahun Anggaran 2021, tertanggal 23 April 2020.					
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mengakselerasi dan menjelaskan progres penyusunan kebijakan penataan Ruang RTRW dan RDTR	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	Percepatan Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember	DPRKPCK Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			(RRTR) Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus tetap memastikan bahwa Pembangunan RTH harus memperhatikan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan perkotaan sebagaimana Peraturan Menteri PU No 05/PRT/M/2008 dan tidak bertentangan dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL BAB XI PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA Pasal 67 ayat 7 yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah.					



D. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mempertegas pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sesuai dengan mekanisme yang despakati yaitu dalam bentuk hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2018 Pasal 23 A, pemberian bantuan sosial yang diserahkan pada individu/keluarga harus disampaikan nama, alamat dan besaran bantuan sosial yang diberikan.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Masih ada Rumah yang berada di Tanah Milik Negara seperti rumah di bantaran sungai, rumah berada di dekat rel kereta api. Berkaitan dengan rumah yang berada di tanah milik Negara pada tahun 2022 Dinas PRKP dan cipta Karya Kabupaten Jember sudah menganggarkan Pendataan rumah yang berada di tanah milik Negara.	Dinas PRKP dan Cipta Karya Kabupaten Jember
2	Dalam penentuan sasaran dan pendataan rumah tidak layak huni harus mengoptimalkan fungsi Tim fasilitator Lapangan (TFL), RW/RT, dan pemerintahan desa, serta membubarkan keberadaan tim yang pembentukannya tidak diatur dalam ketentuan dan menjadikan inefisiensi anggaran.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dalam Penentuan Sasaran dan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Jember yaitu Dinas Dinas PRKP dan cipta Karya Kabupaten Jember berkolaborasi untuk menggali informasi Data Base Rumah tidak layak huni dengan Pemerintah Desa baik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi secara langsung maupun melalui Musyawarah Rencana	Dinas PRKP dan Cipta Karya Kabupaten Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					pembangunan(Musrenbang) desa, kecamatan, maupun Kabupaten	
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menerbitkan ketentuan pedoman, juklak, juknis untuk pelaksanaan program RTLH.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pedoman Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sudah ada	Dinas PRKP dan Cipta Karya Kabupaten Jember
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuka dan transparan terhadap data penerima program RTLH.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Penerima program RTLH di Kabupaten Jember sudah transparan dan dituangkan dalam data base di Dinas PRKP dan Cipta Karya Kabupaten Jember	Dinas PRKP dan Cipta Karya Kabupaten Jember



E. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera melakukan harus segera melakukan penataan PKL sebagaimana yang dijanjikan dalam RPJMD, maupun RKPD.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Menertibkan PKL dalam rangka Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Jember	Satpol PP Kab. Jember
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memperjelas program dan konsep kabupaten ramah HAM, capaian saat ini serta program selanjutnya yang strategis dilakukan.					
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan bencana serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terkait dengan keberadaan anggota Linmas di desa, yang bisa ditugaskan digaris terdepan dalam menginformasikan adanya kejadian bencana	Satpol PP Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	BPBD Kab. Jember
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan sosial, konflik dan keamanan serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas terjadinya konflik sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Bakesbang Dan Politik Kab. Jember
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Bakesbang Dan Politik Kab. Jember
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Bakesbang Dan Politik Kab. Jember



F. Urusan Sosial

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengoptimalkan kordinasi penanganan kemiskinan dengan segera membentuk dan mengoptimalkan fungsi Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (di bawah wakil bupati) dalam penanganan kemiskinan di kabupaten.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pada Tahun 2021 telah dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan yang terdiri dari Unsur Dinas Sosial Kabupaten Jember dan OPD terkait, tujuan dibentuknya Tim tersebut untuk memantau/ memonitoring permasalahan-permasalahan dilapangan tentang pelaksanaan bantuan yang diberikan pada Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember, akan tetapi pelaksanaan terbut kurang berjalan dengan optimal dan kinerjanya akan lebih dimaksimalkan pada tahun yang akan datang	Dinas Sosial Kab Jember
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menjalankan pendataan dan updating data kemiskinan daerah secara berkala (6 bulan sekali) sesuai dengan ketentuan yang diatur.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan dan updating data kemiskinan daerah melalui DTKS dilaksanakan dengan mekanisme : -pembukaan usulan dari kemensos untuk masing-masing dari desa, kemudian desa mengusulkan data masyarakat miskin - verifikasi ketidaklayakan dilaksanakan tiap bulan oleh masing-masing desa	Dinas Sosial Kab Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan fungsi dan kerja Tim Kesejahteraan sosial Kecamatan dalam penanganan kemiskinan di wilayah kecamatan.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	TKSK dilibatkan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Jember, dalam proses verval data dan assessment calon KPM di 31 Kecamatan, serta proses pendampingan pemberian bantuan pada Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember, dan membantu dinsos melaksanakan koordinasi dengan wilayah	Dinas Sosial Kab Jember
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menjalankan penanganan kemiskinan berbasis desa dengan mengoptimalkan terbentuknya pskesmas di setiap desa untuk penanganan dan pengaduan atas warga miskin berbasis desa.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan pembekalan untuk Puskessos dengan tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam menangani pengaduan masyarakat di wilayah, membantu Dinsos berkoordinasi dengan wilayah, melaksanakan assessment masy miskin, dan pendampingan pendistribusian pemberian bantuan di wilayah	Dinas Sosial Kab Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus transparan dan berbasis kebutuhan dan data dalam pemberian saran dan prasarana terkait pemberdayaan warga miskin serta penyanggah masalah kesejahteraan sosial.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan bagi warga miskin dan PMKS lainnya melalui mekanisme usulan dari Kecamatan/Desa, kemudian dilakukan verval data/asessement, layak/tidak layak untuk mendapatkan bantuan, yang bertujuan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran	Dinas Sosial Kab Jember
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih serius dalam penanganan dan kepedulian terhadap disabilitas dengan mengimplementasikan secara maksimal pelaksanaan perda disabilitas serta peraturan bupati terkait disabilitas.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pada Tahun 2021 anggaran untuk penanganan Disabilitas kurang mencukupi, sehingga berdampak pada pelaksanaan penanganan Disabilitas yang kurang maksimal, dan pada Tahun 2022 Dinas Sosial telah memaksimalkan bantuan utk disabilitas, diantaranya pemberian bantuan sembako, susu, alat kesehatan, dan pelaksanaan kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional)	Dinas Sosial Kab Jember



G. Urusan Ketenagakerjaan

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk serius melakukan terobosan perencanaan program dan implementasi program untuk penyerapan tenaga kerja dan mengatasi pengangguran.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Memberikan informasi lowongan pekerjaan, dengan mempertemukan pihak penyedia/perusahaan dengan pencari kerja. Kegiatan dimaksud sebagai upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Jember. Selain kegiatan tersebut juga disediakan info loker pada 2 mediagram kami. (IG : @disnakerjember @loker.disnakerjember)	Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dalam program permasalahan hubungan industrial dengan lebih meningkatkan kolaborasi dengan serikat pekerja, atau assosiasi buruh di Jember.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dicatatkan di Disnaker	Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali fungsi dewan pengupahan daerah.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pembahasan Usulan UMK Jember oleh Depekab	Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong untuk pemenuhan UMR pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jember.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kepada perusahaan untuk patuh pada ketentuan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan pengawasan dan operasi perusahaan perusahaan/industri di daerah terutama yang memperkerjakan tenaga kerja asing.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring keberadaan TKA di perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan pendataan para pekerja migran Indonesia yang berkerja di luar negeri serta enjamin perlindungan baik pada PMI maupun keluarganya.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pendataan sudah dilakukan tersistem dan terkoneksi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Secara berkala P3MI juga melaporkan perkembangan CPMI nya. Pendataan juga bekerjasama dengan Migran Care, Desbumi dan Desmigratif.	Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengimplementasikan UU Pelindungan Pekerja Migran dengan membuat perda pelindungan pekerja migran serta pusat pelayanan terpadu baik ditingkat daerah maupun desa kantong – kantong PMI.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Tahapan Raperda Perlindungan Pekerja Migran sampai pada tahapan telah berkonsultasi Propemperda kepada Biro Hukum Setda Prov Jatim. Untuk meningkatkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, telah dilakukan MoU antara Pemkab Jember dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pusat Pelayanan Terpadu atau LTSA, belum terlaksana.	Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember



H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus serius dalam melakukan pangarusutamaan gender disetiap OPD baik untuk pendataan, perencanaan program, serta anggaran.	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Setiap Desa diharuskan untuk memiliki anggaran terkait PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)	DPPPAKB Kab. Jember
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan penanganan serius dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Jember.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Agar setiap masyarakat atau lapisan memahami cara pelaporan terhadap kekerasan pada perempuan dan melakukan pencegahan kekerasan pada perempuan	DPPPAKB Kab. Jember
		PROGRAM PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Meningkatkan kesejahteraan anak melalui pembentukan dan pembinaan Forum Anak Jember, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	DPPPAKB Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember transparan dalam implementasi kabupaten layak anak baik dalam capaian dan menyusun program kongkrit untuk keberlanjutannya.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan kesejahteraan anak melalui Kabupaten Layak Anak	DPPPAKB Kab. Jember
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih memperluas kolaborasi dan membangun partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi, Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Agar terciptanya Perempuan Berdaya dan lebih meningkatkan Produktifitas perempuan yang mandiri secara ekonomi	DPPPAKB Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan kesejahteraan anak melalui Kabupaten Layak Anak	DPPPAKB Kab. Jember



I. Urusan Kependudukan dan Capil

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan kebijakan desentralisasi pelayanan kependudukan di kecamatan seperti yang sudah dijalankan di beberapa kabupaten lainnya.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1).Melaksanakan kebijakan desentralisasi pelayanan kependudukan di kecamatan, dengan pendukung layanan : - WA Online - Aplikasi Pleno -Aplikasi SIP - Aplikasi LAHBAKO	1). Dispendukcapil 2). WAK di 8 titik kec. Sbb: Silo, Mayang, Wuluhan, Tempurejo, Kencong, Tanggul dan Rambipuji 3). layanan di 31 kecamatan
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menyusun dan menyiapkan terobosa inovasi dalam pelayanan kependudukan di kecamatan seperti yang sudah dijalankan di beberapa kabupaten lainnya.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispendukcapil telah melaksanakan inovasi-inovasi dan terobosan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sarana pendukung sbb : 1.adanya Petugas WAK di 8 titik di kecamatan sebanyak 16 operator dafdukcapil 2. Layanan dispendukcapil sampai ke Desa-desa sebanyak 161 desa yang sudah LAHBAKO (Layanan Harian Buat Orang Jember) 3. di 31 Kecamatan pelayanan pengaduan permasalahan data admindukcapil 4. pelayanan untuk masyarakat secara Daring (WA online, SIP)	1). Dispendukcapil 2). WAK di 8 titik kec. Sbb: Silo, Mayang, Wuluhan, Tempurejo, Kencong, Tanggul dan Rambipuji



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mengoptimalkan peran kecamatan serta sarana dan prasarana yang tersedia di kecamatan untuk mendukung pelayanan kependudukan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SARPRAS yang sudah di dropping dari dispendukcapil untuk mendukung pelayanan sbb: 1). Mobile Enrollment sebanyak 13 unit 2). PC sebanyak 8 unit untuk 8 titik WAK 3).Printer KTP el sebanyak 8 unit untuk wak 4). Printer Multifungsi sebanyak 8 unit untuk wak Dari 31 kecamatan yang sudah terpenuhi sarprasnya dan baru 8 titik wak yang dapat mencetak KTP el, sedangkan 23 kecamatan masih memerlukan sarpras yaitu tenaga operator sebanyak 46 operator dan peralatan sebagaimana point 1 sd 4	1). Dispendukcapil 2). WAK di 8 titik kec. Sbb: Silo, Mayang, Wuluhan, Tempurejo, Kencong, Tanggul dan Rambipuji 3). layanan di 31 kecamatan



J. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan UU Desa serta pelaksanaan dana desa.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai kaidah peraturan perundang-undangan	DPMD Kab. Jember
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	DPMD Kab. Jember
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan desa	DPMD Kab. Jember
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	DPMD Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Peningkatan kapasitas anggota BPD	DPMD Kab. Jember
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Penegasan Batas Desa dengan penetapan melalui Peraturan Bupati	DPMD Kab. Jember
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terfasilitasinya pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui pembinaa dan pengawasan serta pendampingan mulai tingkat kecamatan sampai kabupaten	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Terfasilitasinya pelaksanaan evaluasi dan pengawasan peraturan desa melalui pendampingan penyusunan dan pelaporan realisasi APBDesa dengan tepat waktu.	



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong dan memfasilitasi lahirnya inovasi baik dalam peningkatan pelayanan maupun perekonomian desa.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib sesuai dengan peraturan	DPMD Kab. Jember
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong lahirnya desa percontohan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tujuannya adalah mengevaluasi, menilai dan mendorong Pemerintah Desa dan Kelurahan bersama masyarakat untuk menemukan dan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya serta untuk mengetahui capaian yang ada di Desa dan Kelurahan selama kurun waktu satu tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa dan Kelurahan pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan serta kemasyarakatan. Adapun Lomba Desa dan Kelurahan sebagai wadah apresiasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa penghargaan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan atas prestasi yang telah dicapai	DPMD Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					dalam memajukan, memandirikan dan mensejahterakan masyarakat di Desa dan Kelurahan	
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat dalam pembangunan.					



K. Urusan Perhubungan

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memiliki konsep inovatif dalam pengembangan moda transportasi publik massa yang ramah baik dalam layanan maupun trayek.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/ kota	Tujuan : memeratakan layanan angkutan Bagi masa pedesaan Membuka aksesibilitas wilayah agar meningkatkan potensi daerah	Dina Perhubungan
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan lobby pemulihan dan pengaktifan kembali operasionalisasi bandara.	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Tujuan : Dalam rangka menjamin keberlangsungan operasional Bandara Notohadi Negoro sesuai dengan Sertifikat Bandar Udara Nomor :067/SBU-DBU/IV/2020 Masalah yang diselesaikan : a. Dinas Perhubungan Jember telah berkirin surat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandara Wilayah III terkait permohonan pemulihan penerbangan di Jember (No : 553/542/322/2022)	Dina Perhubungan



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					b. Pada tanggal 23 – 24 Mei 2022 Bupati Jember dan Dinas Perhubungan Jember telah melaksanakan audiensi dan negosiasi dengan Direktorat Angkutan Udara, PT. Citilink Indonesia dan PT. Lion Air terkait optimalisasi pelayanan penerbangan di Bandara Notohadi Ngoro.	
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera memperjelas kerjasama pengembangan bandara dengan pemerintah pusat, BUMN atau Angkasapura.	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Tujuan : Untuk memperjelas status kepemilikan Bandara sehingga dapat meningkatkan mutu, kualitas, jenis dan cakupan penerbangan di Bandara Notohadi Ngoro. Masalah yang diselesaikan : a. Bupati Jember telah berkirin surat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara perihal Permohonan	Dinas Perhubungan



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					Dukungan terkait Pengembangan Bandar Udara Notohadji Negoro, Bupati Jember meminta agar diberikan kesempatan untuk mediasi dan melakukan pertemuan dengan PT. Angkasa Pura II, PTPN XII dan Lanud Abd Saleh (Surat Nomor: 553/143/322/2021) b. Terkait lahan yang ditempati oleh Bandara hingga saat ini belum adanya kesamaan visi, misi maupun aksi yang dapat menunjang peningkatan pelayanan penerbangan di Bandara. Hal ini dikarenakan terbentur dengan beberapa regulasi pada masing – masing pihak. c. Terkait dengan rencana pengembangan Operator	



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					atau Pengelola Bandara, permasalahannya adalah belum adanya program / rencana dari pihak Investor Operator Bandara terkait pengelolaan dan pengembangan Bandara Jember. Hal ini disebabkan karena adanya dampak Pandemi Covid-19 dan perubahan Manajemen serta kebijakan dari pihak Investor Operator Bandara	
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan kembali penataan lalu lintas jalan terutama pada wilayah wilayah yang rawan kemacetan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tujuan : Ketertiban dan kelancaran dalam pengendalian lalu lintas dan Meningkatnya keselamatan dalam berlalu lintas. Masalah yang diselesaikan : mengurai kepadatan kawasan rawan macet dengan merencanakan,melaksanakan serta evaluasi manajemen rekayasa berdasarkan kondisi terbaru, hasil survey dan analisa.	Dinas Perhubungan



L. Urusan Komunikasi dan Informasi

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan percepatan dan langkah-langkah untuk implementasi E-Government terutama dalam mendukung pelayanan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis dilaksanakan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Jember	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera mengimplementasikan sistem informasi desa terutama bagi daerah-daerah yang tidak kesulitan jaringan dalam mendukung penyelenggaraan informasi pembangun di desa.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan akses jaringan internet untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk memaksimalkan peran OPD dan PPID dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Belum optimalnya dalam menjalankan Keterbukaan Informasi Publik sehingga dilakukan inovasi dengan membuat website PPID Desa untuk sejumlah 226 Desa di Kabupaten Jember	Dinas Komunikasi dan Informatika



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk menjalin mitra kolaborasi dan strategis secara professional dengan beberapa pihak dalam penyediaan informasi pada publik terkait pembangunan.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik	Menyajikan berita yang berimbang kepada publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan hubungan media	Menyajikan berita dengan narasumber yang terpercaya untuk menghindari adanya pemberitaan HOAX	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PRGORAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis dilaksanakan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Jember	Dinas Komunikasi dan Informatika



M. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta wirausaha baru di Jember.	PROGRAM PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Penilaian kesehatan koperasi simpanpinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Kbaupaten/Kota	Tujuan : Agar melaksanakan kegiatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sesuai peraturan yang ada	Dinas Koperasi dan UM Kab. Jember
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan koperasi di Jember.	PROGRAM PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Penilaian kesehatan koperasi simpanpinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi	Terwujudnya pengelola KSP/USP koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi dan UM Kab. Jember
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera memfungsikan bangunan dan menetapkan pengelolaan Pusat Layanan Usaha KUMKM (PLUT UMKM).	PROGRAM PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Penilaian kesehatan koperasi simpanpinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang	Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi	Terwujudnya pengelola KSP/USP koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi dan UM Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terjaminnya aset kegiatan USP oleh koperasi sesuai dengan peraturanperundang-undangan Masalah yang diselesaikan : Sebagai pelaksana peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No : 09 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi	
		PROGRAM PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Penilaian kesehatan koperasi simpanpinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Tujuan : Agar pelaksanaan koperasi sesuai dengan pedoman yang ada Pengurus dan pengawas koperasi lebih akuntabel dan kredible dalam pengelolaannya Memastikan pekerjaan dilakukan sesuai rencana, mamastikan keamanan aset perusahaan, mamastikan ketelitian dan keabsahan data akuntansi, meningkatnya efesiensi	Dinas Koperasi dan UM Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					Masalah yang diselesaikan : Pengurus/pengawas koperasi memahami tugas dan fungsi dalam mengelola koperasi	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	Tujuan : Memahami prinsip-prinsip Muamalah Syariah, mulia dan kaidah fiqh dan dasar pengelolaan koperasi pola syariah yang baik dan benar yang digunakan MUI dalam	Dinas Koperasi dan UM Kab. Jember
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Koperasi Pola Syariah	Meningkatkan pengetahuan pengurus, pengawas, pengelola koperasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta dapat meningkatkan kemampuan, ketrampilan, kapasitas serta memperbaiki sikap dan perilaku SDM koperasi dalam rangka meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha	Dinas Koperasi dan UM Kab. Jember



N. Urusan Penanaman Modal

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong penyelenggaraan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tujuannya untuk memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali keberadaan Forum CSR dan membuat regulasi berkenaan di CSR.					



O. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kembali kejayaan dan prestasi olah raga di tingkat regional maupun nasional.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Meningkatkan prestasi olahraga dengan meningkatkan pembinaan dan pelatihan atlet	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan anggaran dan program pembinaan prestasi untuk cabang organisasi potensial.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (sport science)	Meningkatkan prestasi cabang olahraga potensial dan unggulan daerah melalui pemanfaatan teknologi dan pelatihan yang intensif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan reward untuk atlet berprestasi baik regional maupun nasional.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Meningkatkan reward bagi atlet berprestasi untuk memacu peningkatan prestasi yang lebih tinggi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi Stadion JSG dan manajemen, kalau memungkinkan didorong pembinaan prestasi olah raga dan menghasilkan PAD.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menyaring bibit atlet potensial melalui penyelenggaraan kejuaraan sekaligus mengoptimalkan penggunaan Stadion JSG	Dinas Kepemudaan dan Olahraga



P. Urusan Kebudayaan

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan pendataan dan program pembinaan pada kelompok dan pekerja seni dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Jember.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Kebudayaan	Melestarikan seni budaya dengan meningkatkan partisipasi/ peran serta seni budaya lokal dalam kegiatan event seni budaya.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk merealisasikan janji pembangunan fasilitas berupa gedung atau arena pertunjukan seni dan budaya.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten	Penyediaan Sarana dan Prasarana Museum	Benda cagar budaya, peninggalan sejarah yangm terjaga dan terawatt, edukasi masyarakat tentang sejarah melalui peninggalan sejarah dan cagar budaya.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk menyusun kalender event seni dan budaya unggulan Jember.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Kebudayaan	Mengembangkan event seni budaya tradisional, Lembaga adat, sebagai kegiatan pelestarianbudaya lokal.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Q. Urusan Perpustakaan

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong budaya literasi pada masyarakat dengan kolaborasi dan pemberdayaan pada komunitas literasi yang ada di Jember.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kegiatan J-Permataku (Jember-Perkumpulan Remaja Pecinta Buku) pada Desa se Kabupaten Jember, dikhususkan untuk remaja usia 12 sampai 19 tahun namun disesuaikan dengan keadaan Desa masing masing. Tujuan utama J-Permataku adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif aktif masyarakat khususnya Remaja dalam pembangunan berwawasan kependudukan; b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Remaja (Generasi Penerus Bangsa) dalam memasuki era persaingan global;	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					c. Menutup gap kualitas kompetensi Remaja (Generasi Penerus Bangsa) antara pedesaan dan perkotaan; d. Menjadikan Remaja sebagai pemicu dan Penggerak bagi Pembangunan Sumberdaya Manusia di Lingkungannya; e. Meningkatkan potensi kemandirian masyarakat dalam menghadapi tantangan global di era digital. Menjadi penggerak bangkitnya dan optimalisasi layanan Perpustakaan Desa kepada masyarakat	
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah (koleksi buku, gedung, serta perpustakaan digital, perpustakaan mobile).	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pengadaan koleksi buku fisik perpustakaan dan koleksi buku digital e-book perpustakaan yang pada tahun 2022 untuk koleksi buku fisik perpustakaan sebanyak 833 eksemplar; 120 judul dan koleksi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					buku digital ebook perpustakaan sebanyak 2.300 eksemplar; 1.150 judul	
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong pembinaan perpustakaan di fasilitas publik, kantor-kantor pemerintah serta di desa.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Melakukan kegiatan pinjaman buku bergulir ke OPD dan sekolah sesuai dengan surat permohonan yang masuk. Fasilitas yang didapatkan adalah 1 unit rak buku dan 200 eksemplar buku dengan jangka waktu kurang lebih 2 bulan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember



R. Urusan Perikanan dan Kelautan

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali potensi perikanan yang dimiliki Jember.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mendorong minat masyarakat untuk membudidayakan ikan Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk olahan perikanan	Dinas Perikanan
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Nelayan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan pengetahuan akan daya dukung alam dan perikanan yg berkelanjutan	Dinas Perikanan
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan Nelayan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjamin keselamatan kerja nelayan	Dinas Perikanan
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mempermudah ijin dan birokrasi dalam meningkatkan pengelolaan TPI (cold storage).	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Cold Storage untuk menindaklanjuti putus kontrak dengan pengelola lama dan mencari pengelola baru	Dinas Perikanan



S. Urusan Pariwisata

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kunjungan dan PAD dari sektor wisata.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Permasalahan dalam peningkatan PAD pada Tahun 2021 masih terkendala dengan adanya wabah Covid sehingga di Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten melalui penyediaan anggaran dari DAK Non Fisik tahun 2022 memberikan peningkatan kualitas SDM bagi pengelola destinasi dan bagi para pelaku wisata,	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Pengadaan / Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Pariwisata Kabupaten / Kota	diantaranya melalui beberapa kegiatan yaitu : 1) Pelatihan Pemandu Ecowisata; 2) Pelatihan Pemandu Budaya, Museum; 3) Pelatihan Kuliner; 4) Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata; 5) Pelatihan Pengelolaan Homestay; 6) Pelatihan Pengelolaan Toilet; 7) Pelatihan Pengelolaan Sanitasi Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Selain itu program	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					pemasaran pariwisata yang meliputi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata dan peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata yaitu melalui pemilihan duta wisata yang nantinya bisa membantu mempromosikan wisata Kabupaten Jember	
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan destinasi yang menjadi aset daerah seperti Watu Ulo, Rembangan, bahkan sekarang muncul Pantai Payangan atau Teluk Love.	-	-	-	Dalam rangka optimalisasi perbaikan sarana dan prasarana pada UPT wisata belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia anggaran pada Tahun 2022, dan akan dianggarkan pada Tahun 2023	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih inovatif dalam menyusun Calender of Event yang menarik dan berjalan sepanjang bulan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Jember.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Penyusunan kalender event telah dilakukan di tahun 2022 meski masih dalam bentuk hard copy dan PDF, agar lebih inovatif sangat diperlukan dukungan dan ketersediaan sarana	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota	pendukung berupa penyediaan aplikasi agar setiap event di Jember, di Desa dan di Kecamatan dapat terekspose secara optimal kepada masyarakat dan wisatawan untuk meningkatkan kunjungan ke Jember	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan kolaborasi antara pilar pendukung dan pelaku wisata yaitu Hotel, Restoran, Lembaga biro perjalanan, pengelola destinasi dan desa wisata serta pelaku budaya dalam mengembangkan sektor wisata unggulan daerah.	-	-	-	Dalam melakukan promosi pariwisata, sinergitas dan kolaborasi dengan asosiasi dan penggiat wisata telah diupayakan membentuk badan promosi pariwisata daerah, namun masih terkendala belum ditetapkannya perda rencana induk pariwisata daerah kabupaten Jember	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



T. Urusan Pertanian

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD	
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan			
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kesejahteraan petani.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Ketenaga Kerjaan (Buruh Tani)	Diasuransikan sebanyak 10.235 Orang	DTPHP Jember	Kab.
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan program pemberdayaan pada kelompok tani.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Melalui Sekolah Lapang Tembakau,	Di laksanakan pada kelompok tani sebanyak 5 unit, 10 unit, 27 unit	DTPHP Jember	Kab.
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Melalui Pelatihan			
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembuatan Pupuk Organik, Pembentukan dan			



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan teknologi pertanian (alat pertanian, dan pupuk).	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.	JUT : Di laksanakan sebanyak 89 paket dan 57 paket JIT : Di laksanakan sebanyak 57 paket	DTPHP Kab. Jember
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menyusun kebijakan penetapan lahan pertanian berkelanjutan untuk mengantisipasi banyaknya pengalihan lahan pertanian produktif menjadi pemukiman dan industri.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2	Telah selesai di laksanakan dan di tindak lanjuti untuk dijadikan perda	DTPHP Kab. Jember
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan peran Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian sesuai dengan tupoksinya dilapangan.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Melalui Pelatihan Teknis Tanaman Kopi Petani	Pelatihan teknis tanaman kopi petani	DTPHP Kab. Jember



U. Urusan Perdagangan

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengarahkan program revitalisasi pasar lebih substantif mendorong pasar berstandart SNI sebagaimana diatur dalam Ketentuan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN yang didalamnya mengatur Pedoman pasar Rakyat serta PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Telah dilakukan revitalisasi sejumlah 30 pasar di kabupaten Jember tahun 2018 sampai 2020. Akan tetapi belum dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi Pasar SNI, dan diupayakan kedepannya menjadikan pasar Tanjung, Pasar Kreyongan, Pasar Mangli dan Pasar Sempolan menjadi pasar SNI.	Disperindag Kab. Jember
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuat kebijakan dan program perlindungan pedagang / pasar tradisional ditengah fenomena gempuran masuknya pasar modern dan berjaringan.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Telah adanya perda No. 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan.	Disperindag Kab. Jember



V. Urusan Industri

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera membuat perencanaan dan program dalam menumbuhkan kluster industri berbasis pertanian.	PROGAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Melaksanakan Kajian Sentra Industri Hasil Tembakau dan Perencanaan DED/ Blueprint Rumah Tembakau	Disperindag Kab. Jember
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mendorong terbentuknya wirausaha baru sektor industri berbasis potensi unggulan daerah.	PROGAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Melaksanakan Kajian Sentra Industri Hasil Tembakau dan Perencanaan DED/ Blueprint Rumah Tembakau	Disperindag Kab. Jember
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Pertembakauan di Jember untuk memberikan perlindungan kepentingan petani dan pengusaha tembakau di Jember.	PROGAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Melaksanakan Kajian Sentra Industri Hasil Tembakau dan Perencanaan DED/ Blueprint Rumah Tembakau	Disperindag Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih mengoptimalkan dana DBHCHT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	PROGAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Melaksanakan Kajian Sentra Industri Hasil Tembakau dan Perencanaan DED/ Blueprint Rumah Tembakau	Disperindag Kab. Jember
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan program untuk peningkatan peran dan fungsi Komisi Urusan Tembakau Jember (KUTJ).					



W. Urusan Administrasi Pemerintahan

No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan PPAS Kabupaten Jember	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Jember	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Verifikasi RKA-SKPD OPD se-Kabupaten Jember	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Verifikasi Perubahan RKA-SKPD OPD se-Kabupaten Jember	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Verifikasi DPA-SKPD OPD se-Kabupaten Jember	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Verifikasi Perubahan DPA-SKPD OPD se-Kabupaten Jember	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Menyusun Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran kepada Seluruh OPD se-Kabupaten Jember	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Seluruh Operator Perencanaan OPD se-Kabupaten Jember	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2	Pemerintah daerah harus mengoptimalkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan terutama dalam penggunaan SIPD.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Seluruh Operator Perencanaan OPD se-Kabupaten Jember	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan dalam bentuk Rekonsiliasi dan Sosialisasi kepada seluruh Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Keuangan di OPD se-Kabupaten Jember	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dengan meningkatkan status WDP menjadi WTP serta peningkatan kinerja program melalui peningkatan nilai SAKIP.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rekonsiliasi data laporan Keuangan di seluruh OPD dan BLUD se Kabupaten Jember	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan dalam bentuk Rekonsiliasi dan Sosialisasi kepada seluruh penyusun Laporan Keuangan di OPD se-Kabupaten Jember	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penerapan Penatausahaan Persediaan/Bahan Pakai Habis secara Komputerisasi dengan Menggunakan Sistem Aplikasi Informasi Persediaan Daerah (SIPERDA) . Sistem Aplikasi Informasi Persediaan Daerah adalah sebuah sistem aplikasi komputerisasi yang sangat membantu untuk melakukan penatausahaan persediaan daerah mulai dari penerimaan barang, pengeluaran barang, rekonsiliasi dengan LRA, stock opname, laporan akuntansi persediaan, dll	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penerapan Pengelolaan SIMPEMDA (Sistem Informasi Pemanfaatan Aset Daerah) J-PAS . Berguna untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan pengawasan pemanfaatan aset daerah sebagai sarana mendata Aset Daerah yang di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Selain itu, untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Aset Daerah. Dengan Sistem Informasi Pemanfaatan Aset Daerah dapat memfasilitasi dan memberikan kemudahan organisasi perangkat daerah dalam mengontrol pemanfaatan dan pengawasan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



No	Rekomendasi Tahun 2021	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih professional melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Inovasi Daerah					

4

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan merupakan kinerja atas Tugas Pembantuan Daerah dan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (11) bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah *“Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”*.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekosentrasi sehingga pemberian tugas pembantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum serta ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Sedangkan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 363 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, dan saling menguntungkan.

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan, Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian dan Tugas Umum Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2022:

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya dalam rangka mendukung kebijakan nasional, provinsi ataupun kebijakan pemerintah kabupaten dengan pendekatan efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran-anggaran dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan kepada daerah untuk penyelenggaraan tugas tersebut.

Pelaksanaan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau disebut juga dengan tugas pembantuan, urusan bersama dan kantor pusat diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta percepatan



penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa tugas pembantuan adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah *“Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”*. Sedangkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pasal 9 bahwa *“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan”*.

Landasan hukum kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan) Tahun 2022 di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 ini meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan tugas tertentu.

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah tingkat Atasnya

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 11-23 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan



Tugas Pembantuan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berisikan penjelasan umum tugas pembantuan, pendanaan dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan untuk Kabupaten Jember pada Tahun 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Alokasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022 Kabupaten Jember

No.	Instansi	Alokasi
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000.000
	Jumlah	100.000.000

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember Tahun 2022

4.1.1.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terdapat 1 (satu) program Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total anggaran Rp.100.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.62.993.530,- atau 62,99% dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi. Adapun program yang dimaksud adalah **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.**

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur;
- b. Surat Pemprov Jatim Sekretariat Daerah Tanggal 14 Januari 2022, Nomor : 412.2/207/112.3/2021, Perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Prov. Jawa Timur Tahun 2021.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim.

3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana tertuang dalam Kegiatan BKK Provinsi sebesar Rp.100.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos sebesar Rp.500.000,-.
- b. Belanja Penggandaan sebesar Rp.969.300,-.
- c. Belanja ATK sebesar Rp.3.694.700,-.
- d. Belanja Mamin sebesar Rp.12.554.000,-.
- e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.29.440.000,-.
- f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.8.052.000,-.
- g. Belanja Honorarium Narasumber BKK Provinsi sebesar Rp.10.950.000,-.
- h. Belanja Lembur BKK Provinsi sebesar Rp. 33.840.000,-.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA. 2022 sebesar Rp.100.000.000,-

6. Realisasi

Dana Anggaran Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa sebesar Rp.100.000.000,-, dapat terealisasi sebesar Rp. 62.993.530,- atau sebesar 62,99% dalam bentuk BKK Provinsi yang terdiri dari:

- a. Belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya dari pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau dengan capaian 0% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:



- Belanja Materai dari pagu anggaran sebesar Rp.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
- b. Belanja Penggandaan dari pagu anggaran sebesar Rp. 969.300,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau dengan capaian 0% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja Penggandaan dari pagu sebesar Rp. 969.300,- terealisasi sebesar Rp. 0,-
- c. Belanja ATK dari pagu anggaran sebesar Rp.3.694.700,- terealisasi sebesar Rp.1.171.530,- atau dengan capaian 31,7% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja ATK dari pagu anggaran sebesar Rp.3.694.700,- terealisasi sebesar Rp.1.171.530,-
- d. Belanja Mamin dari pagu anggaran sebesar Rp.12.554.000,- terealisasi sebesar Rp.5.439.000,- atau dengan capaian 43,32% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja Mamin dari pagu anggaran sebesar Rp.12.554.000,- terealisasi sebesar Rp.5.439.000,-
- e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp.29.440.000,- terealisasi sebesar Rp.29.112.000,- atau dengan capaian 98,88% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp.29.440.000, terealisasi sebesar Rp.29.112.000,-
- f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp.8.052.000,- terealisasi sebesar Rp.4.660.000,- atau dengan capaian 57,87% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp.8.052.000,- terealisasi sebesar Rp.4.660.000,-



g. Belanja Honorarium Narasumber BKK Provinsi pagu anggaran sebesar Rp. 10.950.000,-, terealisasi sebesar Rp. 0,- atau dengan capaian 0% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:

- Belanja Honorarium Narasumber BKK Provinsi sebesar Rp.20.400.000,- terealisasi sebesar Rp.6.800.000,-

h. Belanja Lembur BKK Provinsi pagu anggaran sebesar Rp.33.840.000,-, terealisasi sebesar Rp. 22.611.000,- atau dengan capaian 66,81% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:

- Belanja Honorarium Narasumber BKK Provinsi sebesar Rp.33.840.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.611.000,-

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Jember tidak memberikan dana untuk Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Desa.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Hambatan / Permasalahan Tugas pembantuan di Kabupaten Jember menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan pada tahun yang akan datang.

4.2.1 Hambatan/Permasalahan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah tingkat Atasnya

Tugas pembantuan yang telah diterima Kabupaten Jember dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari pelaksanaan yang dilaksanakan terdapat permasalahan dan solusi yang akan menjadi evaluasi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan pada tahun yang akan datang . Berikut hambatan / permasalahan dan solusi OPD, diantaranya:



4.2.1.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pembantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya terdapat 1 Program yaitu:

A. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi.

Dalam satu program diatas dapat disimpulkan permasalahan dan solusi sebagai berikut:

a. Permasalahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi:

- Keterlambatan pencairan dana BKK untuk beberapa Desa, sehingga proses realisasi mendekati akhir tahun anggaran.
- Adanya keterlambatan pengajuan dokumen administrasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di beberapa Desa.

b. Solusi:

- Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Telah dilakukan pengarahan dan pendampingan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk segera diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan.

4.3 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Sebagai pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Jember menyelenggarakan tugas umum pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pelaksanaan



tugas tersebut menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sebuah pemerintahan yang mampu menerapkan asas-asas hukum yang dapat menciptakan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 363 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, dan saling menguntungkan.

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam berbagai bidang pembangunan daerah menghasilkan aliran dana pembangunan, baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hasil dari dana tersebut dapat mendukung pencapaian sasaran program / kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Jember.

Sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga diupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat guna menciptakan situasi ketenteraman, keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Pelaksanaan kerja sama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti dengan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Adapun penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022 dapat dilaporkan sebagai berikut:

4.3.1 Kerja Sama Antar Daerah

Dalam tahap implementasi, kerja sama antar daerah didasarkan atas asas saling menguntungkan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya membangun kerja sama yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama Daerah Kabupaten Jember maka pada Tahun 2022 dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jember melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor: 188.45/21/1.12/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022. Tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
2. Menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
3. Memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;



6. Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
7. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
8. Mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
9. Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
10. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2022, Pelaksanakan kerja sama daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang Kerjasama penyeleggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Kerjasama penyeleggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
3. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Pelaksanaan bimbingan perkawinan dan persiapan kehidupan berkeluarga bagi calon pengantin dalam rangka penguatan ketahanan dan



kesejahteraan keluarga serta percepatan penurunan stunting di Kabupaten.

4. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Kerjasama penyeleggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
5. Perjanjian Kerjasama antara Diskominfo Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dengan Diskominfo Kabupaten Jember tentang Implementasi aplikasi E-office dan E-Sokip di Pemerintah Kabupaten Jember.
6. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Dirjen Perbehendaraan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur tentang Pemanfaatan bersama data dan informasi serta pendampingan penyeleggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolongo Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Kerjasama penyeleggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
8. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Kejaksaan Negeri Jember tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
9. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Penyeleggaraan seleksi calon dewan pengawas perusahaan umum daerah Perkebunan Kahyangan Jember.
10. Nota Kesepakatan antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI dengan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.



11. Nota Kesepakatan antara Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Penempatan dan perlindungan pekerja imigran Indonesia.
12. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemkab se- Jawa Tmur tentang Kerjasama penyeleggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
13. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Replikasi sistem informasi laporan LPPD.
14. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Jember dan Kantor Pertanahan Jember tentang Kerjasama pelaksanaan pendaftaran, pensertifikatan, harta benda wakaf berupa tanah dengan bangunan tempat ibadah di Kabupaten Jember.
15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

4.3.2 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, pemerintah daerah terkadang dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan yang tidak hanya terpenuhi langsung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan seperti keterbatasan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi, serta anggaran yang dimiliki maka dilakukan Kerja Sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dalam upaya meningkatkan efisiensi, pendapatan asli daerah dan pengelolaan potensi daerah serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sepanjang Tahun 2022 kebijakan dan kegiatan-kegiatan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Perusahaan Umum Bulog Kantor Cabang Jember tentang Kerjasama Penyediaan Kebutuhan Pangan dalam rangka penurunan angka gizi buruk dan stunting di Kabupaten Jember.
2. Kesepakatan Bersama antara Politeknik Mitra Global dengan Pemkab Jember tentang Kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengaduan kepada masyarakat dan Pengembangan sumber daya manusia.
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang Pelayanan pembayaran pajak daerah secara online di Kabupaten Jember.
4. Perjanjian Kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember tentang Pelayanan pembayaran pajak daerah secara online di Kabupaten Jember.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Perum Kehutanan Negara tentang Optimalisasi Pengelolaan wisata terpadu di Kabupaten Jember.
6. Kesepakatan Bersama antara Poltek Negeri ATK Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengaduan kepada masyarakat dan Pengembangan sumber daya manusia.
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Universitas Diponegoro tentang Kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengaduan kepada masyarakat dan Pengembangan sumber daya manusia.
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT PJB Unit Bisnis Jasa O & M PLTU PAITON tentang Pemanfaatan Fly ASH dan BOTTOM ASH (FABA).



9. Nota Kesepakatan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember dengan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani di Kabupaten Jember.
10. Nota Kesepakatan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember dengan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Nota Kesepakatan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember dengan Pemerintah Kabupaten Jember.
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Universitas Pembangunan Nasional " Veteran" Yogyakarta tentang Kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Pengembangan sumber daya.
12. Perjanjian Kerjasama antara Politeknik Transpostasi Darat Indonesia-STTD dengan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber daya manusia di bidang perhubungan darat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
13. Kesepakatan Bersama antara Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Jember dengan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Penguatan Kapasitas Sumber daya manusia di Kabupaten Jember melalui sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi.
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta tentang Kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Pengembangan sumber daya.
15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Universitas Terbuka Malang tentang Kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Pengembangan sumber daya.
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Universitas Negeri Semarang tentang Kerjasama dalam bidang



Pendidikan, penelitian, pengaduan kepada masyarakat dan Pengembangan sumber daya.

17. Kesepakatan Bersama antara Yayasan Penguatan Partisipasi dan Kemitraan Masyarakat Indonesia Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat Jember dan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Implementasi program meningkatkan nutrisi dan akses kesehatan bagi ibu, anak dan remaja di Kabupaten Jember.
18. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tentang Kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengaduan kepada masyarakat dan Pengembangan sumber daya.
19. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Universitas Trisakti tentang Kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengaduan kepada masyarakat dan Pengembangan sumber daya.
20. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Ruang Temu Generasi Sehat (Rutgen) WPF Indonesia tentang Implementasi program Power to You(th) di Kabupaten Jember.
21. Nota Kesepakatan antara BPJS Kesehatan Cabang Jember dengan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Pemanfaatan data dan informasi dalam layanan lingkup tugas badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.
22. Nota Kesepakatan antara BPJS Kesehatan Cabang Jember dengan Pemerintah Kabupaten Jember tentang Bantuan selisih iuran bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja pelayanan di ruang perawatan kelas III di wilayah Kabupaten Jember.

4.3.3 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Upaya peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan, serta penciptaan situasi ketentraman, keamanan dan ketertiban yang dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi vertikal, melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Survey dan Pemetaan serta Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah, berkoordinasi dengan TOPDAM V Brawijaya guna menginventarisir nama-nama pulau dan unsur rupa bumi serta menginventarisir batas kecamatan dan Desa di Kabupaten Jember.

4.3.4 Pembinaan Batas Wilayah

Kabupaten Jember berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara serta Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi daerah serta untuk menegaskan wilayah administratif Kabupaten sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, maka Kabupaten Jember pada tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan pembinaan batas wilayah sebagai berikut:

1. Mengadakan Sosialisasi dan Penegasan Batas Wilayah Serta Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Jember Tahun 2022.

Kegiatan Sosialisasi dan Penegasan Batas Wilayah Serta Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Jember Tahun 2022 diadakan dengan menghadirkan narasumber dari TOPDAM V Brawijaya dan DPMD dengan mengundang aparatur kelurahan dan desa serta OPD Terkait untuk diberikan pemahaman mengenai teknis penegasan batas desa dan pembakuan nama rupabumi.



2. Fasilitas penegasan batas wilayah desa

Bagian Tata Pemerintahan telah melaksanakan fasilitas penegasan batas wilayah desa sebanyak 27 Desa yaitu 10 desa pada tahun 2020 di Kecamatan Kalisat dan 17 desa pada tahun 2021 di Kecamatan Gumukmas dan Silo. Selanjutnya ada perubahan pengampu penegasan batas wilayah desa yaitu DPMD untuk melanjutkan penegasan wilayah batas desa yang tersisa. Berkaitan dengan adanya aturan yang mengharuskan penggunaan peta dasar dengan skala 1:5000 oleh BIG, karena sebelumnya menggunakan peta dasar dengan skala 1:10.000, dan penegasan batas wilayah desa akan dilaksanakan kembali oleh DPMD sesuai dengan ketentuan dari BIG.

Penegasan batas wilayah desa ini dilaksanakan oleh tim teknis Kabupaten Jember bekerja sama dengan Topografi Daerah Militer V/Brawijaya yang diwujudkan dalam kegiatan pemasangan tugu batas serta penerbitan Peta Batas Desa.

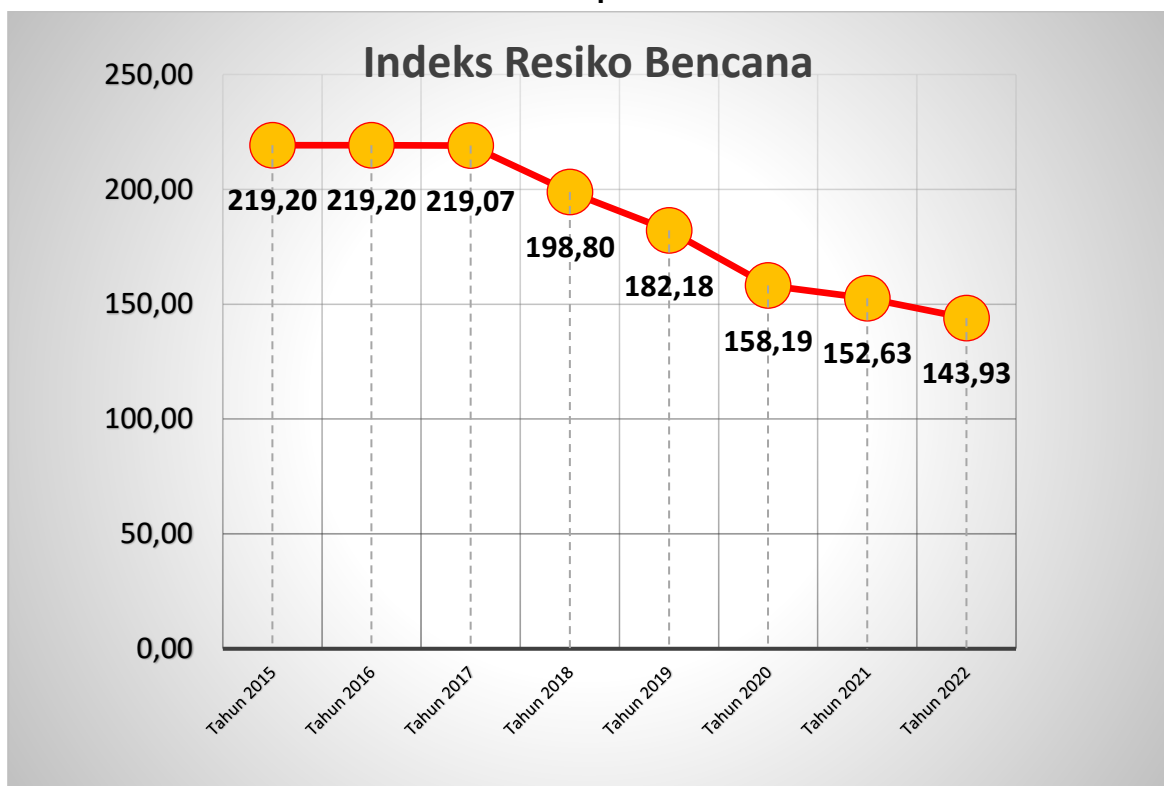
Adapun proses yang dilaksanakan untuk pemasangan dan penerbitan peta batas dalam bentuk perkada batas desa dimaksud antara lain orientasi lapangan penetapan peta dasar, pemeriksaan lapang bersama penduduk lokal, kajian kartometrik, pengukuran dengan GPS, pengolahan data pengukuran GPS Geodetik, pemasangan tugu batas serta penyajian dalam peta standar BIG dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Perkada.

4.3.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Wilayah Kabupaten Jember merupakan kawasan dengan potensi bencana (hazard potency) yang sangat tinggi. Namun demikian Indeks Resiko Bencana tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 8,7 poin menjadi 143,93 poin lebih rendah dibanding Tahun 2021 sebesar 152,63 poin. Sedangkan angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Jember mengalami peningkatan dari 0,51 poin pada tahun 2021 menjadi 0,55 poin

di tahun 2022. Meskipun terdapat trend penurunan Indeks Risiko Bencana, namun Jember masih menjadi wilayah yang sangat rawan. Hal ini dikarenakan potensi bencana yang ada diantaranya gempa bumi, tsunami, likuifaksi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan lain sebagainya, yang berimplikasi terhadap perlunya pengamanan warga Jember dari dampak yang diakibatkan oleh bencana.

Gambar 4.1
Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2022



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (data diolah)

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Bencana alam yang terjadi di tahun 2022 sebanyak 331 kejadian yang tersebar di 31 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

- Banjir sebanyak 44 kali
- Banjir Rob/Abrasi 1 kali
- Tanah longsor 44 kali



- d. Angin Puting Beliung sebanyak 59 kali
- e. Kebakaran sebanyak 28 kali
- f. Kekeringan 1 kali
- g. Gempa bumi sebanyak 153 kali
- h. Erupsi Gunung Api 1 kali

Tabel 4.2
Perkembangan Hasil Pencapaian Pelaksanaan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Bencana Tahun 2018 – 2022

Uraian Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Terciptanya penanggulangan bencana yang cepat dan akurat sehingga mengurangi beban masyarakat yang tertimpa bencana dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, koordinasi secara rutin, penyuluhan dan simulasi tentang bencana, pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi pengungsi korban bencana alam meliputi :					
1. Banjir	40 x	15 x	17 x	46 x	44 x
2. Banjir Rob/Abrasi	1 x	1 x	-	-	1 x
3. Tanah Longsor	51 x	22 x	16 x	27 x	44 x
4. Angin Puting Beliung	58 x	86 x	57 x	64 x	59 x
5. Kebakaran	54 x	67 x	26 x	13 x	28 x
6. Kebakaran Hutan dan Lahan	9 x	35 x	-	-	-
7. Kekeringan	3 x	39 x	2 x	-	1 x
8. Gempa Bumi	8 x	21 x	1 x	5 x	153 x
9. Erupsi Gunung Api	-	-	1 x	-	1 x

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Melihat kondisi bencana di Kabupaten Jember pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terjadi pergeseran jenis bencana. Jumlah kejadian bencana alam meningkat dari 155 kali menjadi 331 kali.



Kejadian bencana alam pada Tahun 2022 didominasi oleh gempa bumi (153 kali), angin puting beliung (59 kali), banjir (44 kali), dan diikuti tanah longsor (44 kali).

Upaya-upaya yang dilakukan BPBD dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam di Kabupaten Jember selama tahun 2022 :

- a. Memberikan pelayanan / penanggulangan bencana kepada masyarakat yang terdampak bencana;
- b. Memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana berupa : sembako, sandang, dan bantuan material yang bersifat stimulan.
- c. Membentuk desa tangguh bencana;
- d. Membuat rabu-rabu peringatan bencana di kawasan yang memiliki potensi bencana;
- e. Menyusun kajian resiko bencana kabupaten;
- f. Menyusun rencana penanggulangan bencana;
- g. Melaksanakan pelatihan dasar manajemen bencana bagi pelaku penanggulangan bencana;
- h. Memberikan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- i. Membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB).

2. Status Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Jember selama Tahun 2022 dikategorikan merupakan bencana lokal, dimana penanganan bencana dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Status darurat bencana yang diterbitkan diantaranya:

- a. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/450/1.12/2022 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Jember Tahun 2022.



3. Sumber dan Jumlah Anggaran

- a. Anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 mencapai 11.302.761.704 dengan realisasi persentase capaian sebesar 83,93%. yang digunakan untuk pelaksanaan 2 Program, 10 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Pemetaan daerah rawan bencana di Kabupaten Jember, dan pengecekan daerah berisiko bencana dengan memanfaatkan aplikasi inaRISK dari BNPB.
- b. Sosialisasi dan pelatihan kebencanaan kepada seluruh lapisan masyarakat dan relawan yang ada di wilayah rawan bencana.
- c. Mengaktifkan posko siaga darurat bencana serta melaksanakan gelar pasukan dan peralatan penanggulangan bencana.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

- a. Banjir, retakan tanah dataran tinggi dan tanah longsor sebagai akibat penggundulan hutan terutama di wilayah utara.
- b. Erupsi Gunung Api Raung di Kabupaten Jember bagian timur.
- c. Banjir luapan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jember.
- d. Bencana gempa bumi mengingat daerah selatan Kabupaten Jember memiliki potensi terjadinya gempa bumi.
- e. Tsunami akibat dari bencana gempa bumi.
- f. Angin kencang / cuaca ekstrim dimana hampir seluruh wilayah Kabupaten Jember memiliki potensi terjadinya angin kencang.
- g. Bencana kekeringan.



4.3.6 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban Umum merupakan prasyarat mutlak bagi kenyamanan hidup penduduk, sekaligus menjadi landasan utama bagi pembangunan wilayah. Pada tahun 2022 terlihat bahwa kondisi keamanan dan ketertiban Kabupaten Jember relatif stabil atau terkendali. Namun kerap juga masih terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berpotensi meningkatkan keresahan dan menimbulkan rasa tidak aman masyarakat, seperti konflik horizontal, aksi premanisme, unjuk rasa yang anarkis, dan tindakan kejahatan.

1. Gangguan Yang Terjadi

Gangguan yang seringkali terjadi bagi terciptanya ketertiban, kenyamanan serta ketentraman umum antara lain adalah kondisi masyarakat Jember yang heterogen dan cenderung mencari jalan pintas yang seringkali mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta tuntutan masyarakat akan gaya hidup yang tinggi. Namun demikian selama Tahun 2022 tidak terjadi gangguan yang sifatnya menonjol, tidak terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis SARA, anarkisme, separatisme ataupun konflik lainnya.

Disisi lain Sosialisasi peraturan daerah yang masih belum menyentuh pada semua lapisan masyarakat, seringkali dijadikan alat pembenar untuk melakukan berbagai pelanggaran terhadap peraturan daerah, padahal sebagian besar peraturan daerah yang ada sudah dapat dipahami dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat dan seringkali para pelanggar peraturan daerah maupun kebijakan Bupati lainnya adalah orang-orang yang sama dan seringkali melakukan gangguan terhadap ketertiban umum.

Disadari bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk besar dan heterogenitas budaya yang memiliki banyak varian. Selain itu, letak geografis yang sangat strategis dan banyaknya potensi pariwisata menarik para investor lokal maupun manca



negara untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Jember. Selain memberikan dampak positif, juga dapat berpotensi memberikan dampak negatif, diantaranya mudah masuknya budaya luar yang kurang baik, heterogenitas masyarakat yang tinggi cenderung menimbulkan persoalan tersendiri dalam melakukan penertiban dan menjaga ketentraman lingkungan. Persinggungan antar budaya dan kebiasaan, tuntutan pola hidup modernitas tinggi, dan keberanekaragaman kepentingan cenderung akan melahirkan kondisi lingkungan berpotensi mengganggu terjaganya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Jember yang memiliki tupoksi mencegah gangguan, menangani gangguan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Hal ini juga berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Situasi dan kondisi yang kondusif merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan di daerah. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember selalu dituntut untuk bertindak responsif dan lebih profesional. Demi tercapainya profesionalisme tersebut,



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai yang berada di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sejumlah 487 orang pegawai. Di MAKO sejumlah 152 pegawai, dan di Kecamatan se-Kab. Jember 335 pegawai dengan rincian:

a. Distribusi Pegawai Satpol PP berdasarkan Golongan

- Golongan I : 11 orang
- Golongan II : 94 orang
- Golongan III : 40 orang
- Golongan IV : 7 orang
- Non Golongan : 335 orang

b. Distribusi Pegawai Satpol PP berdasarkan Pendidikan Terakhir

- SD/Sederajat : 5 orang
- SMP/Sederajat : 25 orang
- SMA/Sederajat : 417 orang
- Diploma : 1 orang
- Strata I (S1) : 34 orang
- Strata II (S2) : 5 orang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos DPPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sejumlah Rp.25.600.879.249,- (dua puluh lima milyar enam ratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu duaratus empat puluh sembilan rupiah) yang



terdiri dari Rp.24.286.328.198,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah) digunakan untuk Belanja Operasi (Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan serta Belanja Barang Dan Jasa), sedangkan sisanya digunakan untuk Belanja Modal (Sarana dan Prasarana) sebesar Rp.1.314.551.051,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus lima puluh satu ribu lima puluh satu rupiah).

5. Penanggulangan dan Kendala

Guna melakukan penanggungan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum, selalu dilakukan upaya-upaya persuasif dan sosialisasi menyeluruh kepada segenap lapisan masyarakat dan kelompok masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Penanggulangan yang dilakukan pasca pandemi, adalah lebih bersifat kepada pencegahan. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum antara lain dengan mengadakan patroli rutin, penjagaan serta pembentukan dan pembinaan Satuan Linmas di tiap desa/kelurahan, bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam usaha menjaga situasi tetap kondusif, beberapa diantaranya adalah kerjasama dengan pihak aparat keamanan, dan dengan tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tidak ditemui kendala yang berarti, karena usaha dan kerjasama penanggulangan secara simultan terus dilaksanakan. Namun apabila diperlukan langkah-langkah represif, maka ketika tindakan represif dilakukan itu merupakan pilihan akhir dengan mengedepankan acuan pada peraturan yang ada dengan memperhatikan asas-asas kemanusiaan.



6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam setiap penanggulangan dan penindakan dalam rangka menertiban dan menjaga ketentraman lingkungan, Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya seperti pihak Kepolisian maupun TNI yang juga senantiasa berperan serta secara aktif dalam usaha penanggulangan tersebut. Paduan antara 3 unsur aparatur keamanan dan ketertiban dengan dibantu masyarakat merupakan satu kekuatan yang sangat kokoh dalam usaha mewujudkan ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat.

Meskipun belum terlaksana secara maksimal, namun dari beberapa hasil yang telah dicapai diharapkan dapat dijadikan pelajaran dan pedoman bagi Polisi Pamong Praja agar ke depan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih baik, proposional dan profesional demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya berujung pangkal pada tercapainya kemakmuran bersama.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun 2022 ini, merupakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati periode tahun 2021-2024 tahun kedua yang disampaikan oleh Bupati periode tahun 2021-2024.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun 2022, sebagai bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun, sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil pelaksanaan pembangunan dan manfaatnya yang telah dicapai selama ini merupakan hasil kolaborasi, akselerasi dan sinergi dari seluruh pihak (*stakeholder*) dan diharapkan dapat terus berjalan dengan baik sesuai dengan kewenangan tugas dan kompetensi masing-masing, sehingga seluruh program pembangunan yang telah disepakati dan menjadi tujuan bersama dapat terwujud.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 telah dilakukan seoptimal mungkin dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kinerja pembangunan yang telah dilakukan menunjukkan hasil optimal, disisi lain masih ada kinerja pembangunan yang perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian kita bersama agar terwujudnya perencanaan pembangunan untuk



mencapai tujuan prioritas di Kabupaten Jember. Hal itu perlu dimaklumi karena pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi dimensi waktu, ekonomi, sosial budaya politik serta keamanan dan ketertiban.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Jember pada Tahun 2022 masih perlu mendapat masukan, saran dan koreksi dalam bentuk Rekomendasi DPRD sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 pasal 19 ayat 3, bahwa Rekomendasi DPRD sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Kami berharap semua yang telah kita laksanakan dapat membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Jember. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridhlo-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai.

Jember, Maret 2023

BUPATI JEMBER

Ir. H.HENDY S, ST. IPU